

**ANALISIS KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI  
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2004-2013**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan**



**Oleh:  
WIDI ASIH  
10404244012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015**

**ANALISIS KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI  
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2004-2013**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan**



**Oleh:  
WIDI ASIH  
10404244012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015**

**ANALISIS KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI  
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2004-2013**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

WIDI ASIH

NIM.10404244012

Telah disetujui dan disahkan  
Pada Tanggal 4 Mei 2015

Untuk dipertahankan di depan Tim Pengaji Tugas Akhir Skripsi  
Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta.

Disetujui

Dosen Pembimbing,

*[Signature]*

Maimun Sholeh, M.Si  
NIP. 19660606 200501 1 002

## PENGESAHAN

## SKRIPSI

## **ANALISIS KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2004-2013**

Oleh:

Widi Asih

NIM. 10404244012

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengisi Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 Mei 2015 dan dinyatakan telah lulus.

Nama

Jabatan

### Tanda Tangan Tanggall

Dr. Endang Mulyani, M.Si

Ketua Penguji

26 Mei 2015

Maimun Sholeh, M.Si

## Sekretaris

Opening — 29 Mei 2015

Losina Purnastuti, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D., Penguin Utama

25 Mei 2015

Yogyakarta, 29 Mei 2015  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Sugiharsono, M.Si  
NIP. 19550328 198303 1 002

---

#### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widi Asih  
NIM : 10404244012  
Program Studi : Pendidikan Ekonomi  
Judul Skripsi : ANALISIS KETIMPANGAN DALAM  
PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR  
KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2004-2013

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, Mei 2015  
Penulis,



Widi Asih  
NIM. 10404244012

## **MOTTO**

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(QS. Ash-Sharh 5-8)

“Hidup dengan mengatur dan mendisiplinkan diri itu lebih sulit dari pada hidup diatur untuk disiplin”.

(Widi Asih)

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang maha mendengar dan mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Tugas Akhir Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ① Bapak dan Ibu tercinta (Darsum Suyatno dan Sulastri) yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan perhatiannya serta yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak perempuan satu satunya.

*Kubingkiskan Tugas Akhir Skripsi ini untuk:*

- *Adik-adikku Ade dan Gigih yang selalu menjadi motivator untuk membuat ku melakukan yang terbaik.*
- *Orang-orang spesial yang selalu ada dan telah memberikan motivasi serta bantuannya.*

# **ANALISIS KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2004-2013**

Widi Asih  
NIM. 10404244012

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi kecamatan dari tahun 2004 hingga 2013. 2) Mengetahui pengaruh komponen pertumbuhan *regional share* terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan. 3) Mengetahui pengaruh komponen pertumbuhan *proporsional shift* terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan. 4) Mengetahui pengaruh komponen pertumbuhan *competitive shift* terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan. 5) Mengetahui pengaruh jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan. 6) Mengetahui pengaruh jumlah keluarga miskin terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan. 7) Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk migrasi terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2004-2013. Teknik analisis yang digunakan untuk analisis deskriptif adalah matrik *Tipology Klassen*, sedangkan analisis kuantitatif digunakan analisis regresi data panel model *Fixed Effect*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan *Tipology Klassen* tidak semua kecamatan mengalami perkembangan pembangunan ekonomi yang positif, terdapat sepuluh kecamatan yang mengalami kemunduran menjadi daerah yang berfluktuasi negatif dan mengalami kemunduran menjadi daerah yang relatif tertinggal. 2) Analisis menggunakan regresi data panel menunjukkan bahwa variabel komponen pertumbuhan *regional share* tidak dimasukan atau dihilangkan dari model. 3) Variabel komponen pertumbuhan *proporsional shift* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. 4) Variabel komponen pertumbuhan *competitive shift* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. 5) Variabel jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. 6) Variabel jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. 7) Variabel pertumbuhan penduduk migrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

**Kata kunci:** ketimpangan pembangunan ekonomi, *Tipology Klassen*, *fixed effect*

**AN ANALYSIS OF THE INEQUALITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
AMONG DISTRICTS IN CILACAP REGENCY  
IN 2004-2013**

Widi Asih  
NIM. 10404244012

**ABSTRACT**

This study aims to investigate: 1) the progress of economic development in districts from 2004 to 2013, 2) the effect of the regional share growth component on the inequality of economic development in districts, 3) the effect of the proportional shift growth component on the inequality of economic development in districts, 4) the effect of the competitive shift growth component on the inequality of economic development in districts, 5) the effect of the number of the population with senior high school and higher education levels on the inequality of economic development in districts, 6) the effect of the number of poor families on the inequality of economic development in districts, and 7) the effect of the growth of the migrating population on the inequality of economic development in districts.

This was a quantitative descriptive study. The research data were secondary data from 24 districts in Cilacap Regency in 2004-2013. The analysis technique for the descriptive analysis was the Klassen typology matrix and the quantitative analysis technique was panel data regression analysis using the fixed effect model.

The results of the study were as follows. 1) Based on the Klassen typology, not all districts experienced positive progress of economic development; ten districts experienced setbacks becoming areas with negative fluctuation and they experienced setbacks becoming relatively backward areas. 2) The analysis using the panel data regression showed that the variable of the regional share growth component share was not included in or eliminated from the model. 3) The variable of the proportional shift growth component did not have a significant effect on the inequality of economic development. 4) The variable of the competitive shift growth component had a significant positive effect on the inequality of economic development. 5) The variable of the number of the population with senior high school and higher education levels had a significant positive effect on the inequality of economic development. 6) The variable of the number of poor families had a significant negative effect on the inequality of economic development. 7) The variable of the growth of the migrating population did not have a significant effect on the inequality of economic development.

**Keywords:** inequality of economic development, Klassen typology, fixed effect

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Rab Semesta Alam Yang Maha Mengetahui sagala sesuatu. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi ini merupakan penelitian tentang ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap selama periode tahun 2004 hingga 2013.

Selama penyusunan skripsi ini, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika penyusun menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberi saran, masukan, dan perhatiannya selama ini.
3. Maimun Sholeh, M.Si selaku Pembimbing yang telah secara langsung membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Losina Purnastuti, S.E. M.Ed. Dev. Ph.D selaku narasumber dan penguji utama yang telah memberikan banyak saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Endang Mulyani, M.Si selaku ketua penguji yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya bagi penulis.
7. Pak Dating selaku admin Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah membantu terkait administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan data penelitian.
9. Segenap staf di Badan Pusat Statistik yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
10. Rekan-rekan di Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah terlibat dalam memberikan motivasi, arahan, dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Mei 2015

Penulis

Widi Asih

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pembangunan Ekonomi .....	16
B. Pembangunan Daerah.....	18
C. Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	20
D. Disparitas Pembangunan .....	30
E. Ukuran Ketimpangan Pembangunan.....	37

F. Hubungan Pendidikan dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Daerah.....	42
G. Hubungan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Daerah .....	43
H. Hubungan Kependudukan dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Daerah .....	46
I. Hubungan Pola Perekonomian Daerah dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Daerah .....	47
J. Penelitian yang Relevan .....	48
K. Kerangka Berfikir.....	51
L. Hipotesis Penelitian.....	52
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Desain Penelitian.....	54
B. Sumber Data.....	54
C. Teknik Analisis .....	54
1. Tipologi Klassen .....	55
2. Analisis Regresi Data Panel.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Deskripsi Data.....	68
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	69
2. PDRB Perkapita.....	71
3. Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi.....	73
4. Komponen Pertumbuhan Ekonomi .....	75
5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	77
6. Jumlah Keluarga menurut Tingkat Kesejahteraan .....	79
7. Pertumbuhan Penduduk Migrasi .....	81
B. Analisis Data.....	83
1. Perkembangan Tingkat Kemajuan Tiap-tiap Kecamatan .....	83
2. Analisis Regresi Data Panel .....	87
a. Uji Asumsi Model Regresi Data panel.....	87
b. Penentuan Teknik Estimasi Data Panel.....	92
c. Analisis Data Panel .....	94
d. Uji Signifikansi Model Regresi Data Panel.....	97
e. Pembahasan Hasil Penelitian .....	99
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Rekomendasi Kebijakan .....	110
C. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

<b>LAMPIRAN .....</b>	116
-----------------------	-----

## DAFTAR TABEL

### **Tabel**

Tabel 1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Perkembangan Penanaman Modal Bidang Industri di Indonesia Tahun 1969-1975.....	3
Tabel 2	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cilacap Tahun 2012.....	9
Tabel 3	Data Keluarga Menurut Pentahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Cilacap Tahun 2012 .....	11
Tabel 4	Pengelompokan Ekonomi Daerah Berdasarkan Topologi Daerah .....	33
Tabel 5	Variabel-variable Penelitian.....	57
Tabel 6	Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2010 (%).....	69
Tabel 7	Kontribusi PDRB Kecamatan terhadap Perekonomian Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013 (%).....	70
Tabel 8	Tingkat PDRB Perkapita dan Jumlah Penduduk Tiap-Tiap Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013 .....	72
Tabel 9	Indek Ketimpangan Pembangunan di dalam Kecamatan Tahun 2004-2013.....	74
Tabel 10	Komponen Pertumbuhan Ekonomi Competitive Shift, Proportional Shift dan Regional Share Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013 (%). ....	75
Tabel 11	Persentase Jumlah Penduduk dengan Tingkat Pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi Tahun 2004-2013 .....	78
Tabel 12	Persentase Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Tingkat Keluarga Sejahtera dan Sejahtera Tahap I di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013 (%).....	81
Tabel 13	Pertambahan Penduduk Total Tiap Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013 .....	82
Tabel 14	Perhitungan Tipologi Klassen Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013 .....	83
Tabel 15	Uji Normalitas .....	87
Tabel 16	Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas dengan Pearson Correlation .....	88
Tabel 17	Hasil Model Regresi <i>Fixed Effect</i> dengan Mengeluarkan Variabel Independent yang Berkorelasi tinggi .....	89
Tabel 18	Hasil Uji Multikolinear setelah diatasi dengan menghilangkan variabel X1 .....	90
Tabel 19	Uji Heterokedastisitas .....	90
Tabel 20	Uji Autokorelasi .....	91
Tabel 21	Pemilihan Model <i>Fixed Effect</i> .....	92

Tabel 22	Uji LM.....	93
Tabel 23	Uji Hausman.....	93
Tabel 24	Hasil Estimasi Model <i>Fixed Effect</i> Dengan <i>Dummy Variabel</i> .....	96
Tabel 25	Data Panel Model <i>Fixed Effect</i> dengan <i>Feasibel General Least Square(FGLS)</i> .....	97
Tabel 26	Uji Signifikansi Individual/Uji t .....	97
Tabel 27	Uji Statistik F .....	98
Tabel 28	Uji Koefisien Determinasi .....	99
Tabel 29	Variansi Ketimpangan Pembangunan pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Cilacap .....	106

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Gambar/Grafik**

Gambar 1	Nilai Indeks Williamson antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2013.....	5
Gambar 2	Perkembangan Tingkat Pembangunan Antarwilayah melalui Indeks Williamson di Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 .....	6
Gambar 3	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012.....	10
Gambar 4	Kurva Lorenz.....	39
Gambar 5	Alur Kerangka Berfikir .....	51
Gambar 6	Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013.....	73
Gambar 7	Perkembangan Jumlah Penduduk yang Mengenyam Pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013 .....	77
Gambar 8	Perkembangan Jumlah Penduduk Prasejahtera dan Tingkat Sejahtera Tahap I di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013.....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Tabel Instrumen Data Penelitian.....	117
Lampiran 2.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003-2013 .....	123
Lampiran 3.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2013.....	124
Lampiran 4.	Tabel Perhitungan Komponen Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Daeyuhluhur Tahun 2012 .....	125
Lampiran 5.	Tabel Perhitungan Pertumbuhan Penduduk Migrasi Tahun 2012.....	126
Lampiran 6.	Tabel Perhitungan Jumlah Penduduk Dengan Tingkat Pendidikan SMA Dan Perguruan Tinggi .....	127
Lampiran 7.	Tabel Perhitungan Jumlah Keluarga Miskin Menurut Tingkat Kesejahteraan Tahun 2013 .....	128
Lampiran 8.	Tabel Perhitungan Indeks Kesenjangan Theil Intra dan Inter Kecamatan Tahun 2012.....	129
Lampiran 9.	Tabel Perhitungan Tipologi Klasen Kabupaten Cilacap Tahun 2012 .....	130
Lampiran 10.	Variabel Penelitian .....	131
Lampiran 11.	Uji Normalitas.....	132
Lampiran 12.	Hasil Running Regresi Model <i>Pooled Least Square</i> Terhadap Keseluruhan Variabel .....	133
Lampiran 13.	Uji Multikolinear Keseluruhan Variabel .....	134
Lampiran 14.	Hasil Running Stata Model <i>Pooled Least Square</i> Model 1 .....	135
Lampiran 15.	Hasil Running Stata Model <i>Pooled Least Square</i> Model 2 .....	136
Lampiran 16.	Hasil Running Stata Model <i>Pooled Least Square</i> Model 3 .....	137
Lampiran 17.	Hasil Model Terpilih untuk Estimasi Regresi Data Panel .....	138
	A. <i>Regresi Pooled Least Square</i> .....	138
	B. <i>Regresi Fixed Effect Model</i> .....	139
	C. <i>Regresi Random Effect Model</i> .....	140
Lampiran 18.	Uji <i>Breusch Pagan</i> (LM Test) .....	141
Lampiran 19.	Uji <i>Hausman</i> .....	141
Lampiran 20.	Model Estimasi Terpilih Model Regresi <i>Fixed Effect</i> .....	142
Lampiran 21.	Model Regresi <i>Fixed Effek</i> Dengan <i>Dummy Variabel</i> .....	143
Lampiran 22.	Uji Asumsi Klasik .....	144
	A. Uji Multikolinearitas .....	144
	B. Uji Heterokedastisitas .....	144
	C. Uji Autokorelasi.....	144
Lampiran 23.	Mengatasi Masalah Asumsi Klasik dengan <i>Feasible General Least Square</i> (FGLS) .....	145
Lampiran 24.	Variansi Ketimpangan Pembangunan pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Cilacap .....	146

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan menjadi suatu proses kegiatan yang dianggap penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara, karena globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam proses pembangunan harus mencakup seluruh aspek baik ekonomi maupun sosial. Seperti yang terdapat dalam Todaro (2006:28), menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan kecemburuhan sosial (Dumairy, 1996: 65-66). Untuk mencapai hal tersebut, keberhasilan pembangunan sering diidentik dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Kata kunci dari pembangunan adalah pembentukan modal, karena untuk mencapai target pembangunan yang tinggi pada suatu negara dibutuhkan nilai investasi yang besar. Sehingga strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi (Kuncoro, 2010:4). Selain itu, kebutuhan akan investasi yang besar dapat diperoleh juga melalui dorongan kondisi negara yang sudah lebih baik terutama sistem pelayanan serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Namun demikian tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti semua wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, karena adanya keterbatasan baik dari sisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lembaga institusi yang mendukung. Sebab pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi dibeberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensi yang berbeda (Perroux dikutip dalam Arsyad, 1999:147). Dalam intensi pertumbuhan yang berbeda, pelaksanaan pembangunan sering mengalami perdebatan antara mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan disatu pihak dengan efektivitas dan pemerataan dipihak lain (Dumairy, 1996:55-56). Dari hal tersebutlah, pelaksanaan pembangunan tidak jarang menciptakan adanya ketimpangan.

Di Indonesia sejak tahun 1970 sudah bisa dikatakan berhasil dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang terlihat dalam Tabel 1, terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

**Tabel 1.Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Perkembangan Penanaman Modal Bidang Industri di Indonesia Tahun 1969-1975**

Tahun	PDB Riil (milyar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PMDN		PMA	
			Jumlah Proyek	Rencana Investasi (juta RP)	Jumlah Poyek	Rencana Investasi (ribu US \$)
1968			12	3.282	27	41.790
1969	4.820,5	-	116	28.347	37	84.862
1970	5.182,0	7,50	228	83.557	64	119.636
1971	5.544,7	7,00	234	108.502	65	229.091
1972	6.067,2	9,42	384	170.704	53	132.925
1973	6.753,4	11,31	331	282.214	81	357.046
1974	7.269,0	7,63	239	212.094	63	822.460
1975	7.630,8	4,98	127	175.799	35	119.435
1976	8.156,3	6,89	61	252.994	10	35.618
Jumlah			1.732	1.317.493	446	1.960.829

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN RI Tahun 1990/1991 dan Tahun 1977/1978

Berdasarkan Tabel 1, menunjukan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tinggi, yaitu mencapai 7,50 % pada tahun 1970. Meskipun pada tahun 1975 pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur mengalami penurunan. Adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi ternyata juga disertai dengan peningkatan perencanaan penanaman modal dalam bidang industri baik PMA atau PMDN pada tahun 1970.

Dan selama masa orde baru (1966-1998) pemerintah memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Terbukti dari adanya tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 21,32% yang merupakan pertumbuhan sektor tertinggi dari tahun 1983-1987 (Nota Keuangan dan RAPBN, 1990:641). Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi dan upaya-upaya pembangunan yang dilakukan tidak mempertimbangkan kondisi dan potensi pada masing-masing daerah, di mana rata-rata masyarakatnya bekerja pada sektor agraris dan berpendidikan rendah.

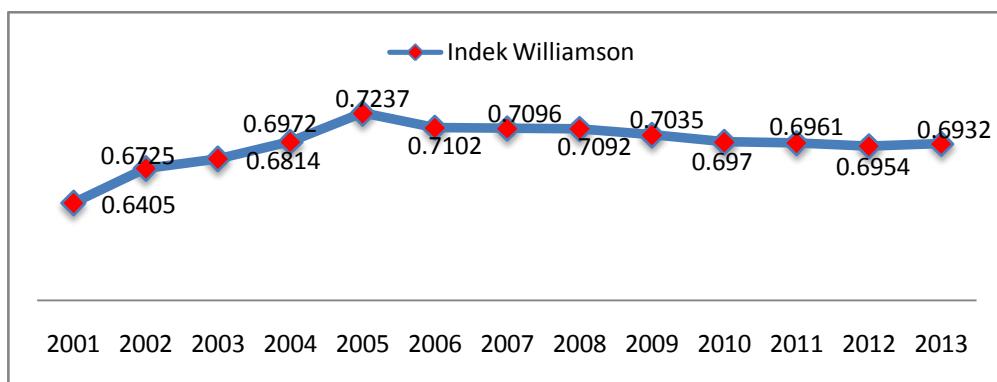
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya berimbang pada tingkat nasional tidak serta pada tingkatan daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar kawasan di Indonesia.

Sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan daerah, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah kebijakan yaitu kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan alasan, bahwa kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat tidak semuanya bisa diterapkan di seluruh daerah, daerah yang memiliki daya dukung dan sesuai dengan kriteria kebijakan nasional akan dengan mudah menyerap peluang pembangunan, sedangkan daerah yang tidak sesuai kriteria kebijakan nasional akan mengalami perlambatan dalam pembangunan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan optimalisasi pembangunan akan terjadi. Di mana kebijakan pembangunan ini disesuaikan dengan potensi dan permasalahan daerah.

Adanya otonomi daerah sebagai sistem kerja pemerintah Indonesia, diharapkan kebijakan ini juga dapat memberikan kemudahan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (daerah di sini terutama kabupaten dan kota), pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesetaraan kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan. Selain itu, ada beberapa keuntungan kebijakan otonomi daerah menurut (Suparmoko, 2002:19), pertama adalah sistem pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan keinginan masing-masing masyarakat,

kedua adalah pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri, ketiga adalah dengan adanya otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang akan dilakukan.

Walaupun demikian ketimpangan pembangunan antar daerah masih juga terjadi, seperti yang tertera dalam Gambar 1.



Sumber: BPS Jawa Tengah 2013

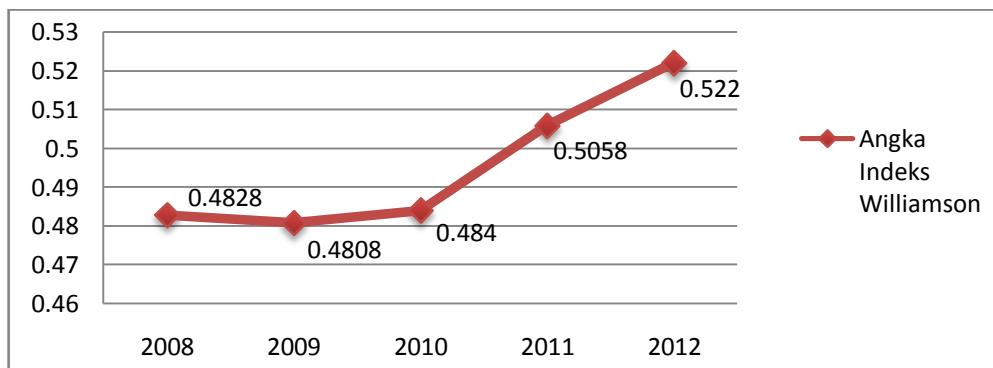
**Gambar 1. Nilai Indeks Williamson antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2013.**

Berdasarkan Gambar 1, terkait nilai indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2013, menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2001 terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2005 tingkat ketimpangan mencapai nilai hingga 0,7237 yang termasuk kategori ketimpangan yang tinggi, meskipun mulai tahun 2006 tingkat ketimpangan mulai berlahan mengalami penurunan. Dari ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menunjukan bahwa setelah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah

pada tahun 2001, pembangunan antar daerah justru mengalami peningkatan dalam ketimpangan pembangunan.

Disamping ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, ketimpangan pembangunan juga terjadi di wilayah kabupaten itu sendiri. Seperti halnya ketimpangan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Ketimpangan telah mengakibatkan adanya pembagian wilayah antara Cilacap Bagian Barat dan Cilacap Bagian Timur. Timbulnya pembagian wilayah merupakan bentuk kecemburuan masyarakat dari daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian dalam pembangunan. Dan ketimpangan pembangunan yang terjadi telah mendorong masyarakat di wilayah Cilacap Barat untuk membentuk daerah otonomi tersendiri (Een Erliana, 2014).

Besarnya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Cilacap juga dapat ditunjukan dengan Indeks Williamson pada Gambar 2. Di mana data yang digunakan dalam pengukuran adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2013

**Gambar 2. Perkembangan Tingkat Pembangunan Antarwilayah melalui Indeks Williamson di Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012.**

Berdasarkan Gambar 2, menunjukan adanya tingkat perkembangan ketimpangan yang semakin meningkat dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Terlihat pula pada tahun 2012 angka indeks Williamson mencapai 0,522 yang menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Cilacap dalam kategori level tinggi.

Di dalam RPJMD Kabupaten Cilacap (2008:8), menyebutkan bahwa Kabupaten Cilacap merupakan wilayah dengan corak sosiokultural yang dicirikan dengan luasnya daerah pedesaan dan kultur agraris dalam kehidupan masyarakatnya. Dan berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas 2011, Kabupaten Cilacap memiliki PDRB dan PDRB perkapita tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, besarnya PDRB mencapai 102.483 juta rupiah dengan pendapatan perkapita sebesar 58.383.477 rupiah. Namun PDRB tanpa migas yang diperoleh Kabupaten Cilacap lebih rendah yaitu hanya 21.917,10 miliar rupiah dengan pendapatan perkapita yang diperoleh sebesar 13.744.886 rupiah. Besarnya PDRB dan pendapatan perkapita berdasarkan PDRB ADHB dengan migas, menunjukan bahwa perekonomian di Kabupaten Cilacap tidak mencerminkan kondisi atau corak kehidupan masyarakatnya.

Seperti yang diungkapkan dalam Sugiyanto (2011:228), tingginya pendapatan perkapita di Kabupaten Cilacap ini lebih disebabkan oleh sumbangsih perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana. Dan berdirinya perusahaan-perusahaan besar yang ada, memberikan pula andil yang besar bagi Kabupaten Cilacap, selain peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi

tetapi juga mendorong Kabupaten Cilacap ke dalam kategori 19 kota-kota besar yang cepat tumbuh diwilayah Indonesia (Bappenas, 2004-2009).

Namun demikian pesatnya perekonomian di Kabupaten Cilacap disertai pula pelaksanaan pembangunan yang timpang. Melalui hasil studi oleh Budi Handayani (2005), bahwa selain kondisi geografis dari masing-masing sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap yang beragam, pelaksanaan pembangunan justru banyak dipusatkan di pusat kota. Dan pada akhirnya kebijakan pusat wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pelaksanaannya tidak efektif. Di mana pusat subwilayah pembangunan merupakan salah satu konsep dalam perencanaan wilayah yang digunakan untuk menyebarluaskan kemakmuran dari pusat wilayah ke pinggirannya sehingga wilayah di sekitarnya terpacu untuk berkembang.

Sedangkan adanya perusahan-perusahaan besar di Kabupaten Cilacap peran perusahaan kurang berimbang bagi kesejahteraan masyarakat disekitarnya, terutama penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian oleh Ani Kurniati (2007), menyebutkan bahwa adanya industrialisasi khususnya di Kota Cilacap telah mendorong penanaman investasi, namun juga menarik minat tenaga kerja dari daerah lain. Sekitar kurang lebih 70 persen tenaga kerja yang terserap oleh adanya industrialisasi berasal dari luar daerah. Migrasi tenaga kerja yang berasal dari daerah lain di Jawa Tengah mencapai 54.4 persen sedangkan 45.6 persen berasal dari luar Jawa Tengah.

Bentuk ketimpangan pembangunan lainnya juga terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung Prapsetyo (2012), dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cilacap dengan kondisi ancaman atau buruk. Walaupun mendapat perhatian pemerintah, namun tidak semua daerah mengalami peningkatan kualitas maupun kuantitas pembangunan infrastruktur yang sama.

Adanya perbedaan potensi dan kondisi geografis sebagai penyebab dalam ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Cilacap, kondisi demografi juga terlihat mengalami ketimpangan. Seperti ketimpangan yang terjadi dalam kualitas tingkat pendidikan masyarakatnya. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya (Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap, 2013:30). Pendidikan juga merupakan investasi yang dibutuhkan sebagai modal manusia untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

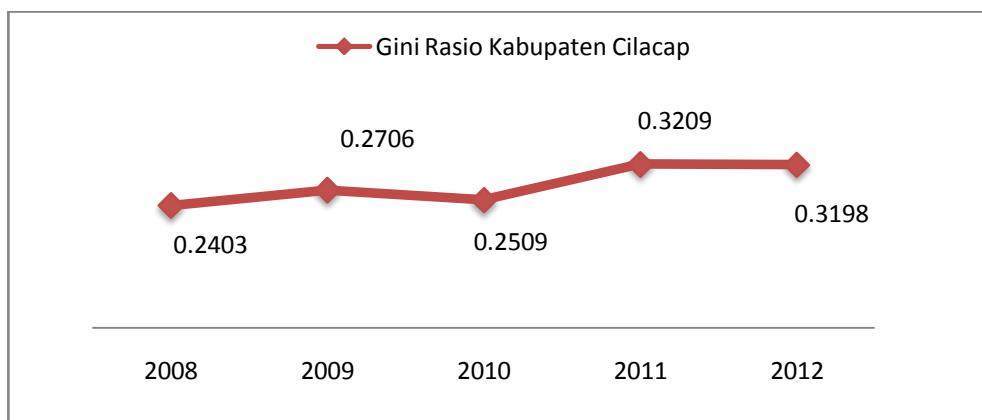
**Tabel 2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cilacap Tahun 2012**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk dengan Lulusan	Jumlah Penduduk Masih Sekolah	Jumlah Penduduk Keseluruhan
Belum/Tidak Pernah Sekolah	-	-	139.371
Belum/Tidak Tamat SD/TK	336.416	15.582	351.998
SD Sederajat	415.792	204.603	620.395
SLTP Sederajat	174.669	90.269	264.938
SLTA Sederajat	126.041	52.114	178.155
Akademi/PT	39.354	5.689	45.043

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 2, menunjukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Cilacap masih terbilang rendah. Dilihat dari jumlah penduduk dengan lulusan SD lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk lulusan SLTP, SLTA dan PT.

Meskipun tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Cilacap masih terbilang rendah tetapi persebaran atau tingkat distribusi pendapatannya sudah terlihat adanya pemerataan, seperti yang terlihat dari Gini Rasio untuk Kabupaten Cilacap tahun 2008-2012.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2013

**Gambar 3. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012.**

Berdasarkan Gambar 4, terkait perkembangan Gini Rasio Kabupaten Cilacap tahun 2008-2012, menunjukan adanya peningkatan dalam ketimpangan pendapatan masyarakat. Ketimpangan tertinggi diperoleh pada tahun 2011 sebesar 0,3209, meskipun peningkatan tersebut masih dikategorikan level rendah.

Lain halnya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Meski distribusi pendapatan masyarakat tidak terlalu timpang namun

tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap terbilang masih tinggi.

**Tabel 3. Data Keluarga Menurut Pentahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Cilacap Tahun 2012**

	Jumlah Keluarga	Persentase (%)
Keluarga Pra Sejahtera (Dikelompokan sebagai “Sangat Miskin”)	134.970	26,94
Keluarga Sejahtera Tahap I Dikelompokan sebagai “Miskin”)	119.789	23,91
Keluarga Sejahtera Tahap II	131.090	26,16
Keluarga Sejahtera Tahap III	93.787	18,72
Keluarga Sejahtera Tahap III Plus	21.408	4,27

Sumber:BPS Kabupaten Cilacap 2013

Berdasarkan Tabel 3, menunjukan masih tingginya tingkat keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap I, yang tergolong keluarga sangat miskin dan miskin yaitu sebesar 26,94 % dan 23,91 %. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hampir sebagian keluarga di Kabupaten Cilacap masih tergolong miskin.

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, Kabupaten Cilacap memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik, namun disertai dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat. Oleh karena itu menarik untuk diketahui bagaimana kondisi sebenarnya pembangunan yang ada di tiap kecamatan. Maka penelitian ini berjudul “ANALISIS KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2004-2013”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah yang berkaitan dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan kondisi umum yang terjadi sebagai akibat adanya pembangunan, namun sampai sejauh mana ketimpangan pada akhirnya menimbulkan dampak negatif.
2. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Cilacap terbilang pesat, namun kebijakan pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap tidak berjalan secara efektif.
3. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Cilacap masih terbilang rendah, dimana penduduk dengan lulusan SD masih lebih banyak dibandingkan penduduk lulusan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.
4. Tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Cilacap masih didominasi oleh keluarga miskin, meskipun persebaran pendapatan masyarakat terbilang merata.
5. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan berdampak terhadap kesejahteraan.

## C. Batasan Masalah

Masalah ketimpangan pembangunan berwujud dan berlangsung dalam berbagai bentuk, aspek atau dimensi. Sehingga dalam melakukan penelitian dibutuhkan batasan agar tidak terlalu luas. Dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah dengan adanya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Cilacap dan beberapa literatur penelitian yang mendukung yang pernah

dilakukan di Kabupaten Cilacap. Penelitian ketimpangan pembangunan ini terbatas menggunakan beberapa indikator pembangunan di bidang ekonomi (struktur pertumbuhan ekonomi) dan bidang sosial (pendidikan, kesejahteraan, dan pertumbuhan penduduk).

Data yang digunakan adalah data tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, penelitian ini menggunakan data 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.

#### **D. Rumusan Masalah**

Ketidaksetaraan anugerah awal di Kabupaten Cilacap memang sudah menunjukan adanya ketimpangan secara sektoral. Selanjutnya program pembangunanpun mengalami ketidakmerataan dan telah berakibat pada kesenjangan pembangunan di tiap kecamatan. Dimana, program-program pembangunan lebih dikerahkan dipusat kota kabupaten.

Terjadinya kesenjangan program pembangunan seperti halnya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur, telah berdampak pada kemakmuran di tiap kecamatan. Dan pada akhirnya wilayah yang kurang mendapatkan perhatian pembangunan berkeinginan melakukan pemisahan diri atau pemekaran daerah.

Dari adanya permasalahan di atas, ketimpangan bukan hanya sebagai kondisi umum yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Namun ketimpangan juga terbentuk karena direncana ataupun disengaja dan juga sebagai akibat dari suatu kondisi yang memang susah untuk dirubah. Untuk itu lah, mengapa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten

Cilacap penting untuk dianalisis. Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, penelitian ini fokus terhadap:

1. Bagaimana perkembangan dan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi tiap kecamatan pada periode 2004-2013?
2. Bagaimana pengaruh komponen pertumbuhan *regional share* terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi?
3. Bagaimana pengaruh komponen pertumbuhan *proporsional shift* terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi?
4. Bagaimana pengaruh komponen pertumbuhan *competitive shift* terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi?
5. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi?
6. Bagaimana pengaruh jumlah keluarga miskin terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi?
7. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perkembangan kemajuan perekonomian tiap kecamatan pada periode 2004-2013.

2. Mengetahui pengaruh komponen pertumbuhan *regional share* terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.
3. Mengetahui pengaruh komponen pertumbuhan *proporsional shift* terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.
4. Mengetahui pengaruh komponen pertumbuhan *competitive shift* terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.
5. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.
6. Mengetahui pengaruh jumlah keluarga miskin terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.
7. Mengetahui pengaruh pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang mementingkan ketimpangan pembangunan antarwilayah disamping pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Tambahan referensi dalam penelitian lanjutan yang disesuaikan dengan bidangnya.
3. Tambahan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi (Rahmat, 2013:1). Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income per-kapita*) dalam jangka panjang (Subandi, 2011:9). Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier dikutip dalam Kuncoro, 2006:5).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan. Berdasarkan Jhingan (2012:338), salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta.

Dan tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dibidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri (Jhingan, 2012:338). Selain itu modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya.

Untuk dapat meningkatkan kemajuan perekonomian, suatu negara harus memenuhi persyaratan dasar dalam melakukan pembangunan. Berdasar M.L Jhingan (2012:41), prasyarat-prasyarat dasar bagi pembangunan ekonomi diantaranya:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari warga negara itu sendiri,
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan, sehingga diperlukan perbaikan dan penggantian lembaga sosio-ekonomi.
3. Perubahan struktural, adanya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri moderen, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal.
4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis didalam proses pembangunan. Namun penyediaan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia kalau tidak ada faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
5. Kriteria investasi yang tepat, merupakan tanggungjawab negara untuk

menguntungkan masyarakat, harus dikaji dengan mempertimbangkan keseluruhan kompleks dinamika perekonomian.

6. Persyaratan sosio budaya, wawasan sosio budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat berjalan. Kenaikan pendapatan nasional tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan sosial, jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian budaya.
7. Administrasi, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup, merupakan *sine qua non* pembangunan ekonomi. Tanpa alat perlengkapan administratif yang baik dan efisien, rencana pembangunan publik maupun privat tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna.

## B. Pembangunan Daerah

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Telah membawa perubahan dalam sistem pembangunan, dimana pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih dalam mengatur daerahnya masing-masing. Berdasarkan Sjafrizal (2014:14), perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok yaitu pertama, pemerintah daerah diberikan

kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). Kedua, pemerintah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal).

Pemberian wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar proses pembangunan disesuaikan dengan permasalahan pokok yang dialami. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah bersangutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal (Arsyad, 1999:108). Sedangkan keberhasilan pembangunan daerah, selain sebagai bentuk andil dalam pembangunan nasional, tetapi juga ditujukan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Upaya pembangunan yang dilakukan daerah dapat berupa kemakmuran wilayah, kemakmuran masyarakatnya maupun kedua-duanya. Seperti yang dijelaskan dalam Sjafrizal (2012), pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran wilayah (*place prosperity*), ditujukan agar kondisi fisik daerah lebih baik. Seperti halnya, sarana dan prasarana, perumahan dan lingkungan pemukiman, kegiatan ekonomi masyarakat, fasilitas pelayanan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan hidup, dll. Meningkatkan kemakmuran wilayah dapat mendorong pesat peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, hal tersebut disebabkan karena kondisi daerah yang sudah baik dapat menjadi daya tarik bagi para investor dalam menanamkan modalnya.

Sedangkan pembangunan yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat (*people prosperity*), pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti halnya, pengembangan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kegiatan produksi masyarakat dalam bentuk pengembangan. Pembangunan kemakmuran masyarakat, biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan lapangan kerja umumnya mengalami pertumbuhan yang lambat.

### C. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Aspek ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan, karena masalah utama pada negara-negara sedang berkembang adalah pengangguran (*unemployment*) dan kemiskinan (*poverty*) yang merupakan pertanda umum dari keterbelakangan ekonomi. Seperti proses pembangunan pada tingkatan nasional maupun daerah di Indonesia yang masih memandang bahwa pertumbuhan ekonomi masih merupakan unsur penting dalam proses pembangunan. Hingga sampai saat ini, pertumbuhan ekonomi merupakan target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional maupun daerah disamping pembangunan fisik dan sosial.

Pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah lebih banyak bersifat lintas sektoral dengan memanfaatkan unsur tata ruang dan

keuntungan lokasi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2014:13). Adanya ketidaksetaraan anugerah awal diantara pelaku-pelaku ekonomi, membuat pemanfaatan unsur tata ruang dan keuntungan lokasi di masing-masing daerah tidaklah menghasilkan pertumbuhan yang sama. Sedangkan kemampuan daerah untuk tumbuh dibutuhkan berbagai unsur yang saling terkait dan mempengaruhi. Berikut adalah beberapa sumber penting agar pertumbuhan ekonomi dapat terwujud (Sadono Sukirno, 2009), yaitu:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu kewaktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan bertambah tinggi.

### 3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Apabila barang-barang modal saja bertambah sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Oleh karena itu pendapatan perkapita hanya mengalami perkembangan yang sangat kecil.

Kemajuan ekonomi yang berlaku diberbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Efek yang utama adalah:

- a. Kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi sesuatu barang. Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan meninggikan jumlah produksi.
- b. Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksikan sebelumnya. Kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat.

- c. Kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksikan tanpa meningkatkan harga.
4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang, ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya merupakan peningkatan kemampuan produksi pada daerah tersebut. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal (Sukirno, 2009:423). Sedangkan menurut Prof. Simon Kuznet (dikutip dalam Jhingan 2012:57), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai

dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang dilakukan.

Setiap upaya pembangunan yang dilakukan sering kali tidak menghasilkan pertumbuhan yang sudah ditargetkan. Berbagai faktor penentu pertumbuhan perlu diketahui secara rinci berikut sifat-sifatnya. Sebegitu jauh, pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi dan model-modelnya seringkali dalam praktiknya tidak dapat dilakukan secara utuh. Namun terdapat beberapa model yang dapat menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi daerah dan faktor-faktornya meski memiliki asumsi yang berbeda-beda, diantaranya:

1. Teori Pertumbuhan *Regional Base*

Teori ini diperkenalkan oleh Douglas C.North tahun 1956 (dikutip dalam Sjafrizal, 2008), teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada dasarnya ditentukan oleh besarnya keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan. Teori base ekspor mengandalkan pada kekuatan permintaan eksternal (*outward looking*). Wilayah dengan tingkat permintaan tinggi akan menarik investasi dan tenaga kerja. Dan apabila suatu wilayah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk kegiatan ekpor, maka pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan akan meningkat cepat.

Kegiatan ekspor akan mempengaruhi keterkaitan ekonomi ke belakang (kegiatan produksi) dan kedepan sektor pelayanan (*service*). Dengan kata lain kegiatan ekspor secara langsung meningkatkan pendapatan faktor-faktor produksi dan pendapatan wilayah. Syarat utama bagi pengembangan teori ini adalah sistem wilayah terbuka, ada aliran barang, modal, teknologi antar wilayah, dan kerjasama dengan negara lain.

## 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori ini dipelopori oleh George H.Bort tahun 1960 (dikutip dalam Sjafrizal 2008:95), menurut teori ini pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah ditentukan oleh potensi daerah bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antardaerah.

Dalam Model Neo-Klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar. Apabila proses pembangunan terus berlanjut, dan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar.

### 3. Teori Pertumbuhan *Cumulative Causation*

Teori ini merupakan kritik terhadap teori Neo-Klasik Berdasarkan teori ini ketimpangan pembangunan regional dapat dikurangi melalui program pemerintah. Sedangkan bila ketimpangan regional diserahkan pada mekanisme pasar, justru ketimpangan akan meningkat seiring proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan produktivitas terjadi apabila terdapat peningkatan kegiatan ekonomi pada daerah bersangkutan, demikian pula apabila kegiatan ekonomi daerah menurun produktivitas pun ikut menurun. Hubungan tersebut terbentuk karena dilandasi adanya keuntungan aglomerasi dan *Increasing Return to scale* (kenaikan output) yang akan semakin besar bila terdapat peningkatan kegiatan produksi di daerah.

### 4. Teori Lokasi

Teori ini dipelopori oleh Christaller tahun 1933 (dikutip dalam Tarigan, 2005:162-163). Teori ini lebih terkenal sebagai teori pertumbuhan perkotaan, dimana pertumbuhan kota tergantung spesialisasinya dalam fungsi pelayanan perkotaan, dan tingkat permintaan terhadap pelayanan perkotaan oleh daerah sekitarnya akan menentukan kecepatan pertumbuhan kota (tempat pemasaran). Terdapat empat faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan yaitu:

- a. faktor lokasi ekonomi, b. faktor ketersediaan sumberdaya, c. kekuatan aglomerasi dan d. faktor investasi pemerintah.

Konsep pusat pertumbuhan dapat dijelaskan dengan dua cara yaitu konsep pusat pertumbuhan secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional bahwa pusat pertumbuhan dijelaskan sebagai suatu lokasi kosentrasi kelompok usaha maupun cabang industri yang sifatnya memiliki unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya). Sedangkan secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk melakukan kegiatan ekonomi di tempat tersebut dan masyarakat senang datang untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dikota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha.

##### 5. Teori Pertumbuhan Desa dan Kota

Teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh adanya sinergi yang kuat antara kegiatan ekonomi daerah pedesaan dengan kegiatan daerah perkotaan. Sinergi pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan akan terwujud apabila terdapat keterkaitan dan biasanya dapat dikembangkan melalui hubungan input (*backward linkages*) dan hubungan output (*forward linkages*) antara kegiatan terkait. Dengan adanya keterkaitan ini, akan dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi daerah sehingga daya saing produknya akan dapat ditingkatkan pula. Peningkatan efisiensi dan daya saing produksi ini yang merupakan kekuatan utama

yang dapat medorong proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada daerah yang besangkutan. Sehingga mendorong pula terwujudnya Efek Rembesan (*Tricklingdown Effect*). Melalui proses ini pemerataan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan bisa diperbaiki sehingga kemakmuran masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah bisa menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan agar perhitungan tidak terpengaruh oleh perubahan harga (*inflasi*). Sedangkan untuk menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi menurut faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat teknik analisis untuk mengetahuinya. Salah satu teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode *Shift Share*. Dan formulasi matematikanya menggunakan model dari Jhon P. Blair tahun 1991 (dikutip dalam Sjafrizal 2014: 189), yaitu sebagai berikut:

$$\Delta y_i = [y_i(Y^t/Y^0 - 1)] + [y_i(Y_i^t/Y_i^0) - (Y^t/Y^0)] + [y_i(y_i/Y_i^0) - (Y_i^t/Y_i^0)]$$

Dimana:

$\Delta y_i$  = perubahan nilai tambah sektor i

$y_i^0$  = nilai tambah sektor i di kecamatan pada awal periode

$y_i^t$  = nilai tambah sektor i di kecamatan pada akhir periode

$Y^0$  = output kabupaten pada awal periode

$Y^t$  = output kabupaten pada akhir periode

$Y_i^0$  = nilai tambah sektor i di kabupaten pada awal periode

$Y_i^t$  = nilai tambah sektor i di kabupaten pada akhir periode

Dari persamaan analisis *shift share* peningkatan nilai tambah suatu daerah terbagi dalam tiga bagian yaitu:

- a. *Regional share*:  $[y_i (Y^t/Y^0 - 1)]$ , merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh dorongan faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah, atau karena dorongan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga.
- b. *Proportional shift (Mixed Shift)*:  $[y_i (Y_{it}/Y_{i0} - (Y_t/Y_0))]$ , merupakan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di tingkat propinsi atau tingkat nasional. Komponen pertumbuhan ekonomi dari dalam daerah itu sendiri yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang relatif baik, yaitu berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara nasional pertumbuhannya cepat seperti sektor industri.
- c. *Differential Shift (Competitive Shift)*  $[y_i (y_i / y_{i0} - (Y_{it}/Y_{i0}))]$  adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif atau seberapa jauh daya saing industri daerah dengan industri propinsi atau nasional. Unsur pertumbuhan inilah yang merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan eksport daerah bersangkutan.

Melalui metode *shift share* dapat diketahui komponen atau unsur pertumbuhan ekonomi mana yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah bersangkutan. Jumlah masing-masing komponen dapat negatif dan positif. Apabila komponen pertumbuhan *regional share* bernilai positif menunjukkan bahwa kontribusi dan peranan pemerintah daerah dan kegiatan ekonomi daerah tetangga cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk komponen *proporsional shift* apabila benilai positif menunjukkan bahwa sektor-sektor yang dikembangkan dalam kegiatan ekonomomi kecamatan cukup unggul dan tumbuh cepat di daerah. dan komponen pertumbuhan *competitive shift* apabila bernilai positif menunjukkan bahwa terdapat sumbangan potensi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Begitu pula sebalinya apabila komponen pertumbuhan bernilai negatif. Jumlah keseluruhan komponen pertumbuhan akan positif bila pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan juga positif.

#### **D. Disparitas Pembangunan**

Bagi negara berkembang, terjadinya ketimpangan pembangunan regional sudah menjadi fenomena umum. Ketimpangan muncul seiring dengan proses pembangunan. Berdasarkan hipotesis Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan disuatu negara pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur ketimpangan pembangunan antarwilayah akan menurun.

Ketimpangan dan pertumbuhan sering kali menjadi perdebatan antara mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan disatu pihak melawan

pengutamakan efektivitas dan kemerataan dipihak lain (Dumairy, 1999:55).

Pembangunan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata apabila pertumbuhan tersebut dihasilkan oleh banyak orang. Seperti yang dijelaskan dalam Todaro dan Smith (2011:251), pembangunan mengharuskan adanya tingkat GNI yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan, apabila peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dilakukan oleh segelintir orang kaya maka peningkatan hasil kemungkinan besar menguntungkan mereka, kemajuan upaya menangulangi kemiskinan akan bergerak lamban dan ketimpangan akan memburuk. Sedangkan pertumbuhan yang dihasilkan oleh orang banyak, maka mereka pulalah yang akan memperoleh manfaat besarnya dan hasil pertumbuhan ekonomi akan terbagi lebih merata. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak mencerminkan adanya ungkapan si kaya bertambah kaya dan si miskin bertambah miskin.

Ketimpangan bisa berupa gambaran antara si kaya dengan si miskin karena ketidakmerataan sesungguhnya tak terlepas dari masalah kemiskinan. Seperti yang disebutkan dalam Dumairy (1996:66), bahwa pemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran, pengurangan ketimpangan atau kesenjangan sama pentingnya dengan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, apabila ketimpangan yang terjadi begitu tinggi, pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan apabila ketimpangan pendapatan yang tinggi terjadi, yaitu: 1) terjadinya inefisiensi ekonomi terutama pada ketiadaan kolateral, 2) menyebabkan

alokasi aset yang tidak efisien, dan 3) melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas (Todaro dan Smith, 2006:248).

Ketimpangan juga terjadi antara daerah yang cepat tumbuh dengan daerah yang tertinggal. Ketimpangan antardaerah terlihat dari adanya ketimpangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan perkapita. Seperti yang terdapat dalam Sjafrizal (2012), untuk dapat mengetahui daerah yang cepat tumbuh dan daerah yang tertinggal dapat digunakan matrik Tipologi Klassen dengan menggunakan dua indikator yaitu laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita. Kemudian menghasilkan pengelompokan daerah menurut struktur pertumbuhan ekonomi dan tingkat pembangunan. Terdapat empat kelompok daerah berdasarkan matrik Tipologi Klassen yaitu:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding rata-rata kecamatan di kabupaten i.
2. Daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di kabupaten i.
3. Daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata dan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata kecamatan di kabupaten i.

- Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di kabupaten i.

Berikut adalah tabel pengelompokan daerah berdasarkan Tipologi Klassen.

**Tabel 4. Pengelompokan Ekonomi Daerah Berdasarkan Tipologi Daerah.**

Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita	Laju pertumbuhan di atas rata-rata.	Laju pertumbuhan di bawah rata-rata
Pendapatan perkapita di atas rata-rata	Daerah Maju	Daerah Maju tapi tertekan
Pendapatan perkapita di bawah rata-rata	Daerah Berkembang	Daerah Tertinggal

Ketimpangan antara daerah yang cepat maju dan relatif tertinggal dibuktikan melalui sebuah fakta bahwa di Asia Timur dengan tingkat ketimpangan yang rendah telah tumbuh dengan cepat, sedangkan di Amerika Latin serta Afrika dengan tingkat ketimpangan yang tinggi tumbuh dengan sangat lamban (Todaro dan Smith, 2011).

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah disebabkan oleh beragamnya faktor yang mempengaruhi. Seperti yang terdapat dalam Sjafrizal (2012: 117), penyebab ketimpangan ekonomi antarwilayah diantaranya:

- Perbedaan kandungan sumber daya alam.

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangutan. Daerah dengan kandungan

sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat dan begitu pula sebaliknya.

## 2. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

## 3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah atau migrasi spontan. Dengan adanya mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual kedaerah lain yang membutuhkan. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

#### 4. Kosentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana kosentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

#### 5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi daerah dengan alokasi investasi yang lebih besar baik dari pemerintah maupun swasta, akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Namun disisi lain, ketimpangan memang sesuatu yang direncanakan dan disengaja. Seperti cita-cita nasional dan kehendak para perencana pembangunan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Sehingga sektor industri pengolahan harus tumbuh lebih cepat dari pada sektor-sektor lain (Dumairy,1996:63).

Bentuk-bentuk ketimpangan pada dasarnya berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek ataupun dimensi. Selain itu, ketimpangan dapat dibedakan menjadi ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal serta ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial (Dewi Yunistri, 2012).

Ketimpangan vertikal terjadi antar individu seperti ketimpangan pendapatan, konsumsi, dan kekayaan. Ketimpangan horizontal adalah ketimpangan yang terjadi dari perbandingan kelompok masyarakat

berdasarkan suku, ras, agama, gender. Sedangkan ketimpangan ekonomi merupakan ketimpangan yang terjadi antar daerah, yakni daerah yang maju secara ekonomi dan yang tertinggal, dimana terjadinya ketimpangan pembangunan, umumnya akan terjadi pula ketimpangan dalam pendapatan. Dan ketimpangan sosial adalah perbedaan yang terjadi seperti tingkat pendidikan dan kesehatan yang merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia. Ketimpangan yang terjadi pada initinya saling menguatkan dalam suatu proses sebab akibat yang begitu rumit dan terkait satu sama lain, sehingga antara ketimpangan ekonomi maupun non ekonomi sebenarnya tidak dapat dipisahkan perbedaannya.

Adapun indikator ekonomi ketidakmerataan wilayah menurut Lay (1993) dalam Harefa, yaitu tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi dan ketersediaan sarana prasarana. Dari pernyataan tersebut dapat dibedakan masing-masing indikator ketidakmerataan menjadi:

Fisik : ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan dan sarana perekonomian.

Ekonomi : kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan keluarga pada masing-masing kecamatan

Sosial : jumlah penduduk dan kualitas penduduk berdasarkan pendidikan.

## **E. Ukuran Ketimpangan Pembangunan**

Untuk mengukur adanya disparitas atau ketimpangan, perlu dibedakan terlebih dahulu antara mengukur ketimpangan dalam pembagian atau distribusi pendapatan dengan mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah. Secara umum untuk mengetahui besarnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan digunakan alat ukur seperti Gini Ratio, Kurva Lorenz dan alat ukur berdasarkan kriteria Bank Dunia. Sedangkan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah digunakan alat ukur seperti Williamson Index dan Theil Index.

### **1. Gini Rasio**

Gini Rasio atau Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendapatan. Nilai koefisien Gini berkisar antara nol (pemertaan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi (BPS:2013).

Adapun kriteria pengukurannya sebagai berikut:

- a. Ketimpangan taraf rendah, apabila koefisien Gini  $<0,35$
- b. Ketimpangan taraf sedang, bila koefisien Gini antara  $0,35 - 0,5$
- c. Ketimpangan taraf tinggi, bila koefisien Gini  $> 0,5$

Sedangkan untuk mengitung besarnya koefisien Gini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

Dimana:

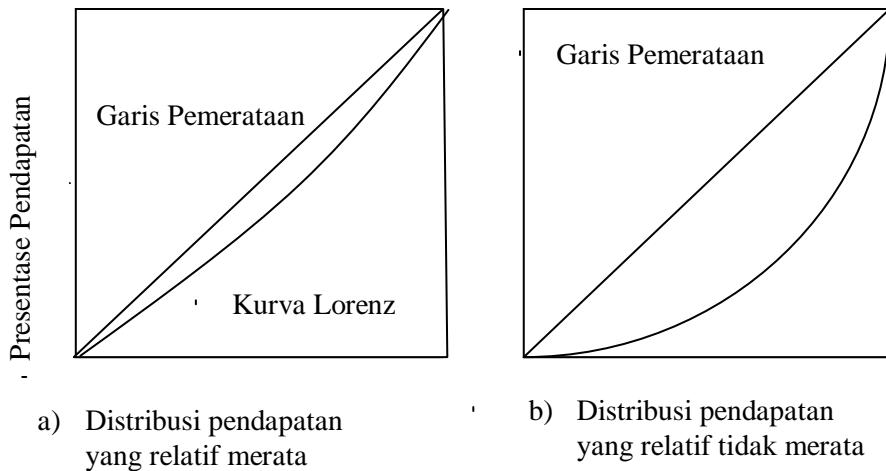
$P_i$  = Presentase rumahtangga atau penduduk pada wilayah i

$Q_i$  = Presentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran wilayah i

## 2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan salah satu metode untuk menganalisis pendapatan perorangan. Dimana jumlah penerimaan pendapatan dinyatakan dalam sumbu horizontal dalam presentase kumulatif. Sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari pendapatan total yang diterima oleh masing-masing presentase klompok penduduk.

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara presentase penerima pendapatan dengan presentase pendapatan total yang benar-benar diterima masyarakat selama satu tahunnya. Kurva Lorenz menggunakan data desil sehingga populasi terbagi menjadi sepuluh kelompok. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna) semakin timpang distribusi pendapatannya.

**Gambar 4. Kurva Lorenz****3. Kriteria Bank Dunia**

Pengukuran disparitas menggunakan kriteria Bank Dunia dilakukan dengan membagi penduduk dalam 3 kelompok yaitu:

- 20 % penduduk berpendapatan tinggi
- 40% penduduk berpendapatan sedang
- 40% penduduk berpendapatan rendah

Sedangkan formula perhitungan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

$$YD = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$$

Dimana:

$YD_4$  = Presentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk lapisan bawah

$Q_{i-1}$  = Presentase kumulatif pendapatan ke  $i-1$

$P_i$  = Presentase kumulatif penduduk ke  $i$

$q_i$  = Presentase pendapatan ke  $i$

#### 4. Index Williamson

Index ini yang sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim untuk mengukur perbedaan. Indeks ini memiliki beberapa kelemahan yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan.

Dan untuk formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{y}}$$

Dimana:

Untuk kabupaten/kota

$y_i$  = PDRB perkapa di kecamatan i

$\bar{y}$  = PDRB perkapa rata-rata kabupaten/kota

$f_i$  = Jumlah penduduk kecamatan i

$n$  = jumlah penduduk di kabupaten/kota

Untuk provinsi:

$y_i$  = PDRB perkapa di kabupaten/kota i

$\bar{y}$  = PDRB perkapa rata-rata provinsi

$f_i$  = Jumlah penduduk di kabupaten/kota i

$n$  = jumlah penduduk diprovinsi

#### 5. Indeks Entropi Theil

Penggunaan Indeks Theil lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kelebihan dalam menggunakan indeks ini, pertama indeks ini menghitung ketimpangan

dalam daerah dan antar daerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Kedua, dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

Dengan formulasi Indeks Theilnya yaitu:

$$I_{Intra} = \sum (y_i/Y) \cdot \log [y_i/Y] / [n_i/N]$$

Dimana:

$I_{Intra}$  = Indeks Entropi Theil *intra region*

$y_i$  = PDRB perkapita di kecamatan i

$Y$  = PDRB perkapita Kabupaten

$n_i$  = jumlah penduduk wilayah i

$N$  = jumlah penduduk kabupaten

$$I_{inter} = \sum Y_j \cdot \log (\frac{Y_j}{X_j})$$

Dimana:

$I_{Inter}$  = Indeks Entropi Theil *inter region*

$Y_j$  = rata-rata PDRB perkapita kabupaten j

$X_j$  = jumlah penduduk kabupaten j

$$\text{Indek Theil} = I_{Intra} + I_{Inter}$$

## **F. Hubungan Pendidikan dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Kata kunci pembangunan adalah pembentukan modal. Sedangkan modal yang dibutuhkan selain modal fisik tetapi juga modal manusia. Modal manusia yang berkualitaslah yang nantinya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa pendidikan memberi kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia berkualitas, penguasaan, pengembangan sains dan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi (Mohammad Ali,2009).

Semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai jenjang SMA dan perguruan tinggi menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007, menyebutkan bahwa taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan antara lain diukur dari meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP atau MTs ke atas, meningkatnya rata-rata lama sekolah, dan meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia.

Terbukti dari penelitian yang telah dilakukan oleh Dawon Holland (2013) terkait hubungan antar lulusan perguruan tinggi dan pertumbuhan ekonomi antar negara. Hasil studi menunjukkan bahwa kenaikan 1 % dalam pangsa tenaga kerja dengan pendidikan universitas telah menaikkan tingkat

produktivitas 0,2-0,5 persen dalam jangka panjang. Dimana produktivitas merupakan syarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Basuki Rahmat (2013) menunjukkan bahwa perkembangan jumlah siswa tamat SMA tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Kenaikan jumlah siswa tamat SMA sebesar 1% akan menyebabkan penuruan ketimpangan wilayah sebesar 0,005% sebelum adanya pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal. Sedangkan setelah adanya kebijakan desentralisasi fiskal, peningkatan jumlah siswa tamat SMA yang naik sebesar 1% justru mengakibatkan kenaikan ketimpangan wilayah sebesar 0,007%.

## **G. Hubungan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan maupun kemakmuran) masyarakat. Untuk dapat mengkategorikan kesejahteraan masyarakat, setiap individu memiliki kategori tersendiri untuk bisa dikatakan sejahtera. Seperti hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengelompokan tingkatan kesejahteraan keluarga menjadi 5 kategori yaitu: 1. Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin), 2. Keluarga Sejahtera Tahap I (Miskin), 3. Keluarga Sejahtera Tahap II, 4. Keluarga Sejahtera Tahap III, 5. Keluarga Sejahtera III Plus. Dari setiap kategori tingkat kesejahteraan keluarga memiliki indikator tersendiri, seperti:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Keluarga Sangat Miskin).

Dikatakan keluarga Pra Sejahtera apabila belum dapat memenuhi satu atau lebih indikator yang meliputi:

Indikator Ekonomi : :

- a. makan dua kali atau lebih dalam satu hari,
- b. memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian.

Indikator Non Ekonomi : :

- a. melaksanakan Ibadah,
- b. apabila anak sakit dibawa kerumah sakit.

2. Keluarga Sejahtera Tahap I (Keluarga Miskin).

Dikatakan keluarga Sejahtera tahap I apabila belum dapat memenuhi satu atau lebih indikator yang meliputi:

Indikator Ekonomi : :

- a. paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telor,
- b. setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- c. luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap penghuni.

Indikator non Ekonomi :

- a. ibadah teratur,
- b. sehat tiga bulan terakhir,
- c. punya penghasilan tetap,

- d. usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf,
- e. usia 6-15 tahun bersekolah,
- f. anak lebih dari 2 atau ber KB.

### 3. Keluarga Sejahtera Tahap II

Dikatakan keluarga Sejahtera tahap II apabila belum dapat memenuhi satu atau lebih indikator yang meliputi:

- a. memiliki tabungan keluarga, makanan bersama sambil berkomunikasi,
- b. mengikuti kegiatan masyarakat,
- c. rekreasi bersama 6 bulan sekali,
- d. meningkatkan pengetahuan agama,
- e. memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- f. menggunakan sarana transportasi.

### 4. Keluarga Sejahtera Tahap III

Dikatakan keluarga Sejahtera tahap III apabila dapat memenuhi indikator yang meliputi:

- a. memiliki tabungan keluarga,
- b. makanan bersama sambil berkomunikasi,
- c. mengikuti kegiatan masyarakat,
- d. rekreasi bersama 6 bulan sekali,
- e. meningkatkan pengetahuan agama,
- f. memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, maupun majalah
- g. menggunakan sarana transportasi.

Belum dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi:

- a. aktif memberikan sumbangan material secara teratur,
- b. aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

#### 5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Dikatakan keluarga Sejahtera tahap III plus apabila dapat memenuhi indikator yang meliputi:

- a. aktif memberikan sumbangan material secara teratur,
- b. aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

Kesejahteraan merupakan kondisi tidak miskin yang menjadi keinginan setiap orang. Dan permasalahan utama dalam negara berkembang selain masalah pengangguran tetapi juga masalah kemiskinan. Seperti konsep lingkaran setan kemiskinan, dimana setiap aspek mampu saling mempengaruhi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga kondisi kemiskinan yang semakin meningkat dalam suatu daerah, dapat berpengaruh pula terhadap tingkat pembangunan daerah tersebut.

### **H. Hubungan Kependudukan dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Faktor kependudukan menjadi bagian yang penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah, baik itu ditinjau dari kondisi kependudukannya maupun dalam perkembangannya. Sehingga memungkinkan apabila kondisi kependudukan yang berbeda di masing-masing daerah akan menghasilkan perbedaan pula pada kondisi pembangunan

daerah bersangkutan. Seperti halnya jumlah penduduk, jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang terdapat di dalam suatu daerah. Besarnya jumlah penduduk suatu daerah dapat mempengaruhi pembangunan daerah itu sendiri. Disatu sisi besarnya jumlah penduduk suatu daerah dapat menghambat pembangunan, karena berkaitan dengan kualitas yang dimiliki oleh penduduk seperti tingkat pendidikan, kesehatan maupun pendapatan yang dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah. Sedangkan di sisi lain, jumlah penduduk suatu daerah dapat mendorong proses pembangunan, karena semakin meningkat jumlah penduduk semakin meningkat pula kebutuhan akan papan, pangan dan sandang, kemudian dapat dijadikan peluang bagi para produsen dalam meningkatkan pangsa pasarnya.

Sedangkan yang terdapat dalam Herry Darwanto, selain jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk pun merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi, yang mampu menyebabkan suatu wilayah berubah cepat dari desa pertanian menjadi agropolitan selanjutnya menjadi kota besar. Dan pertumbuhan penduduk merupakan akibat proses pertumbuhan alami (kelahiran dan kematian) maupun urbanisasi. Pertumbuhan alami penduduk menjadi faktor utama yang berpengaruh pada ekonomi wilayah karena menciptakan kebutuhan akan berbagai barang dan jasa.

## **I. Hubungan Pola Perekonomian Daerah dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak serta merta dipandang sebagai kenaikan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan

adanya pertumbuhan penduduk serta perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural) (Arsyad, 1999).

Setelah adanya otonomi, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat ditentukan oleh adanya keuntungan lokasi pada daerah tersebut. Seperti yang dapat dijelaskan dalam teori basis ekspor, bahwa suatu daerah tidak harus menjadi daerah industri untuk dapat tumbuh dengan cepat, sebab faktor penentu pertumbuhan adalah keuntungan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Dan apabila pemanfaatan keuntungan komparatif yang dimiliki menjadi kekuatan basis ekspor maka pertumbuhan ekonomi dapat dimaksimalkan.

Sedangkan berdasarkan teori Neo Klasik, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Pertumbuhan ekonomi wilayah selain ditentukan oleh potensi daerah, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Namun modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkosentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar.

#### **J. Penelitian yang Relevan**

Penelitian Herwin Mopangga (2011) menyatakan bahwa kontribusi sektor primer yang tinggi terhadap PDRB, tidak menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang proporsional. Namun adanya pembangunan telah menciptakan transformasi struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2001-2008. Meskipun proporsi dan laju pertumbuhan yang dianalisis dengan

jumlah penduduk menunjukan adanya ketimpangan pada PDRB perkapita. Hasil penggunaan regresi, menunjukan pada model indeks williamson, PDRB perkapita signifikan serta IPM dan RBI sangat signifikan sebagai sumber ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Sedangkan pada model Indeks Gini, variabel PDRB perkapita tidak signifikan sedangkan IPM dan RBI sangat signifikan sebagai sumber ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Sedangkan hubungan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo menunjukan koefisien regresi yang positif, setiap perubahan pertumbuhan ekonomi menyebabkan nilai ketimpangan meningkat.

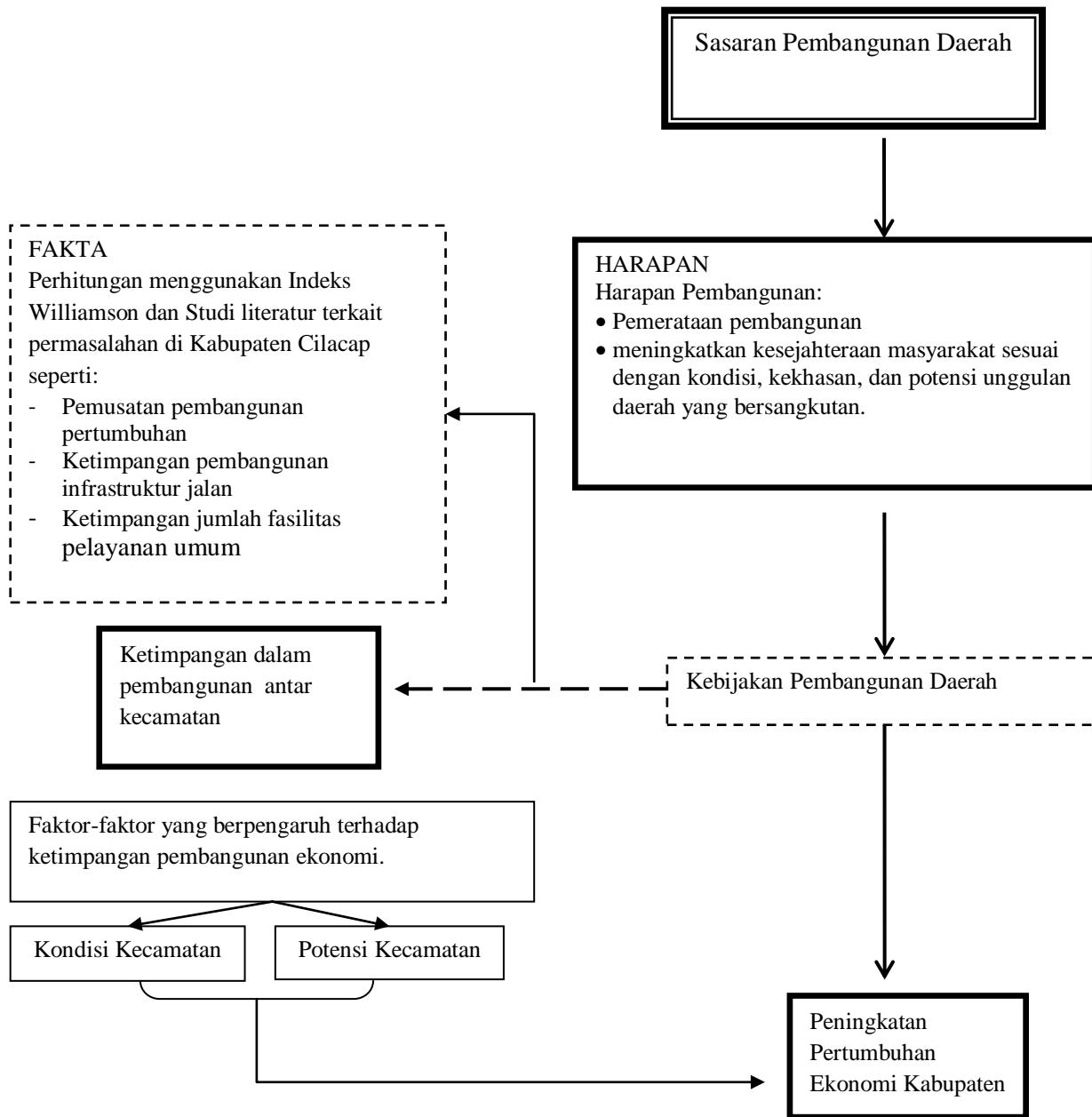
Linggar Dewangga Putra (2011), melakukan penelitian terkait analisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan di provinsi Jawa Tengah adalah adanya ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan pada tiap-tiap kabupaten/kota. Melalui analisis regresi diperoleh hasil bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa tengah dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.

Barika (2012) melakukan penelitian terkait analisis ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2005-2009. Di Provinsi Bengkulu menunjukan bahwa hingga tahun 2008 sektor pertanian masih sangat dominan. Namun ketimpangan pembangunan terus mengalami peningkatan, karena terdapat daerah-daerah yang lebih dominan menyumbang besarnya PDRB. Sedangkan hasil penelitian terhadap faktor-

faktor penyebab ketimpangan menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk dan investasi swasta berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan daerah. Sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Basuki Rahmat (2013), menyebutkan bahwa Sulawesi Selatan lebih banyak bergantung pada sektor pertanian yaitu sekitar 33,54%. Selain itu perekonomian Sulawesi Selatan memiliki perkembangan PDRB yang pesat sekitar 7,28 persen per tahun. Namun terjadi ketimpangan yang cukup tinggi. Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa desentralisasi fiskal tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Tingkat pendidikan SMA tidak signifikant dan berpengaruh negatif sebelum adanya desentralisasi fiskal, sedangkan setelah adanya desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

## K. Kerangka Berfikir



Gambar 5. Alur Kerangka Berfikir

## L. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka, bahwa tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi diduga dipengaruhi oleh struktur pertumbuhan ekonomi (*Regional Share, Proportional shift, Competitive shift*), tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan, pertumbuhan penduduk, dan jumlah penduduk. Sedangkan hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. *Regional share* berpengaruh positif terhadap ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Di mana peningkatan *regional share* akan menyebabkan meningkatnya tingkat ketimpangan dalam pembangunan ekonomi.
2. *Proportional shift* berpengaruh positif terhadap ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Di mana peningkatan *proportional shift* akan menyebabkan meningkatnya tingkat ketimpangan dalam pembangunan ekonomi.
3. *Competitive shift* berpengaruh positif terhadap ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Di mana peningkatan *competitive shift* akan menyebabkan meningkatnya tingkat ketimpangan dalam pembangunan ekonomi.
4. Persentase jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Dimana peningkatan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi.

5. Persentase jumlah keluarga miskin berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Di mana peningkatan jumlah keluarga miskin akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi.
6. Pertumbuhan penduduk migrasi berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Di mana peningkatan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan menurunnya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain penelitian**

Penelitian ini terkait dengan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Cilacap. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* selama 10 tahun dan data *cross section* dari 24 kecamatan. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah trend perkembangan pembangunan ekonomi tiap kecamatan, ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **B. Sumber Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. Dan penelitian ini juga menggunakan literatur dan jurnal yang sesuai sebagai sumber atau bahan kajian.

#### **C. Teknik Analisis**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Analisis dengan pendekatan deskriptif menggunakan alat analisis berupa matrik Tipologi Klassen. Sedangkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi data panel.

## 1. Tipologi Klassen

Untuk melihat perkembangan dan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi pada tiap kecamatan, maka digunakan matrik Tipologi Klassen. Matrik tipologi Klassen merupakan pengelompokan daerah menurut struktur pertumbuhan dan tingkat pembangunan, dengan menggunakan dua indikator yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita, pengelompokan daerah akan terbagi menjadi empat kelompok yaitu:

- a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding rata-rata kecamatan di kabupaten i.
- b. Daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di kabupaten i.
- c. Daerah berkembang, yaitu daerah yang memiliki tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata dan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata kecamatan di kabupaten i.
- d. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di kabupaten i.

## 2. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Cilacap. Penelitian data panel merupakan kombinasi data runtun waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*). Dengan persamaan dasar regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \dots + \beta_k X_{it} + \varepsilon_i$$

Dimana :

$Y_{it}$  = variabel terikat untuk pengamatan ke  $i$  periode  $t$

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

$X$  = Variabel bebas

$\varepsilon$  = error

$i$  = Unit *Cross section* (individual)

$t$  = Periode waktu

Dan fungsi umum yang akan digunakan adalah:

$$I_t = f(P_k, K_k)$$

Dimana :

$I_t$  = Indeks Theil atau Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

$P_k$  = Potensi Kecamatan

$K_k$  = Kondisi Kecamatan

Maka berdasarkan landasan teori diperoleh variabel-variabel yang akan digunakan dalam regresi data panel adalah:

**Tabel 5. Variabel-variabel Penelitian**

	Variabel	Cara mengukur	Ket.
Ketimpangan pembangunan Ekonomi	• Indek Ketimpangan <i>Entropy Theil</i>	$T_d = \sum_{j=1}^n \left\{ \frac{y_{ij}}{Y} \right\} \log[\{y_{ij} / Y\} / \{n_{ij} / N\}]$ $y_{ij}$ = PDRB per kapita kecamatan i di kabupaten j $Y$ = jumlah PDRB perkapita slrh kabupaten j $n$ = jumlah penduduk kecamatan i di kabupaten j $N$ = jumlah penduduk seluruh kecamatan	Variabel Terikat ( <b>Y</b> )
Potensi Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regional share</i></li> <li>• <i>Proportionality shift</i></li> <li>• <i>Competitive shift</i></li> </ul>	$= y_i (Y^t / Y^0 - 1)$ $= y_i (Y_i^t / Y_i^0) - (Y^t / Y^0)$ $= y_i (y_i^o / y_i^t) - (Y_i^t / Y_i^o)$ Dimana: $y_i^o$ = nilai tambah sektor i di kecamatan pd awal periode. $y_i^t$ = nilai tambah sektor i di kecamatan pada akhir period $Y_i^o$ = nilai tambah sektor i di kabupaten pd awal periode $Y_i^t$ = nilai tambah sektor i di kabupaten pada akhir period	Variabel Bebas (X1) Variabel Bebas (X2) Variabel Bebas (X3)
Kondisi Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah lulusan SMA &amp; PT</li> <li>• Persentase keluarga Pra sejahtera</li> <li>• Pertumbuhan penduduk migrasi</li> </ul>	$= \frac{\text{Jmlh lulusan jenjang SMA & PT}}{\text{Jmlh slrh pndk mnrt tngkt pndkan}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Jmlh keluarga pra sejahtera}}{\text{Jmlh slrh klrgr brdsr tngkt ksjhtran}} \times 100\%$ $T = (I - E)$ Dimana: $T$ = Petumbuhan penduduk $I$ = Migrasi masuk $E$ = migrasi keluar	Variabel Bebas (X4) Variabel Bebas (X5) Variabel Bebas (X6)

Definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- Indeks ketimpangan pembangunan ekonomi adalah perhitungan yang menunjukkan besarnya ketimpangan pembangunan ekonomi di

dalam kecamatan yang dihitung dengan formulasi indeks *Entropy Theil intra region*. Besarnya nilai indeks apabila mendekati 0 menunjukan ketimpangan yang kecil sedangkan nilai indeks ketimpangan mendekati 1 menunjukan ketimpangan yang besar atau semakin melebar.

- b. *Regional Share* adalah perubahan nilai tambah sektor pada awal periode dan akhir periode ditingkat kecamatan akibat dorongan faktor luar ditingkat kabupaten pada awal periode dan akhir periode. Perubahan nilai tambah sektor dapat diukur dengan metode *shift share*. Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2004-2013 dan dinyatakan dalam satuan persentase.
- c. *Proportionality Shift* adalah perubahan nilai tambah sektor pada awal periode dan akhir periode ditingkat kecamatan akibat kondisi struktur perekonomian yang relatif baik ditingkat kabupaten pada awal periode dan akhir periode. Perubahan nilai tambah sektor dapat diukur dengan metode *shift share*. Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2004-2013 dan dinyatakan dalam satuan persentase.
- d. *Competitive Shift* adalah perubahan nilai tambah sektor pada awal periode dan akhir periode ditingkat kecamatan, akibat kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Perubahan nilai tambah sektor competitive dapat diukur dengan metode *shift share*. Dalam

hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2004-2013 dan dinyatakan dalam satuan persentase.

- e. Persentase jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi adalah banyaknya jumlah penduduk baik penduduk yang telah menamatkan maupun yang masih menempuh pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi, kemudian dibagi dengan seluruh penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun tertentu di kecamatan i. Dan dinyatakan dengan satuan prosentase
- f. Persentase jumlah keluarga miskin adalah banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera dan jumlah keluarga sejahtera tahap I, kemudian dibagi seluruh keluarga di dalam suatu kecamatan menurut tingkat kesejahteraan dan dinyatakan dalam satuan persentase. Tingkat kesejahteraan keluarga dalam penelitian ini adalah jumlah keluarga yang dikelompokan menurut indikator kesejahteraan yang disurvei oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional (BKKBN).
- g. Pertumbuhan penduduk migrasi adalah perubahan jumlah penduduk baik bertambah maupun berkurang yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar yang tersebar dalam 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap dalam waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya.

Dalam mengukur persamaan regresi menggunakan data panel, untuk keseimbangan datanya akan digunakan model regresi berganda

*unbalance panel.* Dimana setiap unit *cross sectionnya* memiliki jumlah observasi *time series* yang berbeda. Sedangkan dalam analisis menggunakan regresi data panel, untuk hasil estimasi dipilih salah satu model regresi data panel yang sesuai. Terdapat tiga model yang digunakan diantarnya: 1) Regresi data panel dengan *Common Effect* atau *Ordinary Least Square* (OLS), 2) Regresi data panel dengan *Fixed Effect Method* (FEM), 3) Regresi data panel dengan *Random Effect*.

**a. Regresi data panel dengan *Common Effect***

Model analisis ini mengabaikan dimensi waktu dan ruang, karena intersep dan koefisien slope dianggap konstan. Dan dalam melakukan regresi digunakan langsung regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Untuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_p X_{pit} + \mu_{it}$$

Dimana:

i = Unit *cross section* (individual)

t = Periode waktu

**b. Regresi data panel dengan *Fixed Effect Method (FEM)***

Model analisis ini memiliki asumsi adanya perbedaan intercept antar individu, tetapi intersep antar waktunya sama dan koefisien regresi atau slope sama antar individu dan waktu. Untuk penggunaan slope yang konstan sedangkan intersepnya harus bervariasi, maka bisa digunakan variabel *dummy*. Untuk persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 W_{1it} + D_2 Z_{1it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$W_{1it} = 1$  untuk daerah ke i

= 0 untuk lainnya

$Z_{1it} = 1$  untuk periode ke t

= 0 untuk lainnya

### c. Regresi data panel dengan *Random Effect*.

Model analisis ini memiliki asumsi bahwa slope antar individu adalah sama, tetapi intersep berbeda baik antar individu maupun antar waktu, namun rata-rata tiap intersep adalah sama.

Untuk persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_p X_{pit} + \varepsilon_{it} + \mu_{it}$$

Untuk menentukan teknik regresi data panel mana yang akan digunakan, maka dilakukan pengujian dengan:

#### a. Uji statistik F

Untuk menguji apakah model regresi dengan FEM lebih baik dibandingkan dengan model regresi *pooled least square*, maka digunakan uji F.

Dan formulasi F statistiknya adalah:

$$F_{N+T-2, NT-N-T} = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/(N + T - 2)}{(RSS_2)/(NT - N - T)}$$

Apabila model regresi dengan *fixed effect* adalah lebih baik dari model regresi *pooled least square* maka nilai *F test* akan lebih tinggi dari F tabel secara signifikan.

### b. Uji Lagrange Multiplier

Untuk menguji apakah model regresi dengan model *random effect* lebih baik dibandingkan dengan model regresi *pooled least square*. Maka digunakan uji LM.

Dan formulasi statistinya adalah:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left( \frac{\sum_{i=1}^n (T\bar{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

Apabila model regresi dengan *random effect* adalah lebih baik dari model regresi *pooled least square* maka nilai *chi square* akan lebih tinggi dari nilai *chi square table*.

### c. Uji Hausman

Untuk menguji metode regresi data panel mana yang lebih baik apakah menggunakan metode regresi dengan *fixed effect* atau dengan metode *random effect* maka digunakan uji Hausman. Pengujian statistik ini menggunakan REM sebagai acuan (*null hipotesis*). Sebagai dasar penolakan hipotesa null digunakan statistik *chi square* dan *chi square table*.

Dengan formulasi statistiknya adalah:

$$H = (\beta_{RE} - \beta_{FE})^T (\sum FE - \sum RE)^{-1} (\beta_{RE} - \beta_{FE})$$

Dimana:

$\beta_{RE}$  = *Random effect estimator*

$\beta_{FE}$  = *Fixed effect estimator*

$\sum FE$  = matrik kovarian *Fixed effect*

$\Sigma RE$  = matrik kovarian *Random effect*

Apabila model regresi dengan *fixed effect* adalah lebih baik dari model regresi *random effect* maka nilai *chi square* akan lebih rendah dari nilai *chi square table*.

Setelah ditentukan model mana yang digunakan dalam regresi data panel, dilakukan lagi pengujian terhadap model yaitu uji statistik dan uji ekonometrika, yang meliputi:

#### a. Uji statistik

Penggunaan uji statistik dilakukan guna mengetahui apakah perhitungan yang dilakukan signifikan secara statistik atau tidak signifikan. Ketepatan dalam menggunakan regresi dapat diukur dari *goodness of fit*. Dan dalam analisis regresi terdapat 3 jenis kriteria ketepatan (*goodness of fit*) yaitu: 1) uji statistik t, 2) uji statistik F, dan 3) Koefisien determinasi ( $R^2$ ).

##### 1) Uji signifikansi Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang diuji adalah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol.

Sedangkan cara untuk melakukan uji t bisa dipergunakan:

- Apabila jumlah *degree of freedom* adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $b_i = 0$  dapat ditolak apabila nilai t lebih besar dari 2 (nilai absolut).

- b) Dengan cara membandingkan nilai statistik t, apabila nilai statistik t hitung lebih besar dibanding t tabel maka hipotesis alternatif dapat diterima.

## **2) Uji signifikansi secara keseluruhan (Uji statistik F)**

Uji statistik F menunjukkan semua variabel bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Sedangkan cara untuk melakukan uji t bisa dipergunakan:

- a) Apabila nilai F lebih besar daripada 4 maka  $H_0$  yang menyatakan  $b_1=b_2=\dots=b_k=0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%.
- b) Dengan cara membandingkan nilai statistik F, apabila nilai statistik F hitung lebih besar dibanding F tabel maka hipotesis alternatif dapat diterima.

## **3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Namun penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen yang dimasukan  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel independen tersebut signifikan atau tidak. Oleh karena itu nilai

*Adjusted R<sup>2</sup>* dapat digunakan untuk mengevaluasi mana model regresi yang baik.

### b. Uji Ekonometrika

Dalam menggunakan regresi OLS diperlukan pengujian untuk menghasilkan sifat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*, pengujian dilakukan menggunakan asumsi Klasik yang terdiri dari:

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Melalui uji signifikansi individual, pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dapat dikatakan valid apabila residual yang dihasilkan memiliki distribusi normal. Melalui uji *Skewness* dan *Kurtosis*, apabila besarnya prob>chi2 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  menunjukkan data berdistribusi normal.

#### 2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui korelasi linier yang tinggi di antara lebih dari dua variabel independen. Apabila di dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi di antara variabel bebas maka dinyatakan mengandung gejala multikolinear. Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk melihat adanya multikolinear diantaranya dengan melihat nilai  $R^2$  dan nilai t

statistik. Jika nilai  $R^2$  tinggi dan uji F menolak hipotesis nol, tetapi nilai t statistik sangat kecil atau tidak ada variabel bebas yang signifikan, maka hal tersebut menunjukkan gejala multikolinear. Sedangkan salah satu cara untuk mengatasi gejala multikolinear dapat dilakukan dengan menghilangkan variabel yang memiliki korelasi yang sangat tinggi.

### **3) Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Sedangkan yang diharapkan dari model regresi yaitu adanya homoskedastisitas. Sedangkan penggunaan data panel selain menggunakan data *time series* tetapi juga menggunakan data *cross section*, yang menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran homoskedastisitas. Dan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *White Test* dan uji *Wald Test*. Sedangkan untuk mengatasi adanya masalah heteroskedastisitas dapat digunakan *heteroskedascity robust* atau *standard error*.

### **4) Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi berdasarkan waktu (*time-series*) atau ruang (*cross section*). Untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi bisa menggunakan *Durbin-Watson test*, *Breusch-Godfrey test* dan *Wooldridge Test*.

Sedangkan mengatasi permasalahan autokorelasi dapat digunakan transformasi *Cochrane-Orcutt* dan standar error *Newey West*. Sedangkan dalam software Stata 12.0 permasalahan asumsi heterokedasitas dan autokorelasi untuk data panel tidak lengkap (*unbalanced panel*) dapat diatasi secara bersamaan dengan metode *FGLS* (*Feasible General Least Square*).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Cilacap. Analisis dilakukan melalui perhitungan data yang diperoleh dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen dan analisis regresi data panel.

#### **A. Deskripsi Data**

Data penelitian seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah di Kabupaten Cilacap. Dalam penelitian ini perhitungan data dilakukan dengan alat analisis Tipologi Klassen dengan menggunakan data laju pertumbuhan ekonomi serta PDRB perkapita. Sedangkan dalam menganalisis regresi data panel untuk variabel dependennya digunakan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi melalui alat analisis Entropi Theil dan data yang digunakan adalah data PDRB, PDRB perkapita dan jumlah penduduk. Sedangkan untuk variabel independen digunakan data komponen pertumbuhan *regional share*, komponen pertumbuhan *proporsional shift*, komponen pertumbuhan *competitive shift*, jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi, jumlah keluarga miskin, dan pertumbuhan penduduk migrasi.

Berikut adalah deskripsi data dari tiap-tiap perhitungan dalam penelitian ini.

## 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Cilacap memiliki wilayah dengan potensi yang mendukung dalam mengembangkan perekonomian. Meskipun sebagian besar wilayah bercirikan kultur agraris namun sumbangan sektor industri pengolahan memiliki andil yang cukup besar terhadap PDRB.

**Tabel 6. Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2010 (%)**

	sektor	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	9.23	6.32	6.25	6.69	5.85	6.11	6.2	6.06	6.07	6.11
2	Pertambangan dan Penggalian	0.91	0.68	0.64	0.68	0.63	0.67	0.66	0.66	0.69	0.73
3	Industri Pengolahan	61.73	66.5	67.01	65.48	66.98	63.55	61.8	60.29	58.38	56.93
4	Listrik,Gas dan Air Bersih	0.39	0.28	0.26	0.26	0.21	0.21	0.21	0.2	0.21	0.23
5	Bangunan	1.49	1.05	0.94	0.98	0.9	0.98	1	1.04	1.11	1.16
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20.92	21.21	21.19	21.82	21.47	24.16	25.64	27.16	28.7	29.79
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.6	1.38	1.38	1.54	1.47	1.6	1.71	1.79	1.89	1.99
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.36	0.98	0.87	0.91	0.95	1.03	1.07	1.07	1.12	1.18
9	Jasa-jasa	2.36	1.62	1.47	1.64	1.53	1.69	1.72	1.74	1.83	1.89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6, sektor industri pengolahan selama kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2004 hingga 2013, memiliki kontribusi tertinggi terhadap perekonomian di Kabupaten Cilacap. Meskipun terus mengalami penurunan, sektor industri pengolahan masih mendominasi besarnya PDRB. Sektor lainnya yang berkontribusi besar adalah sektor

perdagangan, hotel dan restoran meskipun hanya berkontribusi sebesar 20,92% pada tahun 2004, namun hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 9,23% namun dari tahun ketahun mengalami penurunan.

Sedangkan dilihat dari kontribusi tiap-tiap kecamatan, terdapat tujuh kecamatan yang berkontribusi diatas 5% terhadap PDRB kabupaten.

**Tabel 7. Kontribusi PDRB Kecamatan terhadap Perekonomian Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013 (%)**

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Daeyuhluhur	3.46	4.10	4.23	4.19	4.10	4.05	3.88	3.68	3.63	3.56
2	Wanareja	5.53	5.94	6.05	6.04	6.01	5.99	5.85	5.63	5.55	5.51
3	Majenang	8.46	8.47	8.37	8.49	8.46	8.46	8.43	8.28	8.46	8.48
4	Cimanggu	5.04	5.68	5.80	5.80	5.74	5.72	5.74	5.60	5.55	5.53
5	Karangpucung	3.19	2.98	3.00	2.98	3.04	3.07	3.03	2.97	2.93	2.92
6	Cipari	2.82	2.90	2.98	2.96	2.91	2.89	2.95	2.96	2.93	2.89
7	Sidareja	4.81	4.19	4.41	4.42	4.41	4.44	4.47	4.41	4.34	4.33
8	Kedungreja	2.95	1.86	1.85	1.85	1.86	1.88	1.88	1.79	1.78	1.78
9	Patimuan	1.58	1.37	1.39	1.38	1.38	1.40	1.39	1.38	1.38	1.37
10	Gandrunmangu	3.15	2.53	2.57	2.56	2.57	2.61	2.59	2.57	2.56	2.56
11	Bantarsari	1.91	1.63	1.54	1.53	1.52	1.52	1.55	1.54	1.52	1.51
12	Kawungaten	3.55	3.07	2.39	2.38	2.35	2.36	2.40	2.48	2.48	2.45
13	Kampung Laut	0.00	0.00	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.45	0.44	0.43
14	Jeruk Legi	4.37	4.86	4.91	4.89	4.86	4.83	4.85	4.67	4.56	4.54
15	Kesugihan	5.32	5.64	5.64	5.59	5.60	5.62	5.57	5.34	5.36	5.39
16	Adipala	3.59	3.59	3.86	3.86	3.86	3.86	3.95	4.00	3.94	3.93
17	Maos	3.30	3.44	3.39	3.37	3.42	3.46	3.36	3.14	3.10	3.11
18	Sampang	2.92	3.06	3.14	3.14	3.17	3.21	3.37	3.40	3.33	3.35
19	Kroya	4.64	5.01	5.05	5.09	5.12	5.15	5.26	5.62	5.74	5.76
20	Binangun	2.80	2.96	3.01	2.99	2.97	2.97	3.00	3.04	3.01	3.00
21	Nusawungu	3.36	3.07	3.08	3.07	3.07	3.07	3.13	3.16	3.14	3.13
22	Cilacap Selatan	9.32	9.25	9.20	9.24	9.21	9.11	8.94	9.44	9.73	9.81
23	Cilacap Tengah	5.67	5.84	5.68	5.67	5.79	5.80	5.91	6.31	6.62	6.68
24	Cilacap Utara	8.27	8.56	8.05	8.09	8.16	8.11	8.10	8.11	7.93	8.00

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap (data diolah)

Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan besarnya kontribusi PDRB pada masing-masing kecamatan. Kecamatan Wanareja, Kecamatan Majenang, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Cilacap Utara memiliki kontribusi PDRB yang besar terhadap PDRB Kabupaten Cilacap dengan kontribusi PDRB diatas 5%. Kecamatan yang paling tinggi kontribusinya adalah Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Utara yaitu dengan kontribusi sebesar 9.32% dan 8.27%, selain sebagai bagian dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Utara juga didorong oleh adanya industri pengolahan yang pesat. Sehingga tidak mengherankan apabila kontribusinya besar terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap.

Selain Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Majenang juga memiliki andil yang besar terhadap PDRB kabupaten. Selain didorong oleh sektor pertanian yang pesat, Kecamatan Majenang juga merupakan daerah yang strategis sebagai perlintasan lintas provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

## 2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita di Kabupaten Cilacap masih menduduki peringkat pertama PDRB perkapita tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun penduduk di Kabupaten Cilacap jumlah penduduknya terhitung banyak, namun karena diimbangi besarnya PDRB sehingga PDRB perkapita Kabupaten Cilacap terbilang cukup tinggi.

Lain halnya di tiap-tiap kecamatan yang terlihat dalam Tabel 8, banyaknya jumlah penduduk yang ada ditiap kecamatan belum diimbangi dengan perekonomian yang baik sehingga pendapatan perkapita yang diperoleh pun masih sangat rendah. Seperti halnya Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Kedungreja, serta Kecamatan Kawunganten. Sedangkan kecamatan-kecamatan dengan pendapatan perkapita tertinggi yaitu Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Utara dan Cilacap Tengah. Meskipun jumlah penduduknya terbilang banyak tetapi juga disertai iklim perekonomian yang mendukung sehingga Kecamatan Cilacap Utara, Tengah dan Selatan besarnya PDRB perkapita dapat jauh melampaui kecamatan lain di Kabupaten Cilacap.

**Tabel 8. Tingkat PDRB Perkapita dan Jumlah Penduduk Tiap-Tiap Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013.**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita
1	Daeyuhluhur	49,242	19,636,549.92
2	Wanareja	96,613	15,482,680.83
3	Majenang	126,970	18,138,810.80
4	Cimanggu	97,522	15,390,501.34
5	Karangpucung	73,377	10,817,825.75
6	Cipari	62,031	12,645,666.08
7	Sidareja	57,267	20,550,188.73
8	Kedungreja	81,077	5,964,684.50
9	Patimuan	46,044	8,082,984.66
10	Gandrungmangu	104,948	6,616,158.01
11	Bantarsari	69,230	5,919,481.45
12	Kawungaten	80,819	8,238,564.70
13	Kampung Laut	17,119	6,872,588.88
14	Jeruk Legi	64,337	19,146,870.46
15	Kesugihan	96,165	15,210,445.84
16	Adipala	79,407	13,444,560.79
17	Maos	47,467	17,809,701.13
18	Sampang	37,530	24,213,828.68
19	Kroya	103,463	15,119,458.54
20	Binangun	66,102	12,320,579.39
21	Nusawungu	77,748	10,938,804.75
22	Cilacap Selatan	78,247	34,036,846.77

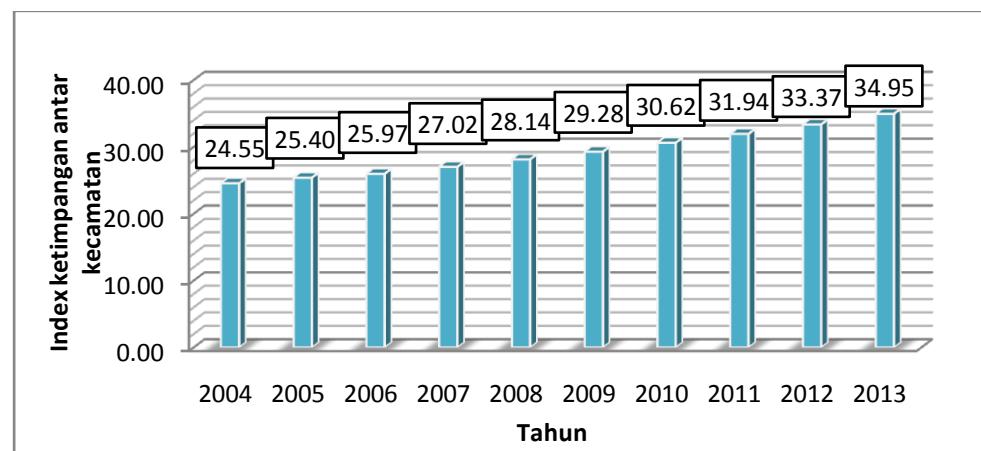
23	Cilacap Tengah	83,873	21,622,553.21
24	Cilacap Utara	69,254	31,379,400.38

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2013

### 3. Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Pengurangan ketimpangan melalui kebijakan pembangunan di Kabupaten Cilacap kurang memberikan hasil yang positif. Proses pembangunan justru menimbulkan permasalahan yang mempertanyakan keadilan dan pemerataan.

Melalui besaran nilai ketimpangan pembangunan dengan menggunakan data PDRB, PDRB perkapita serta jumlah penduduk, besarnya ketimpangan masing-masing kecamatan dapat diketahui. Berikut adalah besarnya ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Cilacap yang dihitung menggunakan Indeks Entropi Theil *Inter Region*.



Sumber: BPS kabupaten Cilacap (data diolah)

**Gambar 6. Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013.**

Berdasarkan Gambar 6, menunjukan bahwa besarnya ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Cilacap dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.

Sedangkan ketimpangan pembangunan ekonomi di dalam kecamatan itu sendiri, indeks ketimpangan dapat dihitung menggunakan Indeks Entropy Theil *Intra Region*.

**Tabel 9. Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di dalam Kecamatan Tahun 2004-2013.**

	Kecamatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Daeyuhluhur	0.71	0.88	0.86	0.86	0.82	0.85	0.85	0.83	0.82	0.82
2	Wanareja	0.39	0.42	0.41	0.42	0.42	0.44	0.44	0.44	0.43	0.44
3	Majenang	0.41	0.38	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.39	0.42	0.43
4	Cimanggu	0.30	0.34	0.34	0.35	0.34	0.36	0.36	0.37	0.38	0.40
5	Karangpucung	0.28	0.25	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27
6	Cipari	0.36	0.36	0.35	0.35	0.33	0.35	0.35	0.36	0.37	0.38
7	Sidareja	0.80	0.61	0.61	0.63	0.62	0.66	0.66	0.69	0.70	0.73
8	Kedungreja	0.19	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10
9	Patimuan	0.26	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22
10	Gandrungmangu	0.13	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
11	Bantarsari	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11
12	Kawungaten	0.18	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17
13	Kampung Laut			0.32	0.32	0.32	0.28	0.25	0.24	0.24	0.24
14	Jeruk Legi	0.59	0.66	0.65	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.65	0.67
15	Kesugihan	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.36	0.37	0.37	0.38	0.40
16	Adipala	0.29	0.27	0.27	0.28	0.27	0.29	0.30	0.31	0.33	0.34
17	Maos	0.60	0.62	0.63	0.65	0.64	0.68	0.70	0.61	0.63	0.67
18	Sampang	0.74	0.74	0.77	0.80	0.81	0.86	0.87	0.90	0.93	0.97
19	Kroya	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.27	0.28	0.30	0.32	0.33
20	Binangun	0.29	0.31	0.30	0.31	0.29	0.31	0.31	0.31	0.33	0.34
21	Nusawungu	0.26	0.26	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	0.26
22	Cilacap Selatan	0.98	0.91	0.90	0.94	0.92	0.96	0.98	1.03	1.12	1.19
23	Cilacap Tengah	0.41	0.39	0.40	0.42	0.43	0.46	0.47	0.53	0.58	0.62
24	Cilacap Utara	0.94	0.87	0.96	1.00	0.97	1.00	1.02	1.09	1.13	1.19

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap (data diolah)

Berdasarkan Tabel 9, menunjukan besarnya ketimpangan di dalam kecamatan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi ditiap-tiap kecamatan sangat bervariasi. Apabila angka ketimpangan mendekati 0 menunjukan bahwa ketimpangan yang kecil atau merata, sedangkan ketimpangan yang mendekati 1 menunjukan bahwa ketimpangan mengalami pelebaran. Dan kecamatan-kecamatan yang mengalami pelebaran ketimpangan yaitu

Kecamatan Daeyuhluhur, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Sampang, Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Utara. Bahkan ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Utara menunjukkan ketimpangan yang besar dengan angka 0.983 dan 0.940 yang hampir menujukan ketimpangan sempurna.

#### **4. Komponen Pertumbuhan Ekonomi**

Besarnya pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti menggunakan alat analisis *shift share*, besarnya pertumbuhan ekonomi terbagi dan dikelompokan menjadi 3 komponen. Dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku, besarnya komponen pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Cilacap dapat diketahui.

**Tabel 10. Komponen Pertumbuhan Ekonomi *Competitive Shift, Proportional Shift* dan *Regional Share* Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013 (%)**

No	Kecamatan	Regional Share	Proportional Shift	Competitive Shift	Pertumbuhan Ekonomi
1	Daeyuhluhur	78.52	16.23	5.25	3.03
2	Wanareja	52.50	33.20	14.30	4.53
3	Majenang	41.53	28.89	29.59	5.76
4	Cimanggu	47.51	22.48	30.02	5.02
5	Karangpucung	47.25	39.95	12.80	5.05
6	Cipari	62.35	20.55	17.09	3.81
7	Sidareja	45.57	35.95	18.47	5.24
8	Kedungreja	40.47	35.92	23.61	5.90
9	Patimuan	47.74	41.78	10.48	4.99
10	Gandrungmangu	47.09	45.30	7.61	5.06
11	Bantarsari	57.48	38.10	4.42	4.14
12	Kawungaten	59.15	37.34	3.50	4.01
13	Kampung Laut	74.16	24.03	1.81	3.22
14	Jeruk Legi	49.36	26.47	24.16	4.83
15	Kesugihan	38.94	32.09	28.97	6.15
16	Adipala	46.23	29.04	24.73	5.16
17	Maos	38.82	46.11	15.07	6.17
18	Sampang	39.20	44.54	16.26	6.10
19	Kroya	40.97	42.50	16.53	5.85

20	Binangun	48.52	24.65	26.83	4.91
21	Nusawungu	47.68	27.07	25.24	5.00
22	Cilacap Selatan	35.25	27.58	37.16	6.67
23	Cilacap Tengah	35.25	27.58	37.16	6.83
24	Cilacap Utara	34.63	9.01	56.36	6.95

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap (data diolah)

Berdasarkan Tabel 10, hampir keseluruhan kecamatan di Kabupaten

Cilacap memiliki besarnya pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh dorongan *regional share*. Terutama Kecamatan Daeyuhluhur, Kecamatan Wanareja, Kecamatan Cipari, Kecamatan Bantarsari, Kawunganten, dan Kecamatan Kampung Laut dengan prosentase di atas 50%. Namun besarnya komponen pertumbuhan *regional share* belum memberikan andil yang optimal terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yang berarti dorongan kegiatan ekonomi akibat kebijakan daerah serta perdagangan dengan wilayah lain belum secara langsung mendorong laju pertumbuhan.

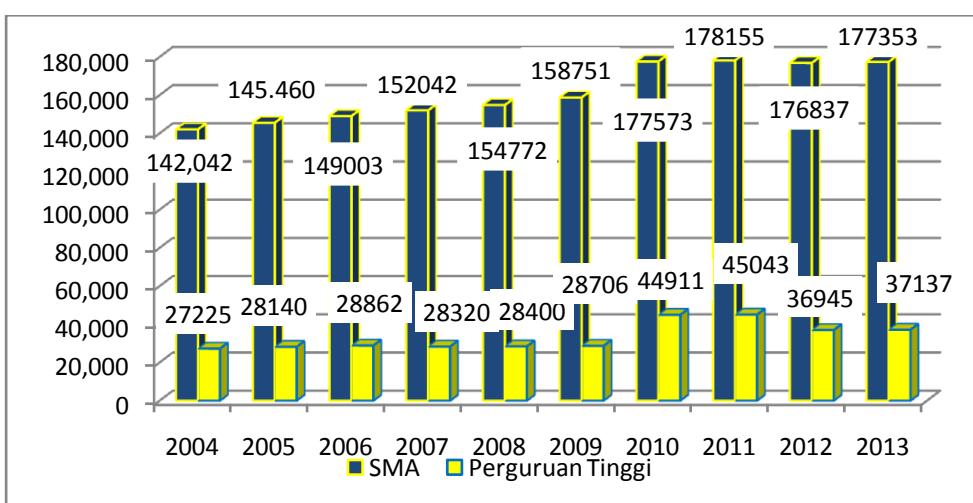
Sedangkan komponen pertumbuhan *Proportional Shift* atau faktor keunggulan dari dalam daerah, terlihat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kecamatan. Seperti halnya Kecamatan Maos besarnya komponen pertumbuhan *proporsional shift* yang lebih besar dibandingkan komponen pertumbuhan *regional share* dan *competitive shift* mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6.17.

Begitu juga kecamatan-kecamatan yang memiliki keuntungan kompetitif. Terlihat lebih berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kecamatan. Seperti Kecamatan Cilacap Utara, meskipun dorongan pertumbuhan ekonomi dari dalam kecamatan serta faktor luar terbilang lebih rendah dibandingkan *competitive shift*, namun mampu menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat.

## 5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Cilacap masih terbilang rendah, karena penduduk yang mengenyam pendidikan sampai batas SD sederajat terbilang besar. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang mengenyam tingkat pendidikan tinggi atau setara akademi atau perguruan tinggi masih rendah sekitar 2.28% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Cilacap pada tahun 2012.

Sedangkan dalam penelitian ini tingkat pendidikan dengan kategori tinggi adalah tingkat pendidikan SMA dan tingkat pendidikan akademi atau perguruan tinggi. Di Kabupaten Cilacap jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan SMA dan perguruan tinggi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2012 baik jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan perguruan tinggi mengalami penurunan.



Sumber: BPS Kabupaten Cilacap

**Gambar 7. Perkembangan Jumlah Penduduk yang Mengenyam Pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013.**

Jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan SMA dan perguruan tinggi jumlahnya pada masing-masing kecamatan sangat bervariasi. Dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan SMA dan perguruan tinggi terhadap jumlah keseluruhan penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan, diperoleh persentase jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan tinggi di masing-masing kecamatan.

**Tabel 11. Persentase Jumlah Penduduk dengan Tingkat Pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi Tahun 2004-2013**

No	Kecamatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Daeyuhluhur	6.29	6.55	6.96	6.99	6.94	7.41	9.05	9.05	11.41	11.64
2	Wanareja	6.15	6.36	6.55	6.61	6.76	6.71	8.67	8.67	7.46	7.63
3	Majenang	9.77	9.79	9.91	9.30	9.70	9.66	12.56	12.56	10.26	10.32
4	Cimanggu	6.82	6.90	7.02	7.14	7.15	7.56	7.71	7.71	15.89	16.00
5	Karangpucung	5.98	6.11	6.47	6.86	6.88	6.71	7.71	7.71	8.04	8.02
6	Cipari	5.92	5.95	6.09	6.26	6.26	6.44	8.28	8.28	6.59	6.62
7	Sidareja	9.38	9.71	9.82	9.79	9.84	9.69	13.23	13.23	11.74	11.91
8	Kedungreja	7.69	7.66	7.86	8.04	8.05	8.18	10.04	10.04	9.22	9.23
9	Patimuan	5.93	5.95	6.03	6.12	6.25	6.75	6.59	6.58	7.69	7.79
10	Gandrungmangu	6.29	6.36	6.46	8.46	8.52	8.86	8.92	8.92	16.35	16.54
11	Bantarsari	4.27	4.50	4.80	4.85	5.00	5.11	6.93	6.93	5.31	5.33
12	Kawungaten	5.19	5.25	5.34	5.35	5.50	5.43	8.62	8.62	5.75	6.08
13	Kampung Laut	8.08	8.25	8.60	2.15	2.90	2.74	3.31	3.29	3.33	4.05
14	Jeruk Legi	10.71	10.74	10.83	8.65	8.89	9.26	11.34	11.33	9.23	8.74
15	Kesugihan	8.58	8.71	8.89	10.66	10.68	10.70	14.78	14.78	10.73	10.18
16	Adipala	17.10	17.36	17.57	8.75	8.82	8.75	11.71	11.71	12.01	11.58
17	Maos	13.11	13.18	13.04	17.03	16.99	15.71	19.27	19.27	17.01	17.40
18	Sampang	12.41	12.46	12.54	13.19	13.09	14.50	18.69	18.70	14.93	14.81
19	Kroya	8.32	8.66	8.80	12.64	12.69	12.76	17.67	17.66	13.77	13.93
20	Binangun	6.75	6.99	7.11	8.85	9.09	10.03	11.98	11.98	11.56	11.21
21	Nusawungu	2.06	2.21	2.68	9.82	9.90	10.80	10.76	10.76	11.27	12.03
22	Cilacap Selatan	30.36	30.62	30.63	27.41	26.91	28.18	33.39	33.39	32.82	32.38
23	Cilacap Tengah	32.03	32.05	31.97	31.68	31.85	31.85	35.76	35.76	31.85	31.85
24	Cilacap Utara	23.23	22.93	22.91	21.39	21.22	21.11	30.03	30.03	22.70	23.13

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap (data diolah)

Berdasarkan Tabel 11, menunjukkan persentase jumlah penduduk dengan taraf pendidikan tinggi. Pada tiap-tiap kecamatan dari tahun 2004 hingga tahun 2013, jumlah keseluruhan penduduk yang mengenyam pendidikan SMA dan perguruan tinggi terus mengalami peningkatan. Seperti Kecamatan Nusawungu, peningkatan jumlah penduduk yang mengenyam

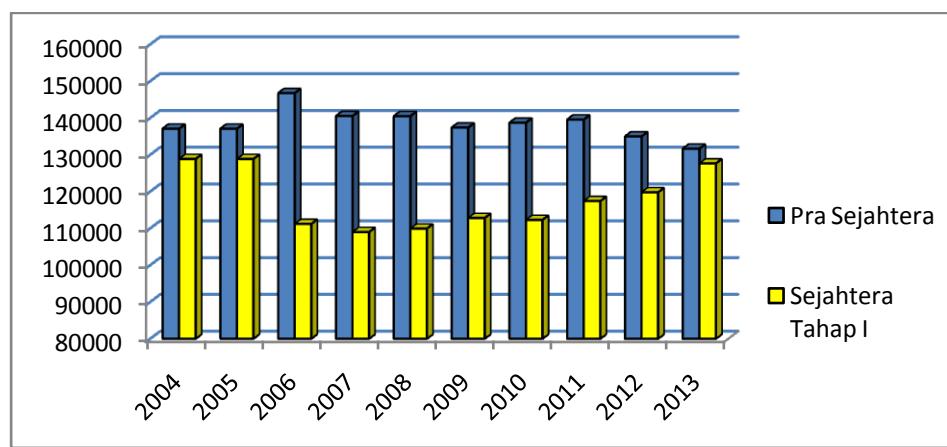
pendidikan tinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tinggi. Namun lain halnya dengan Kecamatan Kampung Laut, jumlah keseluruhan penduduk yang mengenyam pendidikan SMA dan perguruan tinggi justru mengalami penurunan.

Jumlah penduduk terbanyak yang mengenyam pendidikan tinggi terdapat di Kecamatan Cilacap Selatan, yang menunjukkan bahwa sebesar 32.38% penduduk Kecamatan Cilacap Selatan mengenyam pendidikan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

## **6. Jumlah Keluarga menurut Tingkat Kesejahteraan**

Dalam penelitian ini jumlah keluarga menurut tingkat kesejahteraan adalah jumlah keluarga pada tingkat prasejahtera dan tingkat sejahtera tahap I. Dimana, tingkat prasejahtera dan sejahtera tahap I merupakan kelompok keluarga sangat miskin dan miskin.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cilacap terlihat menunjukkan hasil yang positif terlihat dari Gambar 8.



Sumber: BPS Kabupaten Cilacap

**Gambar 8. Perkembangan Jumlah Penduduk Prasejahtera dan Tingkat Sejahtera Tahap I di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013**

Berdasarkan Gambar 8, menunjukan tingkat keluarga sangat miskin berangsur mengalami penurunan. Namun pada kelompok keluarga sejahtera tahap I atau keluarga miskin dari pada tahun 2006 mengalami penurunan dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan dan berangsur meningkat hingga tahun 2013. Dari hal tersebut menunjukan bahwa, di Kabupaten Cilacap upaya pengurangan tingkat kemiskinan pada kelompok keluarga prasejahtera (kategori keluarga sangat miskin) namun disertai pula bertambahnya tingkat kemiskinan dari kelompok keluarga sejahtera tahap I (kategori keluarga miskin).

Sedangkan tingkat keluarga miskin pada masing-masing kecamatan dapat terlihat dalam Tabel 12. Berdasakan Tabel 12, menunjukan dari tahun ke tahun pada tiap kecamatan tingkat keluarga miskin mulai berangsur menurun. Masih banyak kecamatan yang memiliki persentase keluarga miskin diatas 30%, seperti Kecamatan Kedungreja sebanyak 42.59% penduduknya masih tergolong keluarga miskin. Dan kecamatan dengan jumlah keluarga miskin yang terendah adalah Kecamatan Cilacap Utara. Kecamatan Cilacap utara dari tahun 2004 hingga 2013 memiliki tingkat keluarga miskin yang terendah di Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2013 tingkat keluarga miskin di Kecamatan Cilacap Selatan sebesar 7.92%. Lain halnya dengan Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Tengah dari tahun 2004 hingga tahun 2013 tingkat keluarga miskin justru berangsur mengalami peningkatan.

**Tabel 12. Persentase Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Tingkat Keluarga Sejahtera dan Sejahtera Tahap I di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013 (%)**

No	Kecamatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Daeyuhluhur	18.82	18.82	25.32	24.63	24.61	24.16	23.65	23.36	23.18	22.97
2	Wanareja	34.15	34.15	28.43	30.74	27.87	26.47	25.49	24.36	24.36	22.81
3	Majenang	28.91	28.91	30.81	37.39	37.19	32.55	31.79	30.37	26.47	25.59
4	Cimanggu	28.59	28.59	27.53	27.71	27.38	26.65	27.34	26.49	26.46	25.73
5	Karangpucung	40.04	40.04	42.87	40.28	40.22	35.67	37.12	36.08	34.44	31.61
6	Cipari	48.00	48.00	48.15	42.79	39.49	40.07	37.71	35.37	33.61	33.51
7	Sidareja	40.94	40.94	42.16	36.51	36.75	36.62	40.80	38.10	36.68	35.98
8	Kedungreja	38.09	38.09	45.00	42.94	45.23	45.21	44.90	44.75	44.88	42.59
9	Patimuan	37.05	37.05	36.59	29.13	29.88	29.30	26.28	27.09	27.09	21.36
10	Gandrungmangu	48.57	48.57	45.51	44.99	44.42	38.84	42.09	51.16	38.47	33.68
11	Bantarsari	45.27	45.27	40.72	40.18	39.96	37.57	39.34	39.69	37.67	36.80
12	Kawungaten	50.60	50.60	59.82	46.86	46.73	47.87	47.03	38.70	36.11	35.67
13	Kampung Laut	41.35	41.35	37.52	37.28	35.37	33.69	30.94	30.38	29.58	27.02
14	Jeruk Legi	30.55	30.55	30.16	31.04	29.72	31.14	31.25	33.26	33.36	35.23
15	Kesugihan	24.37	24.37	25.64	26.70	25.66	28.48	22.09	22.49	20.93	18.13
16	Adipala	19.08	19.08	19.94	23.97	23.52	23.66	21.87	21.35	21.09	20.84
17	Maos	24.45	24.45	24.32	19.76	19.99	16.91	17.97	15.69	15.36	15.40
18	Sampang	25.70	25.70	29.23	21.61	23.16	20.26	22.33	22.79	21.99	21.80
19	Kroya	19.16	19.16	30.81	29.20	28.86	28.61	24.14	23.38	22.98	22.37
20	Binangun	35.14	35.14	33.21	25.15	24.32	24.84	22.12	21.34	21.10	21.30
21	Nusawungu	47.57	47.57	39.16	30.44	31.66	33.29	34.32	33.35	33.35	31.34
22	Cilacap Selatan	13.46	13.46	22.11	19.79	20.59	22.78	21.57	20.72	19.98	19.38
23	Cilacap Tengah	9.02	9.02	11.69	13.12	13.22	14.27	14.26	13.77	12.14	12.09
24	Cilacap Utara	6.26	6.26	9.69	11.02	10.36	10.44	9.14	8.66	8.19	7.92

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap (data diolah)

## 7. Pertumbuhan Penduduk Migrasi

Pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penduduk migrasi, yang merupakan pertumbuhan penduduk akibat pengaruh migrasi penduduk yang masuk dan migrasi penduduk yang keluar.

Dan pertambahan penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Cilacap terlihat dalam Tabel 13.

**Tabel 13. Pertambahan Penduduk Migrasi Tiap Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013.**

No	Kecamatan	Migrasi Penduduk Masuk	Migrasi Penduduk Keluar	Pertambahan Penduduk Migrasi	Pertumbuhan
1	Daeyuhluhur	150	74	76	0.15
2	Wanareja	178	395	-217	-0.22
3	Majenang	1013	1131	-118	-0.09
4	Cimanggu	368	908	-540	-0.55
5	Karangpucung	519	604	-85	-0.12
6	Cipari	284	473	-189	-0.30
7	Sidareja	225	366	-141	-0.25
8	Kedungreja	472	674	-202	-0.25
9	Patimuan	204	226	-22	-0.05
10	Gandrungmangu	1769	1064	705	0.67
11	Bantarsari	855	913	-58	-0.08
12	Kawungaten	555	844	-289	-0.36
13	Kampung Laut	132	133	-1	-0.01
14	Jeruk Legi	665	556	109	0.17
15	Kesugihan	661	992	-331	-0.34
16	Adipala	1048	1412	-364	-0.46
17	Maos	474	1191	-717	-1.51
18	Sampang	171	387	-216	-0.58
19	Kroya	992	1341	-349	-0.34
20	Binangun	319	350	-31	-0.05
21	Nusawungu	816	773	43	0.06
22	Cilacap Selatan	1556	2387	-831	-1.06
23	Cilacap Tengah	1411	2236	-825	-0.98
24	Cilacap Utara	1625	1533	92	0.13

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap

Berdasarkan Tabel 13, menunjukkan pertambahan penduduk migrasi terbanyak berada di Kecamatan Gandrungmangu. Pertambahan penduduk bernilai negatif menunjukan bahwa migrasi penduduk yang keluar lebih banyak dibandingkan migrasi penduduk yang datang. Dan pertambahan penduduk migrasi keluar yang terbanyak berada di Kecamatan Cilacap Selatan.

## B. Analisis Data

### 1. Perkembangan dan Tingkat Kemajuan Pembangunan Ekonomi tiap Kecamatan

Melalui perhitungan Tipologi Klassen, perkembangan dan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap dapat diketahui.

**Tabel 14. Perhitungan Tipologi Klassen Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013**

No	Kecamatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Daeyuhluhur	I	I	II							
2	Wanareja	I	I	I	II	I	II	II	II	II	II
3	Majenang	I	II	II	I	I	II	I	I	I	I
4	Cimanggu	IV	I	I	II						
5	Karangpucung	III	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	IV
6	Cipari	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV
7	Sidareja	I	II	I	I	II	I	II	I	II	I
8	Kedungreja	III	IV	III	III	III	III	III	IV	III	III
9	Patimuan	IV	IV	III	IV	III	III	III	IV	IV	IV
10	Gandrungrmangu	IV	IV	III	III	III	IV	III	IV	IV	IV
11	Bantarsari	IV									
12	Kawungaten	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	III	IV	IV
13	Kampung Laut				IV	III	IV	IV	IV	IV	IV
14	Jeruk Legi	II	I	I	II						
15	Kesugihan	IV	I	IV	IV	I	I	I	II	II	I
16	Adipala	III	IV								
17	Maos	II	I	I	I	II	I	I	II	II	I
18	Sampang	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Kroya	IV	III								
20	Binangun	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV
21	Nusawungu	IV	III	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV
22	Cilacap Selatan	I	II	I	I	II	II	I	I	I	I
23	Cilacap Tengah	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Cilacap Utara	II	I	I	I	I	II	I	I	I	I

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap (data diolah)

Berdasarkan Tabel 14. Menunjukan perkembangan dan tingkat kemajuan kecamatan di Kabupaten Cilacap tahun 2004-2013. Pengelompokan kecamatan terbagi menjadi empat kuadran yaitu kecamatan yang tergolong daerah maju (Kuadran I), daerah maju tapi tertekan (Kuadran II), daerah berkembang (Kuadran III) dan daerah tertinggal (Kuadran IV). Dan pengelompokan kemajuan perekonomian tiap-tiap kecamatan didasarkan pada tingkat PDRB perkapita serta laju pertumbuhan ekonomi.

Melalui perhitungan Tipologi Klassen diperoleh pengelompokan kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan dengan perkembangan pembangunan ekonomi yang stabil dalam tipologi yang sama selama 10 tahun pengamatan.
  - 1) Kecamatan Sampang pada kuadran I. Kuadran I merupakan pengelompokan kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata kecamatan di Kabupaten Cilacap.
  - 2) Kecamatan Bantarsari pada kuadran IV. Kuadran IV merupakan pengelompokan kecamatan yang relatif tertinggal, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di Kabupaten Cilacap.
- b. Kecamatan dengan perkembangan pemabngunan ekonomi yang tidak stabil atau berfluktuasi selama 10 tahun pengamatan.
  - 1) Perkembangan kecamatan yang berfluktuasi positif

- a) Kecamatan Majenang, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Cilacap Selatan, mengalami fluktuasi positif dari kecamatan maju menjadi kecamatan maju tapi tertekan dan kembali menjadi kecamatan maju.
  - b) Kecamatan Kedungreja mengalami fluktuasi positif dari kecamatan berkembang menjadi kecamatan tertinggal dan kembali menjadi kecamatan berkembang.
- 2) Perkembangan kecamatan yang berfluktuasi negatif
- a) Kecamatan Jeruk Legi mengalami fluktuasi negatif dari kecamatan maju tertekan menjadi kecamatan maju dan kembali menjadi kecamatan maju tapi tertekan.
  - b) Kecamatan Cipari, Kecamatan Patimuan, Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Kampung Laut, Kecamatan Bingangun, Kecamatan Nusawungu mengalami fluktuasi negatif dari kecamatan tertinggal menjadi kecamatan berkembang dan kembali menjadi kecamatan tertinggal.
  - c. Kecamatan yang mengalami peningkatan perkembangan pembangunan ekonomi selama 10 tahun pengamatan.
- 1) Kecamatan Kesugihan mengalami kemajuan dari kecamatan tertinggal menjadi kecamatan maju.

- 2) Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Maos, mengalami kemajuan dari kecamatan maju tapi tertekan menjadi kecamatan maju.
- 3) Kecamatan Cimanggu mengalami kemajuan dari kecamatan tertinggal menjadi kecamatan maju tapi tertekan.
- 4) Kecamatan Kroya mengalami kemajuan dari kecamatan tertinggal menjadi kecamatan berkembang.
- d. Kecamatan yang mengalami kemunduran perkembangan pembangunan ekonomi selama 10 tahun pengamatan.
- 1) Kecamatan Daeyuhluhur, Kecamatan Wanareja mengalami kemunduran dari kecamatan maju menjadi kecamatan maju tapi tertekan.
  - 2) Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Adipala mengalami kemunduran dari kecamatan berkembang menjadi kecamatan relatif tertinggal.
- Dari hasil pengelompokan kecamatan berdasarkan perkembangan dan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap tahun 2004-2013, banyaknya kecamatan yang tergolong kecamatan maju berjumlah 8 kecamatan, kecamatan berkembang berjumlah 2 kecamatan, kecamatan relatif tertinggal berjumlah 10 kecamatan dan kecamatan maju tetapi tertekan berjumlah 4 kecamatan. Sehingga diketahui bahwa pada tahun 2004 hingga 2013 di

Kabupaten Cilacap masih terdapat banyak kecamatan yang tergolong relatif tertinggal.

## 2. Analisis Regresi Data Panel

### f. Uji Asumsi Model Regresi Data Panel

#### 1) Uji Normalitas

Hasil pengujian dari variabel independen yang diduga bisa menjelaskan variasi besaran indeks ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Cilacap, terdapat enam variabel independen yang dilakukan pengujian menggunakan *software Stata 12.0*. Untuk uji asumsi yang pertama, untuk menguji apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak sehingga pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dapat dikatakan valid, maka dilakukan uji dengan *Skewness Kurtosis Test*. Berikut adalah hasil pengujian menggunakan uji *Skewness Kurtosis*.

**Tabel 15. Uji Normalitas**

Skewness/Kurtosis tests for Normality					
Variabel	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	Adj chi2(2)	Prob>chi2
resid	237	0.4750	0.0210	5.75	0.0562

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Tabel 15, hasil uji normalitas menunjukkan nilai Prob>chi2 sebesar 0.0562. Apabila nilai Prod>chi2 lebih besar dari  $\alpha = 0.05$  berarti data berdistribusi normal. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Prob>chi2 lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ ,

yang menunjukkan bahwa dalam model regresi data panel data berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Setelah dinyatakan data berdistribusi normal, pengujian selanjutnya adalah uji asumsi multikolinear. Dari hasil regresi terdapat variabel independen yang terdeteksi masalah *omitted (collinearity)*. Untuk itu, dalam mengatasi adanya masalah multikolinearitas, variabel yang mengalami *collinearity* atau variabel yang memiliki nilai korelasi antar variabel lebih dari 0,75 layak dikeluarkan dari model persamaan. Berdasarkan hasil uji menggunakan *Pearson Correlation*, dapat diketahui besarnya nilai korelasi sebagai berikut.

**Tabel 16. Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas dengan Pearson Correlation**

	Pearson Correlation					
	x1	x2	x3	x4	x5	x6
x1	1.0000 237					
x2	-0.8023* 0.0000 237	1.0000 237				
x3	-0.9253* 0.0000 237	0.5159* 0.0000 237	1.0000 237			
x4	0.0569 0.3835 237	0.0104 0.8732 237	-0.0882 0.1758 237	1.0000 237		
x5	-0.1177 0.0705 237	-0.0259 0.6916 237	0.1853* 0.0042 237	-0.6306* 0.0000 237	1.0000 237	
x6	0.0181 0.7820 237	-0.0015 0.9821 237	-0.0269 0.6809 237	-0.1209 0.0631 237	0.1142 0.0794 237	1.0000 237

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Tabel 16, menunjukan adanya korelasi yang cukup kuat antara X1 dan X2 serta X1 dan X3, maka akan dilakukan beberapa model untuk menentukan model yang layak untuk dikeluarkan. Sedangkan untuk pemodelannya yaitu:

- Mengelurkan variabel X1 karena diduga memiliki pengaruh korelasi yang kuat antar variabel (Model 1).
- Mengeluarkan variabel X1 dan variabel X2 (Model 2).
- Mengeluarkan variabel X1 dan variabel X3 (Model 3).

Melalui analisis regresi terhadap Model 1, Model 2 dan Model 3 menggunakan *software Stata*, diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 17. Hasil Model Regresi *Pooled Least Square* dengan Mengeluarkan Variabel Independen yang Berkorelasi tinggi.**

Variabel	Model 1		Model 2		Model 3	
			Prob >	t		
X1	-		-		-	
X2	0.030		-		0.158	
X3	0.069		0.433		-	
X4	0.001		0.001		0.001	
X5	0.000		0.000		0.000	
X6	0.428		0.476		0.494	
Prob>F	0.0000		0.0000		0.0000	
Adj. R-Square	0.4366		0.4275		0.4309	

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Tabel 17, hasil dari ketiga model menunjukan Model 1 memiliki 4 variabel yang signifikan, sedangkan Model 2 dan Model 3 terdapat 3 variabel yang signifikan. Selain pemilihan melalui banyaknya variabel yang signifikan, pemilihan model regresi yang layak juga ditentukan dari besarnya tingkat

kepercayaan melalui nilai *adjusted r-square*. Dan model dengan tingkat kepercayaan yang paling tinggi adalah Model 1 dengan *adjusted r-square* sebesar 0.4366. Sehingga Model 1 layak dipilih untuk estimasi regresi data panel. Berikut adalah hasil korelasi antar variabel setelah dihilangkan variabel X1.

**Tabel 18. Hasil Uji Multikolinear setelah diatasi dengan menghilangkan variabel X1.**

	Pearson Correlation				
	x2	x3	x4	x5	x6
x2	1.0000 237				
x3	<b>0.5159*</b> 0.0000 237	1.000			
x4	<b>0.0104</b> 0.8732 237	<b>-0.0882</b> 0.1758 237	1.0000 237		
x5	<b>-0.0259</b> 0.6916 237	<b>0.1853*</b> 0.0042 237	<b>-0.6306*</b> 0.0000 237	1.0000 237	
x6	<b>0.0015</b> 0.9821 237	<b>-0.0269</b> 0.6809 237	-0.1209 0.0631 237	<b>0.1142</b> 0.0794 237	1.0000 237

Sumber: Output Stata 12.0

### 3) Uji Heterokedastisitas

Setelah lolos dari uji asumsi multikolinearitas, pengujian dilanjutkan dengan uji heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya masalah heterokedastisitas, dilakukan uji *Wald Test*. Berikut adalah hasil pengujian heterokedastisitas model *fixed effect*.

**Tabel 19. Uji Heterokedastisitas**

Chi-Square(chi2 (24)	Prob>chi2
5130.56	0.0000

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Gambar 19, menunjukkan melalui uji *Wald Test* diperoleh nilai chi-square sebesar 5130.56 dan nilai Prob>chi2 sebesar 0.0000. Hasil pengujian menunjukkan adanya masalah heterokedastisitas, dimana nilai (Prob>Chi2) kurang dari alpa (0,05). Untuk mengatasi masalah heterokedastisitas pada model regresi *Fixed Effect* masalah heterokedastisitas dapat diatasi menggunakan *Robust (Benedict: 9)*

#### 4) Uji Autokorelasi

Sedangkan untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi, dilakukan pengujian dengan uji *Wooldridge Test*. Berikut adalah hasil uji autokorelasi model *fixed effect*.

**Tabel 20. Uji Autokorelasi**

F hitung	Prob>chi2
44.158	0.0000

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Tabel 20, menunjukkan hasil F hitung sebesar 44.158 dengan (Prob>F) sebesar 0.0000. Oleh karena nilai (Prob>F) kurang dari Alpa (0.05), maka bisa dikatakan terjadi masalah autokorelasi. Sedangkan masalah autokorelasi dan heterokedastisitas, di *software Stata* 12.0 dapat mengatasi dua permasalahan dalam sekaligus. Untuk mengatasi masalah asumsi heterokedastisitas dan autokorelasi regresi data panel tak seimbang (*unbalanced panel data*), cara penyembuhan dapat dilakukan menggunakan *Feasible General Lears Square (FGLS)*.

Penggunaan FGLS ditujukan untuk meminimalisir *error* dan *residu* agar estimastor tetap efisien dan estimator mampu mendekati nilai estimates (prediksi mendekati kenyataan).

#### **g. Penentuan Teknik Estimasi Data panel**

Dari tiga model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan hasil terbaiklah yang akan digunakan dalam menganalisis. Untuk mengetahui apakah lebih baik menggunakan regresi dengan model *Pooled Least Square*, *Fixed Effect* atau regresi model *Random Effect*, maka dilakukan pengujian menggunakan Uji *F-Restricted*, Uji *Breusch Pagan Lagrangian Multiplier* (LM) Test, dan Uji *Hausman Test*.

Adapun hasil uji statistinya adalah sebagai berikut:

##### **1) Uji F *Restricted***

Uji F *Restricted* ditujukan untuk memilih antara metode *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect*. Untuk menentukan model yang dipilih, dapat dilihat besarnya nilai probabilitas F. Seperti hasil Prob>F dalam model *Fixed Effect* di Tabel 21.

**Tabel 21. Pemilihan Model *Fixed Effect***

<b>F hitung</b>	<b>Prob&gt;chi2</b>
243.97	0.0000

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Tabel 21, besarnya probabilitas F sebesar 0.0000 yang diperoleh dari regresi model *Fixed Effect*. Dari hasil nilai Prob>F yang kurang dari  $\alpha=0.05$ , menunjukan bahwa penggunaan model

regresi *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan model regresi *Pooled Least Square*.

### 2) Uji Breusch Pagan Lagrangian Multiplier (LM) Test

Uji LM ditujukan untuk memilih antara metode *Pooled Least Square* atau *Random Effect*.

**Tabel 22. Uji LM**

Chibar2	Prob>chibar2
859.78	0.0000

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Tabel 22, menunjukkan besarnya Prob>chibar2 sebesar 0.0000. Dari hasil besarnya nilai Prob>chibar2 yang kurang dari  $\alpha=0.05$ , berarti penggunaan model regresi *Random Effect* lebih baik dibandingkan model regresi *Pooled Least Square*.

### 3) Uji Hausman

Uji Hausman ditujukan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Untuk menentukan model yang dipilih, dapat dilihat besarnya nilai *probabilitas chi square*. Berikut adalah hasil uji dari uji *Hausman*.

**Tabel 23. Uji Hausman**

Chi-Square	Prob>chi2
25.93	0.0001

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Tabel 23, menunjukkan nilai probabilitas chi square sebesar 0.0001. Berdasarkan kriteria apabila nilai Prob>chi2

kurang dari  $\alpha = 0.05$ , diperoleh hasil pemilihan model regresi *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan model regresi *Random Effect*.

Dengan demikian, model yang sesuai dengan karakteristik data berdasarkan pengujian model regresi data panel adalah model *Fixed effect*. Dan dalam mengestimasi digunakan variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep.

#### **h. Analisis Data Panel**

Analisis data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh komponen pertumbuhan *proportional shift*, komponen pertumbuhan *competitive shift*, jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan PT, jumlah keluarga miskin dan pertumbuhan penduduk migrasi terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Dalam analisis regresi data panel ini model *fixed effect* digunakan variabel *dummy* wilayah (kecamatan). Berikut adalah model data panel yang akan diestimasi.

$$\begin{aligned}
 Y_{it} = & \beta_0 + \beta_1 X2_{it} + \beta_2 X3_{it} + \beta_3 X4_{it} + \beta_4 X5_{it} + \beta_5 X6_{it} + \beta_6 D_1 + \beta_7 D_2 \\
 & + \beta_8 D_3 + \beta_9 D_4 + \beta_{10} D_5 + \beta_{11} D_6 + \beta_{12} D_7 + \beta_{13} D_8 + \beta_{14} D_9 + \beta_{15} D_{10} \\
 & + \beta_{16} D_{11} + \beta_{17} D_{12} + \beta_{18} D_{13} + \beta_{19} D_{14} + \beta_{20} D_{15} + \beta_{21} D_{16} + \beta_{22} D_{17} \\
 & + \beta_{23} D_{18} + \beta_{24} D_{19} + \beta_{25} D_{20} + \beta_{26} D_{21} + \beta_{27} D_{22} + \beta_{28} D_{23} + \beta_{29} D_{24} \\
 & + \varepsilon_i
 \end{aligned}$$

Dimana:

- $Y_{it}$  = variabel indeks ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan i
- $X2$  = variabel komponen pertumbuhan *proportional shift*
- $X3$  = variabel komponen pertumbuhan *competitive shift*

- X4 = variabel jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi
- X5 = variabel jumlah keluarga miskin
- X6 = variabel pertumbuhan penduduk migrasi
- D<sub>1</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Daeuyuhluhur
- D<sub>2</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Wanareja
- D<sub>3</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Majenang
- D<sub>4</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Cimanggu
- D<sub>5</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Karangpucung
- D<sub>6</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Cipari
- D<sub>7</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Sidareja
- D<sub>8</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Kedungreja
- D<sub>9</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Patimuan
- D<sub>10</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Gandrungmangu
- D<sub>11</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Bantarsari
- D<sub>12</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Kawungaten
- D<sub>13</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Kampung Laut
- D<sub>14</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Jeruk Legi
- D<sub>15</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Kesugihan
- D<sub>16</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Adipala
- D<sub>17</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Maos
- D<sub>18</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Sampang
- D<sub>19</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Kroya
- D<sub>20</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Binangun
- D<sub>21</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Nusawungu
- D<sub>22</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Cilacap Selatan
- D<sub>23</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Cilacap Tengah
- D<sub>24</sub> = variabel *dummy* Kecamatan Cilacap Utara

Dalam mengestimasi model *fixed effect* dengan *dummy* variabel, variabel *dummy* (D<sub>1</sub>) dikelurkan dari estimasi.

Dikeluarkannya variabel  $D_1$  ditujukan untuk menghindari multikolinear sempurna. Berikut adalah hasil estimasi model *fixed effect* dengan *dummy* variabel.

**Tabel 24. Hasil Estimasi Model *Fixed Effect* dengan *dummy* variabel.**

Variabel <i>dummy wilayah</i>	Coefisien	Variabel	Coefisien
2_Wanareja	-0.373066***	Variabel Y	0.8892315
3_Majenang	-0.3966367***	Variabel X2	-0.0000386
4_Cimanggu	-0.4386201***	Variabel X3	0.0001646***
5_Karangpucung	-0.5223763***	Variabel X4	0.0023003*
6_Cipari	-0.4211556***	Variabel X5	-0.0020094***
7_Sidareja	-0.125455***	Variabel X6	-0.0019012
8_Kedungreja	-0.6702625***	<b>Standar Error</b>	<b>0.0319267</b>
9_Patimuan	-0.5835019***	<b>R-squared</b>	<b>0.9803</b>
10_Gandrungmangu	-0.6758728***	<b>Adj R-Squared</b>	<b>0.9776</b>
11_Bantarsari	-0.6749862***	<b>Prob&gt;F</b>	<b>0.000</b>
12_Kawungaten	-0.6128853***	<b>F hitung</b>	<b>369.48</b>
13_Kampung Laut	-0.507143***		
14_Jeruk Legi	-0.1337856***		
15_Kesugihan	-0.4602597***		
16_Adipala	-0.5283038***		
17_Maos	-0.1824504***		
18_Sampang	-0.0019182		
19_Kroya	-0.5558472***		
20_Binangun	-0.5043132***		
21_Nusawungu	-0.542942***		
22_Cilacap Selatan	0.1292917***		
23_Cilacap Tengah	-0.4370111***		
24_Cilacap Utara	0.1306409***		

Sumber: Output Stata 12.0

Keterangan: \*\*\* signifikan pada 1%; \*\* signifikan pada 5%; \* signifikan pada 10%

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik diperoleh hasil adanya permasalahan asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi seperti yang terlampir di Tabel 19 dan Tabel 20 pada uraian sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi pada data panel tidak seimbang

(*unbalance panel*) maka digunakan regresi model *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS). Berikut adalah hasil estimasi menggunakan FGLS.

**Tabel 25. Data Panel Model Fixed Effect dengan Feasibel Generalized Least Square (FGLS).**

Variabel	Coefisien	Std. Error	z	P >  z
Y	0.8892315	0.0299097	29.73	0.000
X2	-0.0000386	0.0000681	-0.57	0.571
X3	0.0001646	0.0000424	3.89	0.000
X4	0.0023003	0.0012694	1.81	0.070
X5	-0.0020094	0.0005778	-3.48	0.001
X6	-0.0019012	0.0031319	-0.61	0.544

Sumber: Output Stata 12.0

### i. Uji Signifikansi Model Regresi Data panel

#### 1) Uji Signifikansi Individual (Uji statistik t)

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual signifikan terhadap variabel dependen, maka dapat dilihat dari hasil Prob z-stat sebagai berikut.

**Tabel 26. Uji Signifikansi Individual/Uji t**

	Coefisien	Standar Error	z	P> z
Y	0.8892315	0.0299097	29.73	0.000
X2	-0.0000386	0.0000681	-0.57	0.571
X3	0.0001646	0.0000424	3.89	0.000
X4	0.0023003	0.0012694	1.81	0.070
X5	-0.0020094	0.0005778	-3.48	0.001
X6	-0.0019012	0.0031319	-0.61	0.544

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Tabel 26, variabel yang signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan yaitu variabel *Competitive shift* (X3) dan variabel jumlah keluarga miskin (X5) pada taraf signifikansi 0.01 serta variabel jumlah penduduk

dengan pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi (X4) signifikan pada taraf 0.10. Sedangkan variabel komponen pertumbuhan *proposisional shift* (X2) dan variabel pertumbuhan penduduk migrasi X6 tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan ekonomi (Y).

## 2) Uji Signifikansi secara Keseluruhan (Uji Statistik F)

Untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka digunakan uji F. Di *software stata* untuk melihat apakah model regresi dapat digunakan atau tidak, apabila hasil Prob Fstat lebih kecil dari  $\alpha=0.05$ , maka model regresi dapat digunakan. Berikut adalah besarnya Prob Fstat setelah dilakukan estimasi regresi data panel.

**Tabel 27. Uji Statistik F**

Regretion Fixed Effect with Dummy Variabel	
Prob > F	0.0000
F Statistik	369.48
R-Squared	0.9803
Adj R-Squared	0.9776

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Tabel 27, menunjukan besarnya F statistik dengan *dummy* variabel sebesar 369.48 dan nilai probability F sebesar 0.0000. Oleh karena nilai Prob>F lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$ , maka dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Seperti hasil koefisien determinasi pada Tabel 28 dengan variabel *dummy*. Berdasarkan Tabel 28. Menunjukan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.9776, yang berarti bahwa perubahan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan 97.76% dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan *competitive shift*, jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan PT, dan jumlah keluarga miskin. Sedangkan 2.24% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel penelitian.

**Tabel 28. Uji Koefisien Determinasi**

Regretion Fixed Effect with Dummy Variabel	
Prob > F	0.0000
F Statistik	386.92
Error Correlated	0.5493
R-Squared	0.9803
Adj R-Squared	0.9776

Sumber : Output Stata 12.0

#### j. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 1) Komponen Pertumbuhan Ekonomi (*Proportional Shift*)

Variabel X2 atau *proporsional shift* merupakan komponen pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Besarnya koefisien variabel X2 adalah -0.000038 menunjukan bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi dari komponen pertumbuhan *proporsional shift* mampu menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 0.000038%. Namun

karena besarnya nilai probabilitas dari komponen pertumbuhan *proporsional shift* adalah 0.571, menunjukan nilai  $p > |z|$  lebih besar dari  $\alpha=0.05$  berarti bahwa komponen pertumbuhan *proporsional shift* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Dari hasil statistik di atas untuk menjelaskan hasil regresi yang tidak signifikan adalah adanya dugaan korelasi yang kuat antara variabel komponen pertumbuhan *competitive shift* dan *proporsional shift* atau terjadi masalah asumsi autokorelasi sehingga variabel tidak signifikan.

Berdasarkan teori Neo Klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan produksinya, namun hal itu juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Sedangkan modal serta tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar.

Alasan lain yang menyebabkan variabel *proporsional shift* tidak signifikan adalah pada tiap-tiap kecamatan sama-sama memiliki potensi atau keunggulan ekonomi yang dapat dikembangkan. Sehingga pertumbuhan ekonomi dari faktor *proporsional shift* kurang signifikan terhadap ketimpangan

pembangunan ekonomi jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi dari komponen pertumbuhan *competitive shift*.

## 2) Komponen Pertumbuhan Ekonomi (*Competitive Shift*)

Variabel X3 atau *Competitive shift* merupakan komponen pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif, yang mampu mendorong pertumbuhan ekspor daerah bersangkutan. Besarnya nilai probabilitas variabel X3 adalah 0.000, oleh karena nilai  $P > |z|$  kurang dari  $\alpha=0.05$  menunjukkan bahwa komponen pertumbuhan *competitive shift* berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Besarnya koefisien variabel X3 adalah 0.00016 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi dari komponen pertumbuhan *competitive shift* akan menaikkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 0.00016%

Dari hasil statistik di atas, sesuai dengan teori pertumbuhan *regional base* yang menyatakan bahwa suatu daerah tidak harus menjadi daerah industri untuk tumbuh dengan cepat, sebab faktor penentu pertumbuhan adalah keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Selanjutnya daerah yang mampu menciptakan dan memanfaatkan keuntungan kompetitif menjadi kekuatan basis ekspor akan dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonominya, sehingga daerah tersebut akan tumbuh lebih cepat dari daerah lainnya, sehingga ketimpanganpun semakin melebar.

Sehingga dapat diketahui bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang berasal dari keuntungan kompetitif dalam tiap-tiap kecamatan dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan.

### **3) Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan jenjang SMA dan Perguruan Tinggi**

Variabel X4 atau variabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan tinggi merupakan sejumlah penduduk baik yang sudah menamatkan pendidikan jenjang SMA dan Perguruan Tinggi atau sejumlah penduduk yang sedang mengenyam pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Besarnya nilai probabilitas variabel X4 adalah 0.070 menunjukan bahwa varaiabel X4 berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada taraf signifikansi 0.10. Besarnya koefisien variabel X4 adalah 0.0023 yang menunjukan bahwa setiap kenaikan 1% jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi mampu menaikan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 0.0023%.

Dari hasil statistik di atas, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Dawon Holland (2013) terkait hubungan antar lulusan perguruan tinggi dan pertumbuhan ekonomi antar negara. Hasil studi menunjukan bahwa kenaikan 1 % dalam pangsa tenaga

kerja dengan pendidikan universitas telah menaikan tingkat produktivitas 0.2-0.5 persen dalam jangka panjang.

Sehingga diketahui bahwa semakin banyak jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi pada suatu kecamatan akan dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dikarenakan penduduk dengan pendidikan taraf yang lebih tinggi memberi kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia berkualitas, penguasaan, pengembangan sains dan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi (Mohammad Ali,2009).

Selain itu sejumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan atau yang masih menempuh pendidikan secara tidak langsung mempengaruhi daya beli. Sedangkan daya beli masyarakat menunjukkan cerminan besarnya pendapatan perkapita daerah. Semakin tinggi pendapatan perkapita menunjukkan tingkat kemakmuran daerah atau kecamatan semakin baik. Bagi sejumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMA dan Perguruan Tinggi daya beli dapat terpengaruh oleh *income* sebagai hasil produktivitas yang tinggi, sedangkan yang masih menempuh pendidikan daya beli dipengaruhi oleh kebutuhan yang lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk yang menempuh pendidikan dibawahnya.

#### **4) Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Tingkatan Keluarga Sejahtera**

Besarnya probabilitas variabel X5 atau jumlah keluarga miskin adalah 0.001, oleh karena nilai  $p > |z|$  kurang dari  $\alpha=0.05$  menunjukkan jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi dengan taraf signifikansi 0.01. Besarnya nilai koefisien adalah -0.002 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% jumlah keluarga miskin menyebabkan menurunnya tingkat ketimpangan pembangunan sebesar 0.02%.

Dari hasil statistik, tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Linggar (2011), yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa banyaknya jumlah keluarga miskin yang terdapat di wilayah kecamatan tidak tercermin dari besaran tingkat ketimpangan ekonomi daerah tersebut. Sehingga antara jumlah keluarga miskin dan tingkat ketimpangan di Kabupaten Cilacap adalah saling berlawanan. Hal tersebut dikarenakan, hampir sebagian jumlah keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Cilacap tergolong dalam keluarga miskin. Apabila jumlah keluarga miskin semakin bertambah berarti menunjukkan penurunan terhadap gap diantara

keluarga sejahtera dan keluarga miskin yang menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi menurun.

### 5) Pertumbuhan Penduduk Migrasi

Variabel X6 atau pertumbuhan penduduk migrasi merupakan pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor migrasi keluar dan migrasi masuk pada masing-masing kecamatan. Hasil regresi menunjukkan besarnya koefisien variabel pertumbuhan penduduk migrasi adalah -0.0019 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan penduduk migrasi mampu menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 0.0019%. Namun karena nilai probabilitas variabel pertumbuhan penduduk migrasi sebesar 0.544, menunjukkan nilai  $p > |z|$  lebih besar dari  $\alpha=0.05$  yang berarti bahwa pertumbuhan penduduk migrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Dari hasil statistik, tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Barika (2012), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Bengkulu.

Meskipun secara umum, bertambahnya jumlah penduduk yang terdapat dalam suatu daerah dapat menciptakan kebutuhan akan barang dan jasa. Namun pertambahan penduduk migrasi yang masuk di suatu wilayah atau kecamatan justu mengurangi peluang

penduduk setempat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Selain itu migrasi penduduk yang keluar justru lebih banyak dibandingkan migrasi penduduk yang masuk. Sehingga pertambahan penduduk pada tiap-tiap kecamatan belum secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Untuk mengetahui variansi ketimpangan pembangunan ekonomi pada tiap-tiap kecamatan, dapat dilihat melalui hasil koefisien antar kecamatan di Tabel 29.

**Tabel 29. Variansi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Cilacap.**

No.	Kecamatan	Coefisien
1	Daeyuhluhur	0.8900728
2	Wanareja	0.5177821
3	Majenang	0.4943087
4	Cimanggu	0.4528654
5	Karangpucung	0.3688711
6	Cipari	0.469952
7	Sidareja	0.7653462
8	Kedungreja	0.2212576
9	Patimuan	0.3070505
10	Gandrungmangu	0.2148792
11	Bantarsari	0.2158045
12	Kawungaten	0.2780724
13	Kampung Laut	0.3770688
14	Jeruk Legi	0.7561724
15	Kesugihan	0.4307201
16	Adipala	0.3626373
17	Maos	0.7080777
18	Sampang	0.8888064
19	Kroya	0.3349998
20	Binangun	0.3861817
21	Nusawungu	0.3478321
22	Cilacap Selatan	1.020881
23	Cilacap Tengah	0.4539534
24	Cilacap Utara	1.019067

Sumber: Output Stata 12.0

Berdasarkan Tabel 29, menunjukan bahwa variansi dari masing-masing intersep kecamatan sangat heterogen. Intersep tertinggi yaitu Kecamatan Cilacap Selatan dengan koefisien sebesar 1.019067, sedangkan intersep terendah yaitu Kecamatan Gandrungmangu dengan koefisien sebesar 0.2148792. Dari hasil koefisien regresi antar kecamatan, menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Cilacap sangat bervariasi atau heterogen. Hal tersebut memberi pengertian bahwa komponen pertumbuhan dari *competitive sift*, jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi, dan jumlah keluarga miskin mampu mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan selama periode pengamatan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan kemajuan perekonomian tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2004 hingga 2013, menunjukan bahwa tidak semua kecamatan mengalami pertumbuhan yang positif. Terdapat 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap mengalami perkembangan yang berfluktuasi negatif dan mengalami kemunduran menjadi daerah yang relatif tertinggal. Bahkan terdapat kecamatan yang mengalami perkembangan perekonomian tetap selama tahun pengamatan menjadi daerah relatif tertinggal.
2. Variabel komponen pertumbuhan *regional share* dikeluarkan dari model estimasi data panel, sebab memiliki korelasi yang tinggi terhadap variabel lainnya.
3. Variabel komponen pertumbuhan *proporsional shift*, tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dikarenakan pada tiap-tiap kecamatan sama-sama memiliki potensi atau keunggulan ekonomi yang dapat dikembangkan. Sehingga pertumbuhan ekonomi dari faktor

*proporsional shift* kurang signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi jika dibandingkan signifikansi dari komponen pertumbuhan *competitive shift*.

4. Variabel komponen pertumbuhan *competitive shift* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan. Hal tersebut dikarenakan daerah atau kecamatan yang mampu menciptakan dan memanfaatkan keuntungan kompetitif menjadi kekuatan basis ekspor akan dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonominya, sehingga daerah tersebut akan tumbuh lebih cepat dari daerah lainnya, sehingga ketimpangan pembangunan ekonomi semakin melebar.
5. Variabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan SMA dan perguruan tinggi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk dengan pendidikan taraf yang lebih tinggi secara tidak langsung mempengaruhi daya beli. Sedangkan daya beli masyarakat menunjukkan cerminan besarnya pendapatan perkapita daerah. Semakin tinggi pendapatan perkapita menunjukkan tingkat kemakmuran daerah atau kecamatan semakin baik. Bagi sejumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMA dan Perguruan Tinggi daya beli dapat terpengaruhi oleh *income* sebagai hasil produktivitas yang tinggi, sedangkan yang masih menempuh pendidikan daya beli dipengaruhi oleh kebutuhan yang lebih besar jika

dibandingkan dengan penduduk yang menempuh pendidikan dibawahnya.

6. Variabel jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dikarenakan, hampir sebagian jumlah keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Cilacap merupakan keluarga miskin. Apabila jumlah keluarga miskin semakin bertambah berarti menunjukan penurunan terhadap gap diantara keluarga sejahtera dan keluarga miskin, sehingga ketimpangan pun akan menurun.
7. Variabel pertumbuhan penduduk migrasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dikarenakan pertambahan penduduk migrasi dengan migrasi penduduk yang keluar justru lebih banyak dibandingkan migrasi penduduk yang masuk. Sehingga pertambahan penduduk yang terjadi belum dapat menciptakan kebutuhan akan barang dan jasa yang mempengaruhi tingkat perekonomian di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap.

## **B. Rekomendasi Kebijakan**

1. Upaya untuk meningkatkan iklim perekonomian perlu ditingkatkan terutama untuk kecamatan yang tergolong relatif tertinggal, seperti mendorong pertumbuhan sektor industri dan sektor perdagangan, hotel serta restoran yang memang berkontribusi besar terhadap PDRB dan laju pertumbuhan Kabupaten Cilacap.

2. Dibutuhkan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan serta informasi yang mendukung, karena pertumbuhan ekonomi akibat adanya keunggulan kompetitif tidak semua kecamatan memilikinya.
3. Diperlukan program pendidikan dan fasilitas dalam mendukung pendidikan terutama penduduk yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan tinggi dan juga diperlukan kerjasama masyarakat dalam menyadari pentingnya pendidikan tinggi.
4. Diperlukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan terutama golongan keluarga yang sangat miskin, dengan pemenuhan indikator-indikator penetu kesejahteraan tertentu yang secara umum dapat diatasi melalui kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

### C. Saran

1. Untuk kesempurnaan hasil penelitian dan informasi dari variabel penelitian yang dihilangkan dari model, diperlukan penelitian lanjutan dan cara khusus lainnya untuk memperoleh informasi yang lebih akurat.
2. Variabel jumlah keluarga miskin yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga. Penulis memberikan saran dalam penelitian lajutan dalam mengukur tingkat kemiskinan dapat digunakan angka kemiskinan yang disurvei dari BPS.
3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel dari sisi ekonomi dan sosial. Berkaitan dengan ketimpangan pembangunan ekonomi

dapat dikaitkan dengan variabel lainnya seperti alokasi dana pembangunan, investasi daerah dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Kurniati. 2007. Industrialisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Sektor di Kota Cilacap (Studi Kasus: Industri Besar-Sedang di Kota Cilacap). Tugas Akhir. Universitas Diponegoro Semarang.
- Agung Prapsetyo. 2012. "Strategi Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Wilayah (Studi Kasus di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah)". Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Akbar Suwardi. 2011. *Stata Tahapan dan Perintah (Syntax) Data Panel*. Modul. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Barika. 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009. *Jurnal Ekonomi dan perencanaan Pembangunan (JEPP)* vol.04 no.03. Universitas Bengkulu.
- Basuki Rahmat. 2013. "Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 1990-2011. *Skripsi*. Universitas Hasanudin Makassar.
- Benedict J.Yappy dan Jazman Ihsanuddin. *Pelatihan Komputasi dengan Stata, Modul B-Analisis Regresi(OLS)*. Universitas Indonesia
- Budi Handayani. 2005. "Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap". *Tesis*. Eprint Universitas Diponegoro Semarang.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Een Erliana. 2014. "Pro Kontra Pemekaran Cilacap". Suara Merdeka, 24 September 2014.
- Gamawan Fauzi. 2010. *Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah*. Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Herry Darwanto. *Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah*. Diambil dari: [http://www.bappenas.go.id/files/5913/5228/1656/heri\\_20091015103733\\_2313\\_0.doc](http://www.bappenas.go.id/files/5913/5228/1656/heri_20091015103733_2313_0.doc), diakses pada 17 September 2014
- Herwin Mopangga. 2011. Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Trikonomika* 40(1), 40-51.
- Holland, Dawn. et al. 2013. *The Relationship Between Graduates and Economic Growth Across Countries*. BIS Research Paper No.110. Diambil dari: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/229492/bis-13-858-relationship-between-graduates-and-economic-growth-across-countries.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/229492/bis-13-858-relationship-between-graduates-and-economic-growth-across-countries.pdf), diakses pada 25 November 2014.

*Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap.* 2013. Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap.

*Jhingan M.L.* 2012. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Lincoln Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Lingga Dewangga Putra.2011. “Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007”. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Mandala Harefa. *Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Ekonomi antar Wilayah.* Diambil dari: [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku\\_tim/buku-tim-16.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_tim/buku-tim-16.pdf), pada tanggal 28 Oktober 2014

Mohammad Ali. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Mudrajat Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

\_\_\_\_\_. 2010. *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

*Produk Regional Domestik Bruto Kabupaten Cilacap 2004-2014.* Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap.

*Profil Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.* 2011. Simreg Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

R.I. 2003. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara1990/1991.* Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan RI.

R.I. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara 1977/1978.* Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan RI.

R.I. *Bab 26 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rahmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Robinson Tarigan. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Sadono Sukirno. 2009. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Ekonomi Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pres
- \_\_\_\_\_. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pres
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyanto. 2011. “*Pembangunan Ekonomi Desa Kota, Kebijakan yang Bias Kota*”,dalam Maria Hartiningsih (Ed). Korupsi yang Memiskinkan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sulyianto. *Ekonometrika Terapan*. 2011. Yogyakarta: Penerbit CV.Andi
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi 1*.Yogyakarta: Penerbit Andi
- Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. 2013. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi* Edisi kesembilan Jilid 1. Devri Barnadi,dkk (Ed). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- \_\_\_\_\_.2011.*Pembangunan Ekonomi* Edisi Sebelas Jilid 1.Adi Maulama,dkk (Ed). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tulus Tambunan. 2006. ”Perkembangan Industri dan Kebijakan Industrialisasi Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Paska Krisis. Kadin Indonesia-JETRO
- Yunistri Trias Dewi. 2012. ”Analisis Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten”. *Tesis*. Universitas Indonesia.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## Lampiran 1

## DATA PENELITIAN

	<b>KECAMATAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>X5</b>	<b>X6</b>	<b>Y</b>
1	Dayeuhluhur	2004	69.35	-43.71	74.37	6.29	39.46	0.01	0.711
1	Dayeuhluhur	2005	27.69	-18.34	90.65	6.55	39.46	-0.02	0.884
1	Dayeuhluhur	2006	169.11	-80.19	11.07	6.96	40.92	-0.01	0.857
1	Dayeuhluhur	2007	93.06	34.73	-27.79	6.99	40.37	-0.05	0.861
1	Dayeuhluhur	2008	277.49	-92.51	-84.98	6.94	40.09	-0.09	0.819
1	Dayeuhluhur	2009	35.26	60.74	4.00	7.41	39.30	-0.04	0.849
1	Dayeuhluhur	2010	101.43	-1.45	0.02	9.05	38.89	-0.09	0.850
1	Dayeuhluhur	2011	198.27	-58.70	-39.57	9.05	38.38	-0.09	0.832
1	Dayeuhluhur	2012	94.79	-4.65	9.85	11.41	38.13	0.08	0.822
1	Dayeuhluhur	2013	78.52	16.23	5.25	11.64	37.75	0.15	0.822
2	Wanareja	2004	103.53	-39.28	35.74	6.15	62.72	-0.12	0.391
2	Wanareja	2005	59.07	-24.70	65.62	6.36	62.72	-0.11	0.419
2	Wanareja	2006	128.58	-32.53	3.95	6.55	51.84	-0.15	0.410
2	Wanareja	2007	63.05	33.27	3.68	6.61	56.50	-0.22	0.420
2	Wanareja	2008	95.22	-20.71	25.49	6.76	52.07	-0.18	0.421
2	Wanareja	2009	37.40	68.19	-5.59	6.71	53.66	-0.20	0.435
2	Wanareja	2010	91.22	11.04	-2.25	8.67	52.84	-0.23	0.439
2	Wanareja	2011	108.19	2.36	-10.56	8.67	52.25	-0.24	0.436
2	Wanareja	2012	128.88	37.71	-66.59	7.46	52.25	-0.09	0.430
2	Wanareja	2013	52.50	33.20	14.30	7.63	48.82	-0.22	0.440
3	Majenang	2004	100.84	-15.96	15.12	9.77	61.06	-0.09	0.410
3	Majenang	2005	347.19	-55.14	-192.05	9.79	61.06	-0.12	0.379
3	Majenang	2006	155.15	-4.92	-50.23	9.91	61.88	-0.15	0.366
3	Majenang	2007	43.83	23.09	33.09	9.30	63.86	-0.20	0.380
3	Majenang	2008	115.65	-12.41	-3.23	9.70	64.88	-0.32	0.375
3	Majenang	2009	33.42	47.14	19.43	9.66	57.97	-0.15	0.394
3	Majenang	2010	82.56	12.04	5.40	12.56	62.03	-0.09	0.399
3	Majenang	2011	76.87	12.34	10.79	12.56	58.37	-0.22	0.392
3	Majenang	2012	40.15	16.32	43.53	10.26	54.90	-0.17	0.415
3	Majenang	2013	41.53	28.89	29.59	10.32	54.79	-0.09	0.434
4	Cimanggu	2004	233.63	-63.00	-70.63	6.82	66.45	-0.08	0.300
4	Cimanggu	2005	42.66	-13.54	70.87	6.90	66.45	-0.10	0.343
4	Cimanggu	2006	116.56	-20.19	3.63	7.02	54.11	-0.13	0.339
4	Cimanggu	2007	63.11	28.20	8.69	7.14	58.03	-0.23	0.349
4	Cimanggu	2008	159.84	-28.30	-31.54	7.15	57.83	-0.30	0.340
4	Cimanggu	2009	32.45	46.14	21.42	7.56	58.10	-0.22	0.359
4	Cimanggu	2010	86.60	8.71	4.68	7.71	56.96	-0.35	0.363
4	Cimanggu	2011	96.62	2.05	1.33	7.71	57.95	-0.48	0.367

4	Cimanggu	2012	66.46	14.09	19.45	15.89	57.99	-0.62	0.381
4	Cimanggu	2013	47.51	22.48	30.02	16.00	57.04	-0.55	0.400
5	Karangpucung	2004	121.39	-58.13	36.74	5.98	75.99	-0.13	0.284
5	Karangpucung	2005	-452.56	197.92	354.64	6.11	75.99	-0.20	0.245
5	Karangpucung	2006	143.49	-44.52	1.03	6.47	69.42	-0.26	0.239
5	Karangpucung	2007	60.77	31.19	8.03	6.86	64.94	-0.21	0.244
5	Karangpucung	2008	101.02	-8.17	7.15	6.88	65.78	-0.18	0.243
5	Karangpucung	2009	29.36	65.06	5.59	6.71	61.61	-0.12	0.257
5	Karangpucung	2010	84.45	14.19	1.37	7.71	62.12	-0.22	0.261
5	Karangpucung	2011	81.24	11.52	7.23	7.71	62.87	-0.16	0.259
5	Karangpucung	2012	65.56	36.22	-1.78	8.04	60.62	-0.22	0.265
5	Karangpucung	2013	47.25	39.95	12.80	8.02	59.25	-0.12	0.274
6	Cipari	2004	634.25	-322.21	-212.05	5.92	75.02	-0.07	0.355
6	Cipari	2005	87.22	-46.40	59.18	5.95	75.02	-0.10	0.357
6	Cipari	2006	144.14	-54.00	9.86	6.09	68.86	0.03	0.345
6	Cipari	2007	75.01	29.93	-4.94	6.26	65.32	-0.10	0.349
6	Cipari	2008	197.32	-56.26	-41.06	6.26	61.98	-1.11	0.334
6	Cipari	2009	33.71	54.24	12.05	6.44	63.53	0.02	0.351
6	Cipari	2010	96.97	1.63	1.40	8.28	63.06	-0.08	0.351
6	Cipari	2011	52.91	-9.85	56.94	8.28	57.12	-0.09	0.364
6	Cipari	2012	68.33	3.50	28.17	6.59	55.31	-0.02	0.370
6	Cipari	2013	62.35	20.55	17.09	6.62	55.35	-0.30	0.377
7	Sidareja	2004	18.12	-4.52	86.39	9.38	66.50	-0.02	0.796
7	Sidareja	2005	-80.64	21.36	159.28	9.71	66.50	-0.06	0.614
7	Sidareja	2006	128.92	-7.42	-21.50	9.82	68.39	0.09	0.612
7	Sidareja	2007	57.77	40.37	1.86	9.79	57.54	0.09	0.631
7	Sidareja	2008	124.34	-19.18	-5.17	9.84	58.81	-0.04	0.623
7	Sidareja	2009	29.46	52.84	17.70	9.69	59.48	-0.12	0.655
7	Sidareja	2010	84.74	13.91	1.35	13.23	59.12	-0.08	0.664
7	Sidareja	2011	53.04	8.88	38.09	13.23	57.93	-0.21	0.685
7	Sidareja	2012	70.29	30.35	-0.64	11.74	56.94	0.65	0.699
7	Sidareja	2013	45.57	35.95	18.47	11.91	57.38	-0.25	0.727
8	Kedungreja	2004	32.53	-12.85	80.32	7.69	69.84	-0.08	0.193
8	Kedungreja	2005	-43.60	9.05	134.55	7.66	69.84	-0.05	0.079
8	Kedungreja	2006	94.63	-1.17	6.54	7.86	74.26	-0.10	0.081
8	Kedungreja	2007	48.79	32.75	18.46	8.04	69.09	-0.14	0.085
8	Kedungreja	2008	96.62	-7.47	10.85	8.05	70.36	-0.42	0.086
8	Kedungreja	2009	27.15	49.85	23.00	8.18	70.35	-0.14	0.094
8	Kedungreja	2010	78.05	17.48	4.48	10.04	69.66	-0.30	0.096
8	Kedungreja	2011	148.89	28.47	-77.37	10.04	71.35	-0.26	0.094
8	Kedungreja	2012	52.01	26.87	21.12	9.22	71.40	-0.21	0.098
8	Kedungreja	2013	40.47	35.92	23.61	9.23	67.91	-0.25	0.104

9	Patimuan	2004	-832.86	379.36	553.50	5.93	67.41	0.00	0.262
9	Patimuan	2005	-91.57	35.74	155.83	5.95	67.41	0.03	0.205
9	Patimuan	2006	106.78	-16.22	9.44	6.03	66.81	0.07	0.204
9	Patimuan	2007	62.77	43.64	-6.41	6.12	54.37	0.05	0.207
9	Patimuan	2008	102.41	-15.77	13.35	6.25	55.00	-0.12	0.205
9	Patimuan	2009	29.02	60.72	10.27	6.75	55.81	0.03	0.213
9	Patimuan	2010	83.36	15.53	1.10	6.59	52.46	0.20	0.212
9	Patimuan	2011	134.44	15.20	-49.64	6.58	55.15	0.13	0.207
9	Patimuan	2012	68.73	33.22	-1.95	7.69	55.15	-0.01	0.211
9	Patimuan	2013	47.74	41.78	10.48	7.79	46.42	-0.05	0.216
10	Gandrungmangu	2004	353.09	-153.48	-99.61	6.29	73.70	-0.11	0.134
10	Gandrungmangu	2005	-56.04	21.47	134.57	6.36	73.70	-0.14	0.084
10	Gandrungmangu	2006	115.10	-23.69	8.59	6.46	69.49	-0.16	0.083
10	Gandrungmangu	2007	57.58	38.27	4.15	8.46	74.52	-0.16	0.086
10	Gandrungmangu	2008	106.41	-15.71	9.30	8.52	73.64	-0.15	0.086
10	Gandrungmangu	2009	34.63	76.15	-10.79	8.86	68.26	-0.14	0.090
10	Gandrungmangu	2010	84.14	16.00	-0.14	8.92	67.93	-0.23	0.092
10	Gandrungmangu	2011	111.41	15.83	-27.24	8.92	76.04	-0.22	0.091
10	Gandrungmangu	2012	73.80	39.40	-13.20	16.35	68.01	1.58	0.088
10	Gandrungmangu	2013	47.09	45.30	7.61	16.54	64.25	0.67	0.092
11	Bantarsari	2004	-50.97	24.38	126.59	4.27	67.87	-0.06	0.139
11	Bantarsari	2005	-80.00	40.16	139.84	4.50	67.87	-0.06	0.104
11	Bantarsari	2006	140.70	-47.69	6.99	4.80	65.93	1.41	0.101
11	Bantarsari	2007	70.56	37.28	-7.84	4.85	61.55	-0.19	0.100
11	Bantarsari	2008	114.58	-28.83	14.25	5.00	61.98	-0.24	0.097
11	Bantarsari	2009	32.07	63.17	4.76	5.11	59.25	-0.26	0.103
11	Bantarsari	2010	94.24	9.14	-3.38	6.93	57.72	-0.46	0.103
11	Bantarsari	2011	88.34	-2.94	14.61	6.93	62.68	-0.40	0.103
11	Bantarsari	2012	77.68	21.52	0.79	5.31	57.27	-0.13	0.105
11	Bantarsari	2013	57.48	38.10	4.42	5.33	57.92	-0.08	0.108
12	Kawunganten	2004	-204.32	107.68	196.64	5.19	76.94	-0.06	0.184
12	Kawunganten	2005	-92.21	49.37	142.84	5.25	76.94	-0.13	0.141
12	Kawunganten	2006	-36.66	13.24	123.42	5.34	76.61	-0.11	0.146
12	Kawunganten	2007	74.25	37.90	-12.15	5.35	66.14	-0.20	0.149
12	Kawunganten	2008	111.70	-29.72	18.03	5.50	66.17	-0.14	0.149
12	Kawunganten	2009	32.83	62.77	4.40	5.43	72.91	-0.11	0.156
12	Kawunganten	2010	94.42	6.16	-0.58	8.62	71.71	-0.12	0.159
12	Kawunganten	2011	58.71	-5.44	46.73	8.62	62.72	1.38	0.163
12	Kawunganten	2012	55.17	13.20	31.63	5.75	64.37	0.28	0.162
12	Kawunganten	2013	59.15	37.34	3.50	6.08	65.31	-0.36	0.168
13	Kampung laut	2007	84.70	33.84	-18.54	9.82	66.72	-0.07	0.320
13	Kampung laut	2008	90.93	-29.13	38.21	9.90	67.72	9.97	0.319

13	Kampung laut	2009	34.68	62.70	2.62	10.80	66.45	8.31	0.281
13	Kampung laut	2010	99.80	1.61	-1.41	10.76	64.77	0.34	0.245
13	Kampung laut	2011	135.27	-27.88	-7.40	10.76	64.65	-0.25	0.243
13	Kampung laut	2012	93.12	4.04	2.84	11.27	64.31	-0.11	0.244
13	Kampung laut	2013	74.16	24.03	1.81	12.03	62.56	-0.01	0.243
14	Jeruklegi	2004	255.38	-83.05	-72.33	8.08	58.05	-0.12	0.593
14	Jeruklegi	2005	45.93	-15.80	69.87	8.25	58.05	-0.09	0.661
14	Jeruklegi	2006	118.55	-19.96	1.41	8.60	54.10	0.78	0.652
14	Jeruklegi	2007	63.53	34.29	2.18	2.15	55.50	0.20	0.671
14	Jeruklegi	2008	144.80	-24.25	-20.56	2.90	52.71	-0.04	0.659
14	Jeruklegi	2009	30.13	50.26	19.60	2.74	52.62	0.10	0.672
14	Jeruklegi	2010	86.66	10.14	3.20	3.31	50.31	0.10	0.674
14	Jeruklegi	2011	116.35	2.16	-18.51	3.29	52.23	0.33	0.669
14	Jeruklegi	2012	73.75	20.63	5.62	3.33	52.76	1.06	0.652
14	Jeruklegi	2013	49.36	26.47	24.16	4.05	54.88	0.17	0.669
15	Kesugihan	2004	-249.26	22.30	326.96	10.71	54.76	0.04	0.339
15	Kesugihan	2005	99.67	-9.09	9.42	10.74	54.76	0.09	0.341
15	Kesugihan	2006	197.42	11.08	-108.50	10.83	49.78	-0.01	0.326
15	Kesugihan	2007	63.84	41.24	-5.07	8.65	47.93	0.14	0.337
15	Kesugihan	2008	116.32	-8.24	-8.08	8.89	46.48	-0.14	0.336
15	Kesugihan	2009	27.25	43.22	29.54	9.26	54.80	-0.21	0.361
15	Kesugihan	2010	78.39	16.83	4.78	11.34	43.15	-0.41	0.371
15	Kesugihan	2011	124.79	32.47	-57.26	11.33	49.13	-0.37	0.368
15	Kesugihan	2012	50.85	25.83	23.32	9.23	40.61	-0.59	0.381
15	Kesugihan	2013	38.94	32.09	28.97	8.74	53.11	-0.34	0.401
16	Adipala	2004	85.89	-30.47	44.58	8.58	52.36	-0.06	0.290
16	Adipala	2005	326.60	-100.98	-125.63	8.71	52.36	-0.04	0.269
16	Adipala	2006	94.33	-2.07	7.74	8.89	47.40	-0.08	0.267
16	Adipala	2007	57.36	38.64	4.00	10.66	48.29	-0.10	0.277
16	Adipala	2008	110.63	-13.43	2.81	10.68	46.73	-0.26	0.274
16	Adipala	2009	29.11	47.12	23.77	10.70	46.12	-0.29	0.294
16	Adipala	2010	83.64	11.66	4.70	14.78	43.18	-0.49	0.299
16	Adipala	2011	48.61	4.06	47.33	14.78	41.18	-0.30	0.311
16	Adipala	2012	54.53	19.65	25.82	10.73	40.83	-0.30	0.327
16	Adipala	2013	46.23	29.04	24.73	10.18	40.66	-0.46	0.343
17	Maos	2004	-102.14	30.88	171.25	17.10	57.68	-0.12	0.602
17	Maos	2005	65.32	-19.31	53.99	17.36	57.68	-0.15	0.623
17	Maos	2006	116.60	0.31	-16.91	17.57	45.77	0.02	0.628
17	Maos	2007	48.33	40.06	11.61	8.75	41.93	0.12	0.653
17	Maos	2008	124.69	-10.43	-14.26	8.82	42.22	0.02	0.644
17	Maos	2009	23.59	62.65	13.76	8.75	37.80	0.58	0.682
17	Maos	2010	67.72	31.26	1.02	11.71	43.96	0.06	0.701

17	Maos	2011	267.90	120.53	-288.43	11.71	39.05	1.37	0.609
17	Maos	2012	54.15	42.00	3.85	12.01	38.76	-0.88	0.628
17	Maos	2013	38.82	46.11	15.07	11.58	38.93	-1.51	0.674
18	Sampang	2004	77.67	-19.24	41.57	13.11	51.72	-0.07	0.737
18	Sampang	2005	84.88	-14.54	29.66	13.18	51.72	-0.17	0.740
18	Sampang	2006	82.01	14.66	3.33	13.04	52.71	-0.38	0.766
18	Sampang	2007	50.26	48.70	1.03	17.03	41.60	-0.02	0.797
18	Sampang	2008	95.08	-7.35	12.28	16.99	41.79	-0.28	0.805
18	Sampang	2009	26.17	53.97	19.85	15.71	36.86	-0.26	0.856
18	Sampang	2010	75.22	22.36	2.43	19.27	41.87	-0.05	0.873
18	Sampang	2011	64.71	22.28	13.01	19.27	43.76	0.10	0.895
18	Sampang	2012	47.31	32.77	19.93	17.01	44.22	-0.09	0.926
18	Sampang	2013	39.20	44.54	16.26	17.40	44.03	-0.58	0.968
19	Kroya	2004	252.95	-35.56	-117.40	12.41	48.62	-0.05	0.234
19	Kroya	2005	78.62	-14.54	35.92	12.46	48.62	-0.13	0.243
19	Kroya	2006	103.26	-0.73	-2.54	12.54	55.46	-0.07	0.241
19	Kroya	2007	49.11	37.27	13.63	13.19	50.81	-0.21	0.253
19	Kroya	2008	112.86	-11.30	-1.55	13.09	50.29	-0.24	0.252
19	Kroya	2009	25.25	50.56	24.19	14.50	52.83	-0.23	0.270
19	Kroya	2010	76.19	18.05	5.76	18.69	45.33	-0.34	0.275
19	Kroya	2011	30.40	10.36	59.24	18.70	42.96	-0.23	0.298
19	Kroya	2012	43.41	27.74	28.85	14.93	42.11	-0.35	0.317
19	Kroya	2013	40.97	42.50	16.53	14.81	41.61	-0.34	0.333
20	Binangun	2004	440.04	-165.89	-174.16	8.32	64.11	0.00	0.294
20	Binangun	2005	65.12	-25.87	60.75	8.66	64.11	0.05	0.309
20	Binangun	2006	140.47	-38.39	-2.08	8.80	62.36	0.07	0.301
20	Binangun	2007	72.08	25.94	1.98	12.64	50.90	-0.02	0.307
20	Binangun	2008	151.28	-26.76	-24.52	12.69	50.16	0.00	0.290
20	Binangun	2009	30.11	46.51	23.39	12.76	50.02	-0.03	0.306
20	Binangun	2010	86.50	8.81	4.69	17.67	45.32	0.00	0.310
20	Binangun	2011	91.11	-0.22	9.11	17.66	44.15	-0.03	0.312
20	Binangun	2012	41.41	10.36	48.24	13.77	44.46	-0.02	0.328
20	Binangun	2013	48.52	24.65	26.83	13.93	44.63	-0.05	0.340
21	Nusawungu	2004	-204.83	65.56	239.26	6.75	89.90	-0.07	0.258
21	Nusawungu	2005	101.58	-30.72	29.14	6.99	89.90	0.11	0.258
21	Nusawungu	2006	-261.43	40.86	320.57	7.11	68.50	0.11	0.224
21	Nusawungu	2007	62.15	32.73	5.12	8.85	60.11	-0.42	0.230
21	Nusawungu	2008	113.77	-15.09	1.31	9.09	61.69	0.97	0.227
21	Nusawungu	2009	29.82	48.78	21.39	10.03	64.52	-0.21	0.235
21	Nusawungu	2010	85.74	9.86	4.39	11.98	60.30	0.19	0.240
21	Nusawungu	2011	99.12	3.67	-2.79	11.98	62.37	-0.17	0.241
21	Nusawungu	2012	60.07	18.88	21.06	11.56	62.37	0.03	0.249

21	Nusawungu	2013	47.68	27.07	25.24	11.21	59.23	0.06	0.257
22	Cilacapselatan	2004	127.57	-13.81	-13.76	30.36	47.70	-0.25	0.983
22	Cilacap selatan	2005	419.91	6.41	-326.31	30.62	47.70	-0.51	0.905
22	Cilacap selatan	2006	108.64	6.38	-15.02	30.63	49.16	-0.61	0.902
22	Cilacap selatan	2007	46.59	7.37	46.04	27.41	46.92	-0.78	0.941
22	Cilacap selatan	2008	125.82	-1.64	-24.18	26.91	48.22	0.20	0.917
22	Cilacap selatan	2009	33.49	15.31	51.20	28.18	49.83	-0.83	0.959
22	Cilacap selatan	2010	82.02	2.38	15.60	33.39	49.05	-0.91	0.980
22	Cilacap selatan	2011	52.33	3.46	44.21	33.39	47.62	-0.55	1.025
22	Cilacap selatan	2012	30.54	7.88	61.57	32.82	45.61	-1.01	1.120
22	Cilacap selatan	2013	36.03	12.19	51.78	32.38	46.75	-1.06	1.188
23	Cilacap tengah	2004	199.52	-21.78	-77.74	32.03	31.18	-0.32	0.412
23	Cilacap tengah	2005	186.64	-3.05	-83.59	32.05	31.18	-0.10	0.394
23	Cilacap tengah	2006	88.71	17.59	-6.30	31.97	27.50	-0.58	0.398
23	Cilacap tengah	2007	48.12	29.41	22.47	31.68	25.66	1.28	0.420
23	Cilacap tengah	2008	88.97	6.27	4.76	31.85	27.40	-1.35	0.425
23	Cilacap tengah	2009	18.70	24.10	57.21	31.85	28.42	-1.34	0.462
23	Cilacap tengah	2010	76.13	14.12	9.74	35.76	28.38	-0.75	0.474
23	Cilacap tengah	2011	30.13	9.92	59.95	35.76	30.15	-0.53	0.527
23	Cilacap tengah	2012	32.46	19.38	48.16	31.85	30.04	-1.26	0.579
23	Cilacap tengah	2013	35.25	27.58	37.16	31.85	31.18	-0.98	0.616
24	Cilacap utara	2004	196.45	-13.76	-82.69	23.23	34.20	0.68	0.940
24	Cilacap utara	2005	152.24	0.72	-52.96	22.93	34.20	2.47	0.869
24	Cilacap utara	2006	29.64	2.58	67.78	22.91	34.04	0.84	0.961
24	Cilacap utara	2007	44.77	8.58	46.65	21.39	32.20	0.19	0.997
24	Cilacap utara	2008	125.13	6.65	-31.78	21.22	30.98	0.31	0.972
24	Cilacap utara	2009	33.32	16.88	49.80	21.11	28.52	-0.10	1.004
24	Cilacap utara	2010	78.33	6.21	15.46	30.03	25.32	0.15	1.020
24	Cilacap utara	2011	42.17	6.21	51.63	30.03	25.75	-0.24	1.090
24	Cilacap utara	2012	51.53	12.86	35.61	22.70	24.67	0.11	1.128
24	Cilacap utara	2013	34.63	9.01	56.36	23.13	23.55	0.13	1.192

## Lampiran 2

**PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2003-2013**

	KECAMATAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Daeyuhluhur	6,070,016.13	6,838,921.65	9,153,800.03	11,025,157.00	12,293,465.26	13,598,535.69	14,856,467.43	15,787,016.24	16,608,364.96	17,962,856.77	19,636,549.92
2	Wanareja	5,083,326.34	5,601,347.61	6,819,256.66	8103948.61	9,115,163.55	10,216,857.41	11,251,942.73	12,207,871.27	12,936,072.45	13,992,243.80	15,482,680.83
3	Majenang	6,142,089.79	6,605,171.72	7,492,885.68	8,651,617.47	9,804,285.79	11,033,413.99	12,225,414.57	13,494,830.93	14,411,177.62	16,201,199.34	18,138,810.80
4	Cimanggu	4,624,379.27	4,857,441.20	6,203,371.52	7,420,452.36	8,361,690.63	9,388,669.52	10,386,210.90	11,582,010.90	12,530,228.43	13,741,025.50	15,390,501.34
5	Karangpucung	3,970,263.39	4,216,508.51	4,446,663.63	5,235,729.04	5,837,995.02	6,714,154.84	7,523,291.17	8,250,372.82	8,926,258.48	9,712,864.79	10,817,825.75
6	Cipari	3,945,563.20	4,451,619.69	5,160,300.18	6,156,126.51	6,895,606.59	7,636,443.86	8,419,794.52	9,519,679.29	10,539,697.86	11,452,744.72	12,645,666.08
7	Sidareja	5,734,188.48	7,973,106.85	7,896,660.04	9,732,454.47	11,009,377.58	12,413,881.23	13,830,549.33	15,485,527.52	16,940,385.62	18,357,323.22	20,550,188.73
8	Kedungreja	2,782,814.31	3,471,579.29	2,484,928.30	2,892,206.44	3,263,418.69	3,723,728.18	4,183,331.23	4,631,590.52	4,882,469.64	5,329,115.33	5,964,684.50
9	Patimuan	3,314,746.32	3,423,253.57	3,378,408.13	4,005,096.54	4,460,812.81	5,032,474.3	5,581,485.22	6,127,200.57	6,680,864.53	7,285,123.14	8,082,984.66
10	Gandrungmangu	2,796,558.69	2,961,283.52	2,693,025.87	3,193,476.77	3,590,099.69	4,077,007.14	4,571,352.67	5,028,230.75	5,519,032.02	5,939,061.74	6,616,158.01
11	Bantarsari	3,024,207.49	2,716,408.86	2,633,355.75	2,905,067.28	3,210,650.32	3,579,474.73	3,961,164.97	4,462,140.70	4,917,130.98	5,344,252.83	5,919,481.45
12	Kawungaten	3,585,462.64	3,620,420.13	3,546,618.49	3,805,343.43	4,270,157.70	4,790,919.51	5,305,941.72	6,035,697.93	6,870,695.02	7,415,431.05	8,238,564.70
13	Kampung Laut	-	-	-	3,874,231.95	4,327,051.67	4,762,749.29	4,701,390.70	4,863,403.10	5,884,441.09	6,303,678.36	6,872,588.88
14	Jeruk Legi	6,609,743.22	6,806,007.75	8,605,059.03	10,149,417.79	11,440,757.58	12,878,813.75	13,937,111.41	15,475,245.12	16,453,703.00	17,242,251.48	19,146,870.46
15	Kesugihan	5,289,714.24	5,173,111.94	6,225,760.21	7,303,051.14	8,182,696.51	9,303,870.62	10,390,741.56	11,466,857.20	12,186,181.17	13,536,676.94	15,210,445.84
16	Adipala	3,751,781.76	4,256,396.50	4,812,433.90	6,047,057.08	6,819,467.52	7,713,447.64	8,595,847.60	9,767,376.16	10,995,453.60	11,970,342.07	13,444,560.79
17	Maos	6,916,728.09	6,656,994.70	7,896,733.27	9,155,296.72	10,227,464.89	11,752,071.61	13,100,087.34	14,137,798.60	14,318,667.57	15,670,687.27	17,809,701.13
18	Sampang	6,512,622.85	7,399,018.69	8,811,212.37	10,640,661.10	12,009,850.55	13,729,011.32	15,473,004.31	18,024,148.05	20,090,198.74	21,570,344.09	24,213,828.68
19	Kroya	3,992,924.92	4,296,517.25	5,263,089.48	6,216,962.86	7,069,611.66	8,039,934.20	8,978,612.12	10,156,127.06	11,978,840.62	13,468,464.92	15,119,458.54
20	Binangun	3,860,150.83	4,134,015.98	4,949,695.63	5,882,787.94	6,572,956.03	7,284,375.97	8,056,214.08	9,026,653.86	10,129,339.78	11,061,579.62	12,320,579.39
21	Nusawungu	4,055,480.96	4,174,205.22	4,327,603.17	5,096,193.29	5,718,686.81	6,461,566.36	7,117,153.18	8,045,373.05	8,992,008.36	9,838,996.66	10,938,804.75
22	Cilacap Selatan	10,231,152.15	11,360,961.93	12,768,161.05	14,893,955.51	16,829,967.25	18,842,070.46	20,671,969.27	22,637,629.96	26,444,176.34	30,091,404.65	34,036,846.77
23	Cilacap Tengah	5,831,304.65	6,372,919.09	7,451,557.54	8,512,319.46	9,621,596.14	11,092,068.46	12,270,457.21	13,902,068.52	16,475,089.43	19,117,432.97	21,622,553.21
24	Cilacap Utara	11,785,335.73	12,242,877.18	13,978,396.25	15,118,785.66	17,024,774.99	19,277,579.60	21,125,576.58	23,417,994.48	25,916,331.40	27,833,592.58	31,379,400.38

Lampiran 3

**PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2003-2013**

	KECAMATAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Daeyuhluhur	5,353,958.52	5,836,851.14	7,386,931.31	7,563,492.93	7,758,728.61	7,893,948.33	8,197,830.98	8,533,886.58	8,706,431.66	8,840,233.67	9,040,787.16
2	Wanareja	4,353,230.28	4,609,124.15	5,183,950.24	5,354,575.01	5,563,043.79	5,883,573.15	6,090,301.16	6,371,470.15	6,580,920.77	6,691,395.86	6,945,940.61
3	Majenang	5,044,417.39	5,184,780.31	5,282,692.99	5,417,087.19	5,689,908.33	5,958,219.44	6,212,686.18	6,524,158.58	6,725,249.16	7,149,194.53	7,527,546.16
4	Cimanggu	3,919,867.76	3,933,161.76	4,604,795.20	4,785,160.75	4,981,738.70	5,166,355.63	5,404,013.52	5,672,288.55	5,918,074.80	6,202,239.87	6,528,039.63
5	Karangpucung	3,347,779.32	3,410,159.37	3,315,941.68	3,417,479.70	3,546,882.58	3,737,857.24	3,921,724.47	4,121,268.13	4,246,342.38	4,418,774.63	4,620,147.73
6	Cipari	3,448,437.77	3,753,292.24	4,050,918.22	4,152,238.60	4,280,378.10	4,385,109.86	4,584,038.98	4,770,109.30	5,075,165.21	5,267,030.96	5,451,235.00
7	Sidareja	4,930,882.95	6,635,849.16	5,874,455.30	6,144,834.42	6,418,653.95	6,711,233.24	7,034,288.22	7,391,499.44	7,841,683.86	8,150,902.94	8,564,345.55
8	Kedungreja	2,292,047.53	2,754,003.21	1,740,013.55	1,849,765.16	1,946,171.47	2,068,357.88	2,183,978.20	2,306,086.17	2,355,634.30	2,476,332.34	2,609,759.52
9	Patimuan	2,786,289.82	2,758,541.32	2,492,826.53	2,602,496.46	2,692,312.04	2,826,994.92	2,943,707.17	3,063,762.35	3,132,326.69	3,247,097.24	3,382,529.67
10	Gandrungmangu	2,372,079.85	2,414,736.99	2,007,307.96	2,086,673.02	2,178,867.07	2,291,919.89	2,382,446.24	2,497,972.12	2,578,286.93	2,624,504.03	2,745,656.71
11	Bantarsari	2,412,748.82	2,092,240.93	1,880,811.60	1,940,657.38	1,978,225.92	2,061,687.85	2,149,556.74	2,239,285.79	2,326,583.25	2,409,731.13	2,501,803.04
12	Kawungaten	2,897,483.63	2,828,005.66	2,578,679.07	2,584,862.78	2,677,672.54	2,820,910.43	2,934,498.25	3,080,686.18	3,250,448.91	3,337,575.19	3,476,121.79
13	Kampung Laut	-	-	-	2,644,686.70	2,712,787.35	2,858,172.99	2,686,881.31	2,575,468.93	2,655,421.82	2,726,578.62	2,786,197.38
14	Jeruk Legi	5,523,091.38	5,433,060.88	6,305,799.52	6,541,310.72	6,821,901.20	7,103,742.26	7,316,577.88	7,636,108.42	7,878,293.28	7,971,295.46	8,307,006.54
15	Kesugihan	4,547,863.48	4,248,287.42	4,572,595.89	4,648,095.31	4,843,953.05	5,101,299.38	5,394,049.03	5,707,565.78	5,886,079.58	6,155,741.83	6,515,177.91
16	Adipala	3,318,727.69	3,581,537.19	3,659,701.09	3,818,990.83	3,990,434.55	4,191,095.05	4,421,191.22	4,653,449.20	4,951,874.92	5,227,469.02	5,511,437.97
17	Maos	5,501,604.53	5,125,686.19	5,639,866.46	5,936,691.11	6,245,102.38	6,532,094.59	6,891,272.80	7,325,591.21	6,869,167.09	7,195,137.20	7,714,523.76
18	Sampang	5,221,805.98	5,646,057.86	6,071,969.97	6,526,047.97	6,870,241.10	7,304,402.37	7,732,313.60	8,166,278.12	8,638,546.07	9,093,089.24	9,610,487.31
19	Kroya	3,304,737.17	3,403,319.43	3,732,182.58	3,895,687.23	4,102,772.07	4,313,561.37	4,550,476.30	4,794,472.69	5,245,614.51	5,587,836.73	5,900,434.24
20	Binangun	3,293,328.79	3,367,197.30	3,737,362.22	3,851,724.72	3,984,871.99	4,069,333.71	4,263,631.99	4,470,617.87	4,657,432.10	4,932,678.22	5,164,066.28
21	Nusawungu	3,352,769.98	3,261,876.64	3,501,785.28	3,334,886.98	3,467,633.02	3,634,749.03	3,783,896.99	3,974,732.37	4,125,265.01	4,319,422.08	4,511,319.78
22	Cilacap Selatan	8,041,656.68	8,405,977.84	8,484,755.66	8,866,445.09	9,347,516.59	9,703,627.43	10,128,202.17	10,698,878.44	11,467,805.09	12,543,317.36	13,378,171.35
23	Cilacap Tengah	4,474,537.49	4,615,641.68	4,803,117.25	5,065,391.97	5,356,564.43	5,703,995.38	6,111,805.43	6,470,454.20	7,225,068.17	7,895,062.41	8,423,254.15
24	Cilacap Utara	7,925,689.84	7,736,608.73	7,882,583.24	8,946,546.42	9,405,409.85	9,760,549.72	10,114,423.44	10,655,497.26	11,617,589.28	12,215,671.81	13,013,080.37

Lampiran 4

## PERHITUNGAN KOMPONEN PERTUMBUHAN EKONOMI KECAMATAN DAEYUHLUHUR TAHUN 2012

NO	SEKTOR	PDRB KECAMATAN		PDRB KABUPATEN		REGIONAL SHARE		PROPORTIONALITY SHIFT		DIFFERENTIAL SHIFT	
		2011	2012	2011	2012	Yt/Yo	$y_i((Y_t/Y_o)-1)$	Yit/Yio	$y_i((Y_{it}/Y_{io}) - (Y_t/Y_o))$	$y_i/y_{io}$	$y_i((y_i/y_{i0}) - (Y_{it}/Y_{io}))$
		yio	yit	Yio	Yit						
1	PERTANIAN	354,096.68	354,731.00	3,187,500.00	3,256,220.00	1.030332	10,759.63	1.021559	-3111.91	1.001791	-7,012.27
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	906.61	971.23	320,250.00	342,970.00	1.030332	29.46	1.070945	39.44435	1.071277	0.32
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,065.23	8,361.66	12,945,830.00	13,071,590.00	1.030332	253.62	1.009714	-172.396	2.056873	8,755.98
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	306.16	329.97	81,530.00	87,870.00	1.030332	10.01	1.077763	15.6508	1.07777	0.00
5	BANGUNAN	13,913.21	14,986.93	517,180.00	557,100.00	1.030332	454.58	1.077188	702.228	1.077173	-0.23
6	PERDAGANGAN, RESTAURAN DAN HOTEL	13,549.38	14,021.05	5,753,000.00	6,109,780.00	1.030332	425.28	1.062016	444.2506	1.034811	-381.44
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	8,276.33	8,865.86	597,510.00	640,070.00	1.030332	268.92	1.071229	362.5883	1.071231	0.02
8	KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	10,649.45	11,376.68	512,680.00	547,690.00	1.030332	345.08	1.068288	431.818	1.068288	0.00
9	JASA-JASA	17,299.87	18,430.89	787,310.00	838,780.00	1.030332	559.04	1.065375	645.8683	1.065377	0.05
	TOTAL PDRB			24702790	25452070						
	YT/YO				1.030332						
	JUMLAH						13,105.62		-642.454		1,362.44
	PROSENTASE						94.7924		-4.64685		9.854445

## Lampiran 5

**PERHITUNGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MIGRASI TAHUN 2012**

	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	MIGRASI MASUK (I)	MIGRASI KELUAR (E)	PERTAMBAHAN PENDUDUK (I-E)	PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	Daeyuhluhur	48,876	107	70	37	0.08
2	Wanareja	95,938	121	211	-90	-0.09
3	Majenang	126,408	1114	1326	-212	-0.17
4	Cimanggu	97,741	365	970	-605	-0.62
5	Karangpucung	73,031	345	503	-158	-0.22
6	Cipari	61,843	562	577	-15	-0.02
7	Sidareja	57,177	508	139	369	0.65
8	Kedungreja	80,683	627	795	-168	-0.21
9	Patimuan	45,686	231	236	-5	-0.01
10	Gandrungmangu	104,505	3012	1366	1646	1.58
11	Bantarsari	69,020	452	539	-87	-0.13
12	Kawungaten	80,925	1627	1403	224	0.28
13	Kampung Laut	16,948	69	88	-19	-0.11
14	Jeruk Legi	63,957	1650	974	676	1.06
15	Kesugihan	95,879	725	1294	-569	-0.59
16	Adipala	79,614	1104	1341	-237	-0.30
17	Maos	47,936	540	964	-424	-0.88
18	Sampang	37,384	403	436	-33	-0.09
19	Kroya	103,216	1179	1544	-365	-0.35
20	Binangun	65,965	291	304	-13	-0.02
21	Nusawungu	77,336	883	856	27	0.03
22	Cilacap Selatan	78,238	2045	2836	-791	-1.01
23	Cilacap Tengah	83,766	1747	2802	-1055	-1.26
24	Cilacap Utara	68,980	1232	1154	78	0.11

## Lampiran 6

**PERHITUNGAN JUMLAH PENDUDUK DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SMA DAN PERGURUAN TINGGI**

	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SMA	JUMLAH PENDUDUK DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN PT	JUMLAH PENDUDUK KESELURUHAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	%
1	Daeyuhluhur	4,381	859	45,009	11.64
2	Wanareja	5,455	1,317	88,731	7.63
3	Majenang	10,011	1,961	116,030	10.32
4	Cimanggu	11,533	2,748	89,255	16.00
5	Karangpucung	4,911	514	67,614	8.02
6	Cipari	3,184	636	57,703	6.62
7	Sidareja	5,236	997	52,340	11.91
8	Kedungreja	6,021	804	73,934	9.23
9	Patimuan	2,726	555	42,111	7.79
10	Gandrungmangu	14,281	1,566	95,792	16.54
11	Bantarsari	3,151	207	62,975	5.33
12	Kawungaten	3,983	497	73,729	6.08
13	Kampung Laut	573	58	15,565	4.05
14	Jeruk Legi	4,813	454	60,267	8.74
15	Kesugihan	7,986	921	87,481	10.18
16	Adipala	7,096	1,825	77,043	11.58
17	Maos	5,797	1,738	43,303	17.40
18	Sampang	4,257	810	34,212	14.81
19	Kroya	11,427	1,660	93,937	13.93
20	Binangun	6,276	784	62,999	11.21
21	Nusawungu	7,340	1,184	70,865	12.03
22	Cilacap Selatan	16,072	7,039	71,385	32.38
23	Cilacap Tengah	19,576	4,897	76,833	31.85
24	Cilacap Utara	11,267	3,106	62,143	23.13

Data: Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Di Kabupaten Cilacap

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap

## Lampiran 7

**PERHITUNGAN JUMLAH KELUARGA MISKIN MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN  
TAHUN 2013**

	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA PRA SEJAHTERA	JUMLAH KELUARGA SEJAHTERA TAHAP I	JUMLAH KELUARGA KESELURUHAN MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN	%
1	Daeyuhluhur	3,926	2525	17089	37.75
2	Wanareja	7,364	8394	32281	48.82
3	Majenang	9,524	10868	37221	54.79
4	Cimanggu	7,715	9387	29985	57.04
5	Karangpucung	7,273	6,362	23011	59.25
6	Cipari	6,170	4,023	18415	55.35
7	Sidareja	5,779	3,437	16062	57.38
8	Kedungreja	9,899	5,884	23242	67.91
9	Patimuan	2,943	3,454	13781	46.42
10	Gandrungmangu	9,046	8,209	26855	64.25
11	Bantarsari	6,616	3,795	17976	57.92
12	Kawungaten	7,440	6,181	20857	65.31
13	Kampung Laut	1,006	1,323	3723	62.56
14	Jeruk Legi	6,338	3,535	17991	54.88
15	Kesugihan	5,473	10,556	30182	53.11
16	Adipala	5,097	4,846	24456	40.66
17	Maos	1,968	3,008	12782	38.93
18	Sampang	2,505	2,554	11489	44.03
19	Kroya	6,427	5,529	28736	41.61
20	Binangun	3,857	4,225	18108	44.63
21	Nusawungu	6,578	5,853	20989	59.23
22	Cilacap Selatan	4,265	6,024	22010	46.75
23	Cilacap Tengah	2,787	4,401	23054	31.18
24	Cilacap Utara	1,646	3,250	20786	23.55

Data: Data Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera (Dinas Sosial Dan Keluarga Berencana)

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap 2014

## Lampiran 8

## PERHITUNGAN INDEX THEIL INTRA DAN INTER REGION 2012

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH SELURUH PENDUDUK	PDRB KECAMATAN	PDRB PERKAPITA KECAMATAN	PDRB PERKAPITA KABUPATEN	(yi)	(y)	INDEX THEIL INTER REGION		
									(f)	(n)	(yi/Y)
1	Daeyuhluhur	48,876	1761052	432,075.26	8840233.67	14452732	0.611665	0.027754			0.821582818
2	Wanareja	95,938	1761052	641,959.14	6691395.86	14452732	0.462985	0.054478			0.430274174
3	Majenang	126,408	1761052	903,715.38	7149194.53	14452732	0.49466	0.07178			0.4146762
4	Cimanggu	97,741	1761052	606,213.13	6202239.87	14452732	0.42914	0.055501			0.381202151
5	Karangpucung	73,031	1761052	322,707.53	4418774.63	14452732	0.30574	0.04147			0.265264952
6	Cipari	61,843	1761052	325,729.00	5267030.96	14452732	0.364432	0.035117			0.370297966
7	Sidareja	57,177	1761052	466,044.18	8150902.94	14452732	0.56397	0.032468			0.69921335
8	Kedungreja	80,683	1761052	199,797.92	2476332.34	14452732	0.17134	0.045815			0.098152018
9	Patimuan	45,686	1761052	148,346.88	3247097.24	14452732	0.22467	0.025942			0.210635977
10	Gandungmangu	104,505	1761052	274,273.79	2624504.03	14452732	0.181592	0.059342			0.088205237
11	Bantarsari	69,020	1761052	166,319.64	2409731.13	14452732	0.166732	0.039192			0.104843649
12	Kawungaten	80,925	1761052	270,093.27	3337575.19	14452732	0.23093	0.045953			0.161921603
13	Kampung Laut	16,948	1761052	46,210.05	2726578.62	14452732	0.188655	0.009624			0.243802832
14	Jeruk Legi	63,957	1761052	509,820.14	7971295.46	14452732	0.551542	0.036317			0.651627047
15	Kesugihan	95,879	1761052	590,206.37	6155741.83	14452732	0.425922	0.054444			0.380510155
16	Adipala	79,614	1761052	416,179.72	5227469.02	14452732	0.361694	0.045208			0.326654785
17	Maos	47,936	1761052	344,906.10	7195137.2	14452732	0.497839	0.02722			0.628372456
18	Sampang	37,384	1761052	339,936.05	9093089.24	14452732	0.629161	0.021228			0.926028688
19	Kroya	103,216	1761052	576,754.16	5587836.73	14452732	0.386628	0.05861			0.316771965
20	Binangun	65,965	1761052	325,384.12	4932678.22	14452732	0.341297	0.037458			0.327505958
21	Nusawungu	77,336	1761052	334,046.83	4319422.08	14452732	0.298865	0.043915			0.248914912
22	Cilacap Selatan	78,238	1761052	981,364.06	12543317.36	14452732	0.867886	0.044427			1.120281345
23	Cilacap Tengah	83,766	1761052	661,337.80	7895062.41	14452732	0.546268	0.047566			0.57910399
24	Cilacap Utara	68,980	1761052	842,637.04	12215671.81	14452732	0.845215	0.03917			1.127531216

RATA-RATA PDRB PERKAPITA KABUPATEN	PENDUDUK KABUPATEN	INDEX THEIL INTRA REGION
Yj	Xj	Yj.Log(Yj/Xj)
6.11159634	1761052	-33.36697844

## Lampiran 9

**PERHITUNGAN TIPOLOGI KLASSEN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012**

No	Kecamatan	PDRB Perkapita	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata PDRB Perkapita	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tipologi Klassen
1	Daeyuhluhur	8,840,233.67	2.13	6111596.349	5.04	2
2	Wanareja	6,691,395.86	2.32	6111596.349	5.04	2
3	Majenang	7,149,194.53	6.72	6111596.349	5.04	1
4	Cimanggu	6,202,239.87	4.50	6111596.349	5.04	2
5	Karangpucung	4,418,774.63	4.23	6111596.349	5.04	4
6	Cipari	5,267,030.96	4.31	6111596.349	5.04	4
7	Sidareja	8,150,902.94	4.08	6111596.349	5.04	2
8	Kedungreja	2,476,332.34	5.79	6111596.349	5.04	3
9	Patimuan	3,247,097.24	4.35	6111596.349	5.04	4
10	Gandrungmangu	2,624,504.03	4.05	6111596.349	5.04	4
11	Bantarsari	2,409,731.13	3.86	6111596.349	5.04	4
12	Kawungaten	3,337,575.19	5.00	6111596.349	5.04	4
13	Kampung Laut	2,726,578.62	3.22	6111596.349	5.04	4
14	Jeruk Legi	7,971,295.46	4.03	6111596.349	5.04	2
15	Kesugihan	6,155,741.83	4.36	6111596.349	5.04	2
16	Adipala	5,227,469.02	5.29	6111596.349	5.04	3
17	Maos	7,195,137.20	4.43	6111596.349	5.04	2
18	Sampang	9,093,089.24	5.97	6111596.349	5.04	1
19	Kroya	5,587,836.73	6.97	6111596.349	5.04	3
20	Binangun	4,932,678.22	6.12	6111596.349	5.04	3
21	Nusawungu	4,319,422.08	5.00	6111596.349	5.04	4
22	Cilacap Selatan	12,543,317.36	9.36	6111596.349	5.04	1
23	Cilacap Tengah	7,895,062.41	9.11	6111596.349	5.04	1
24	Cilacap Utara	12,215,671.81	5.75	6111596.349	5.04	1

## Lampiran 10

**Variabel Penelitian**

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
y	overall	.4320633	.2754501	.079	1.192	N = 237
	between		.2764392	.0926	1.0173	n = 24
	within		.0415183	.2837633	.6280633	T-bar = 9.875
x1	overall	73.29603	111.7857	-832.86	634.25	N = 237
	between		38.47478	-28.918	145.221	n = 24
	within		105.1471	-730.646	562.325	T-bar = 9.875
x2	overall	10.63215	49.49684	-322.21	379.36	N = 237
	between		19.00006	-37.887	59.32	n = 24
	within		45.80523	-273.6908	330.6721	T-bar = 9.875
x3	overall	16.07135	77.89539	-326.31	553.5	N = 237
	between		22.96306	-10.887	69.597	n = 24
	within		74.5391	-299.3516	499.9744	T-bar = 9.875
x4	overall	11.8635	7.529881	2.15	35.76	N = 237
	between		7.328382	4.67	32.665	n = 24
	within		2.091534	7.493502	18.8735	T-bar = 9.875
x5	overall	54.57481	12.85973	23.55	89.9	N = 237
	between		12.03752	29.109	70.954	n = 24
	within		5.059815	43.39581	76.58581	T-bar = 9.875
x6	overall	-.0253165	.9537902	-1.51	9.97	N = 237
	between		.5973083	-.631	2.597143	n = 24
	within		.8051954	-2.872459	7.347541	T-bar = 9.875

## Lampiran 11

**Uji Normalitas**

Variable	Obs	Skewness/Kurtosis tests for Normality			joint	
		Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	adj chi2(2)	Prob>chi2	
resid	237	0.4750	0.0210	5.76	0.0562	

## Lampiran 12

**Hasil Running Regresi Model *Pooled Least Square* Terhadap Keseluruhan Variabel**

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	237
Model	8.07787285	6	1.34631214	F( 6, 230)	=	31.51
Residual	9.82809925	230	.042730866	Prob > F	=	0.0000
Total	17.9059721	236	.075872763	R-squared	=	0.4511
				Adj R-squared	=	0.4368
				Root MSE	=	.20671

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x1	-2.62203	2.53334	-1.04	0.302	-7.61355 2.369489
x2	-2.622695	2.533306	-1.04	0.302	-7.614147 2.368758
x3	-2.621655	2.533344	-1.03	0.302	-7.613184 2.369874
x4	.0076478	.0023116	3.31	0.001	.0030931 .0122025
x5	-.0115483	.0013835	-8.35	0.000	-.0142742 -.0088224
x6	.0125406	.0143027	0.88	0.382	-.0156405 .0407218
_cons	263.1747	253.3344	1.04	0.300	-235.9781 762.3276

## Lampiran 13

**Uji Multikolinearitas Keseluruhan Variabel**

	x1	x2	x3	x4	x5	x6
x1	1.0000					
	237					
x2	-0.8023*	1.0000				
	0.0000					
	237	237				
x3	-0.9253*	0.5159*	1.0000			
	0.0000	0.0000				
	237	237	237			
x4	0.0569	0.0104	-0.0882	1.0000		
	0.3835	0.8732	0.1758			
	237	237	237	237		
x5	-0.1177	-0.0259	0.1853*	-0.6306*	1.0000	
	0.0705	0.6916	0.0042	0.0000		
	237	237	237	237	237	
x6	0.0181	0.0015	-0.0269	-0.1209	0.1142	1.0000
	0.7820	0.9821	0.6809	0.0631	0.0794	
	237	237	237	237	237	237

## Lampiran 14

**Hasil Running Stata Model *Pooled Least Square* Model 1**

Source	SS	df	MS			
Model	8.03209764	5	1.60641953	Number of obs =	237	
Residual	9.87387446	231	.042744045	F( 5, 231) =	37.58	
Total	17.9059721	236	.075872763	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.4486	
				Adj R-squared =	0.4366	
				Root MSE =	.20675	

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x2	-.0006999	.0003211	-2.18	0.030	-.0013326 -.0000672
x3	.0003805	.0002079	1.83	0.069	-.0000292 .0007902
x4	.007547	.0023099	3.27	0.001	.0029958 .0120983
x5	-.011491	.0013826	-8.31	0.000	-.014215 -.0087669
x6	.0113119	.0142556	0.79	0.428	-.0167757 .0393995
_cons	.9712588	.0957073	10.15	0.000	.782688 1.15983

## Lampiran 15

**Hasil Running Stata Model *Pooled Least Square* Model 2**

Source	SS	df	MS	Number of obs =	237
Model	7.82906283	4	1.95726571	F( 4, 232) =	45.06
Residual	10.0769093	232	.043434954	Prob > F =	0.0000
Total	17.9059721	236	.075872763	R-squared =	0.4372

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x3	.0001396	.0001776	0.79	0.433	-.0002102 .0004894
x4	.0076998	.0023275	3.31	0.001	.0031142 .0122855
x5	-.0110854	.001381	-8.03	0.000	-.0138063 -.0083644
x6	.010252	.014362	0.71	0.476	-.0180445 .0385486
_cons	.943714	.0956328	9.87	0.000	.7552942 1.132134

## Lampiran 16

**Hasil Running Stata Model *Pooled Least Square* Model 3**

Source	SS	df	MS	Number of obs = 237
Model	7.88898769	4	1.97224692	F( 4, 232) = 45.68
Residual	10.0169844	232	.043176657	Prob > F = 0.0000
Total	17.9059721	236	.075872763	R-squared = 0.4406
				Adj R-squared = 0.4309
				Root MSE = .20779

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x2	-.0003875	.0002734	-1.42	0.158	-.0009261 .0001511
x4	.0077389	.0023192	3.34	0.001	.0031695 .0123083
x5	-.0109491	.0013573	-8.07	0.000	-.0136232 -.0082749
x6	.0098028	.0143035	0.69	0.494	-.0183787 .0379842
_cons	.9421644	.0948536	9.93	0.000	.7552799 1.129049

## Lampiran 17

**Hasil Model Terpilih untuk Estimasi Regresi Data Panel****Model Terpilih: Model 1****A. Regresi Pooled Least Square**

Source	SS	df	MS	Number of obs = 237
Model	8.03209764	5	1.60641953	F( 5, 231) = 37.58
Residual	9.87387446	231	.042744045	Prob > F = 0.0000
Total	17.9059721	236	.075872763	R-squared = 0.4486 Adj R-squared = 0.4366 Root MSE = .20675

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x2	-.0006999	.0003211	-2.18	0.030	-.0013326 -.0000672
x3	.0003805	.0002079	1.83	0.069	-.0000292 .0007902
x4	.007547	.0023099	3.27	0.001	.0029958 .0120983
x5	-.011491	.0013826	-8.31	0.000	-.014215 -.0087669
x6	.0113119	.0142556	0.79	0.428	-.0167757 .0393995
_cons	.9712588	.0957073	10.15	0.000	.782688 1.15983

### B. Regresi Fixed Effect Model

Fixed-effects (within) regression  
 Group variable: kec

Number of obs	=	237
Number of groups	=	24
R-sq: within	=	0.1325
between	=	0.4567
overall	=	0.4043
Obs per group: min	=	7
	avg	= 9.9
	max	= 10
F(5,208)	=	6.35
corr(u_i, Xb)	=	0.5453
Prob > F	=	0.0000

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x2	-.0000386	.0000727	-0.53	0.596	-.0001819 .0001046
x3	.0001646	.0000452	3.64	0.000	.0000755 .0002538
x4	.0023003	.0013551	1.70	0.091	-.0003711 .0049717
x5	-.0020094	.0006168	-3.26	0.001	-.0032254 -.0007935
x6	-.0019012	.0033432	-0.57	0.570	-.008492 .0046896
_cons	.5121548	.04153	12.33	0.000	.4302811 .5940286
sigma_u	.25305438				
sigma_e	.04119117				
rho	.97418791				(fraction of variance due to u_i)

F test that all u\_i=0: F(23, 208) = 243.97 Prob > F = 0.0000

### C. Regresi *Random Effect Model*

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	237
Group variable: kec	Number of groups	=	24
R-sq: within = 0.1318	Obs per group: min =		7
between = 0.4568	avg =		9.9
overall = 0.4104	max =		10
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Wald chi2(5)	=	36.97
	Prob > chi2	=	0.0000

	y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
	x2	-.0000531	.0000737	-0.72	0.471	-.0001976 .0000913
	x3	.0001714	.0000459	3.74	0.000	.0000815 .0002614
	x4	.0028199	.0013529	2.08	0.037	.0001683 .0054716
	x5	-.0022377	.0006216	-3.60	0.000	-.0034561 -.0010193
	x6	-.0018173	.0033933	-0.54	0.592	-.0084681 .0048335
	_cons	.5169138	.0617015	8.38	0.000	.3959811 .6378464
	sigma_u	.21812166				
	sigma_e	.04119117				
	rho	.96556561	(fraction of variance due to u_i)			

## Lampiran 18

**Uji Breusch Pagan (LM Test)**

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$y[\text{kec},t] = Xb + u[\text{kec}] + e[\text{kec},t]$$

Estimated results:

	Var	sd = sqrt(Var)
y	.0758728	.2754501
e	.0016967	.0411912
u	.0475771	.2181217

$$\text{Test: } \text{Var}(u) = 0$$

$$\text{chibar2(01)} = 859.59$$

$$\text{Prob} > \text{chibar2} = 0.0000$$

## Lampiran 19

**Uji Hausman**

	Coefficients			
	(b) fe	(B) re	(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
x2	-.0000386	-.0000531	.0000145	.
x3	.0001646	.0001714	-6.82e-06	.
x4	.0023003	.0028199	-.0005196	.000076
x5	-.0020094	-.0022377	.0002283	.
x6	-.0019012	-.0018173	-.0000839	.

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

$$\begin{aligned} \text{chi2}(5) &= (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B) \\ &= 25.93 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Prob}>\text{chi2} &= 0.0001 \\ (V_b-V_B \text{ is not positive definite}) \end{aligned}$$

## Lampiran 20

**Model Estimasi Terpilih****Model Regresi *Fixed Effect***

Fixed-effects (within) regression  
 Group variable: kec

Number of obs	=	237
Number of groups	=	24
R-sq: within	=	0.1325
between	=	0.4567
overall	=	0.4043
Obs per group: min	=	7
	avg	= 9.9
	max	= 10
F(5,208)	=	6.35
corr(u_i, Xb)	=	0.5453
Prob > F	=	0.0000

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x2	-.0000386	.0000727	-0.53	0.596	-.0001819 .0001046
x3	.0001646	.0000452	3.64	0.000	.0000755 .0002538
x4	.0023003	.0013551	1.70	0.091	-.0003711 .0049717
x5	-.0020094	.0006168	-3.26	0.001	-.0032254 -.0007935
x6	-.0019012	.0033432	-0.57	0.570	-.008492 .0046896
_cons	.5121548	.04153	12.33	0.000	.4302811 .5940286
sigma_u	.25305438				
sigma_e	.04119117				
rho	.97418791				(fraction of variance due to u_i)

F test that all u\_i=0:      F(23, 208) = 243.97      Prob > F = 0.0000

## Lampiran 21

**Model Regresi Fixed Effek Dengan Dummy Variabel**

```
. xi: regress y x2 x3 x4 x5 x6 i.kec
i.kec          _Ikec_1-24          (naturally coded; _Ikec_1 omitted)
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	237
Model	17.5530559	28	.626894855	F( 28, 208) =	369.48
Residual	.352916152	208	.001696712	Prob > F =	0.0000
Total	17.9059721	236	.075872763	R-squared =	0.9803
				Adj R-squared =	0.9776
				Root MSE =	.04119

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x2	-.0000386	.0000727	-0.53	0.596	-.0001819 .0001046
x3	.0001646	.0000452	3.64	0.000	.0000755 .0002538
x4	.0023003	.0013551	1.70	0.091	-.0003711 .0049717
x5	-.0020094	.0006168	-3.26	0.001	-.0032254 -.0007935
x6	-.0019012	.0033432	-0.57	0.570	-.008492 .0046896
_Ikec_2	-.373066	.0209335	-17.82	0.000	-.414335 -.3317971
_Ikec_3	-.3966367	.0237265	-16.72	0.000	-.4434119 -.3498615
_Ikec_4	-.4386201	.0226438	-19.37	0.000	-.4832609 -.3939793
_Ikec_5	-.5223763	.0249399	-20.95	0.000	-.5715437 -.473209
_Ikec_6	-.4211556	.0234935	-17.93	0.000	-.4674714 -.3748398
_Ikec_7	-.125455	.0239639	-5.24	0.000	-.1726983 -.0782118
_Ikec_8	-.6702625	.027269	-24.58	0.000	-.7240217 -.6165034
_Ikec_9	-.5835019	.0223214	-26.14	0.000	-.6275072 -.5394967
_Ikec_10	-.6758728	.0278451	-24.27	0.000	-.7307677 -.6209779
_Ikec_11	-.6749862	.0231245	-29.19	0.000	-.7205746 -.6293978
_Ikec_12	-.6128853	.0263505	-23.26	0.000	-.6648336 -.5609369
_Ikec_13	-.507143	.028275	-17.94	0.000	-.5628854 -.4514006
_Ikec_14	-.1337856	.0207586	-6.44	0.000	-.1747097 -.0928614
_Ikec_15	-.4602597	.020205	-22.78	0.000	-.5000925 -.4204268
_Ikec_16	-.5283038	.0196048	-26.95	0.000	-.5669533 -.4896542
_Ikec_17	-.1824504	.0205307	-8.89	0.000	-.2229254 -.1419754
_Ikec_18	-.0019182	.0224457	-0.09	0.932	-.0461684 .042332
_Ikec_19	-.5558472	.0219494	-25.32	0.000	-.599119 -.5125754
_Ikec_20	-.5043132	.0216986	-23.24	0.000	-.5470906 -.4615358
_Ikec_21	-.542942	.025985	-20.89	0.000	-.5941699 -.4917142
_Ikec_22	.1292917	.0375014	3.45	0.001	.0553602 .2032233
_Ikec_23	-.4370111	.0366858	-11.91	0.000	-.5093348 -.3646873
_Ikec_24	.1306409	.0273396	4.78	0.000	.0767427 .1845391
_cons	.8892315	.0319267	27.85	0.000	.8262901 .952173

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Multikolinearitas**

	x2	x3	x4	x5	x6
x2	1.0000 237				
x3	0.5159* 0.0000 237	1.0000 237			
x4	0.0104 0.8732 237	-0.0882 0.1758 237	1.0000 237		
x5	-0.0259 0.6916 237	0.1853* 0.0042 237	-0.6306* 0.0000 237	1.0000 237	
x6	0.0015 0.9821 237	-0.0269 0.6809 237	-0.1209 0.0631 237	0.1142 0.0794 237	1.0000 237

#### **Uji Heterokedastisitas**

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity  
in fixed effect regression model

H0:  $\sigma(i)^2 = \sigma^2$  for all i

chi2 (24) = 5130.56  
Prob>chi2 = 0.0000

#### **Uji Autokorelasi**

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 23) = 44.158  
Prob > F = 0.0000

## Lampiran 23

**Mengatasi Masalah Asumsi Klasik dengan *Feasible General Least Square* (FGLS)**

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients: generalized least squares

Panels: homoskedastic

Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances	=	1	Number of obs	=	237
Estimated autocorrelations	=	0	Number of groups	=	24
Estimated coefficients	=	29	Obs per group: min	=	7
			avg	=	9.875
			max	=	10
			Wald chi2(28)	=	11787.71
Log likelihood	=	435.0974	Prob > chi2	=	0.0000

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
x2	-.0000386	.0000681	-0.57	0.571	-.0001721 .0000948
x3	.0001646	.0000424	3.89	0.000	.0000816 .0002477
x4	.0023003	.0012694	1.81	0.070	-.0001878 .0047884
x5	-.0020094	.0005778	-3.48	0.001	-.0031419 -.000877
x6	-.0019012	.0031319	-0.61	0.544	-.0080397 .0042373
kec					
2	-.373066	.0196109	-19.02	0.000	-.4115028 -.3346293
3	-.3966367	.0222275	-17.84	0.000	-.4402018 -.3530716
4	-.4386201	.0212132	-20.68	0.000	-.4801973 -.3970429
5	-.5223763	.0233643	-22.36	0.000	-.5681694 -.4765832
6	-.4211556	.0220092	-19.14	0.000	-.4642929 -.3780183
7	-.125455	.0224499	-5.59	0.000	-.1694561 -.081454
8	-.6702625	.0255463	-26.24	0.000	-.7203323 -.6201927
9	-.5835019	.0209112	-27.90	0.000	-.6244872 -.5425167
10	-.6758728	.026086	-25.91	0.000	-.7270004 -.6247453
11	-.6749862	.0216636	-31.16	0.000	-.717446 -.6325264
12	-.6128853	.0246858	-24.83	0.000	-.6612685 -.564502
13	-.507143	.0264887	-19.15	0.000	-.5590599 -.4552261
14	-.1337856	.0194471	-6.88	0.000	-.1719012 -.09567
15	-.4602597	.0189285	-24.32	0.000	-.4973589 -.4231605
16	-.5283038	.0183662	-28.76	0.000	-.5643009 -.4923067
17	-.1824504	.0192337	-9.49	0.000	-.2201477 -.1447531
18	-.0019182	.0210276	-0.09	0.927	-.0431316 .0392952
19	-.5558472	.0205627	-27.03	0.000	-.5961494 -.515545
20	-.5043132	.0203278	-24.81	0.000	-.5441549 -.4644715
21	-.542942	.0243434	-22.30	0.000	-.5906542 -.4952299
22	.1292917	.0351322	3.68	0.000	.0604339 .1981495
23	-.4370111	.0343681	-12.72	0.000	-.5043714 -.3696508
24	.1306409	.0256123	5.10	0.000	.0804417 .1808402
_cons	.8892315	.0299097	29.73	0.000	.8306096 .9478534

## Lampiran 24

**Variansi Ketimpangan Pembangunan pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Cilacap.**

Source	SS	df	MS	Number of obs = 237
Model	17.5530559	28	.626894855	F( 28, 208) = 369.48
Residual	.352916152	208	.001696712	Prob > F = 0.0000
Total	17.9059721	236	.075872763	R-squared = 0.9803 Adj R-squared = 0.9776 Root MSE = .04119

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x2	-.0000386	.0000727	-0.53	0.596	-.0001819 .0001046
x3	.0001646	.0000452	3.64	0.000	.0000755 .0002538
x4	.0023003	.0013551	1.70	0.091	-.0003711 .0049717
x5	-.0020094	.0006168	-3.26	0.001	-.0032254 -.0007935
x6	-.0019012	.0033432	-0.57	0.570	-.008492 .0046896
kc1	.8892315	.0319267	27.85	0.000	.8262901 .952173
kc2	.5161655	.0400139	12.90	0.000	.4372806 .5950503
kc3	.4925948	.0456298	10.80	0.000	.4026387 .582551
kc4	.4506114	.0437353	10.30	0.000	.3643902 .5368327
kc5	.3668552	.0463429	7.92	0.000	.2754932 .4582172
kc6	.4680759	.0444119	10.54	0.000	.3805208 .555631
kc7	.7637765	.0460482	16.59	0.000	.6729955 .8545575
kc8	.218969	.0500352	4.38	0.000	.1203279 .3176101
kc9	.3057296	.0416134	7.35	0.000	.2236915 .3877676
kc10	.2133587	.0510494	4.18	0.000	.1127182 .3139992
kc11	.2142453	.0429012	4.99	0.000	.1296684 .2988223
kc12	.2763462	.0479463	5.76	0.000	.1818232 .3708693
kc13	.3820885	.0497789	7.68	0.000	.2839527 .4802243
kc14	.7554459	.0380403	19.86	0.000	.680452 .8304399
kc15	.4289718	.039251	10.93	0.000	.3515911 .5063526
kc16	.3609277	.0379278	9.52	0.000	.2861555 .4356999
kc17	.7067811	.0393735	17.95	0.000	.6291588 .7844033
kc18	.8873133	.0425034	20.88	0.000	.8035207 .9711059
kc19	.3333843	.0423852	7.87	0.000	.2498248 .4169439
kc20	.3849183	.0425419	9.05	0.000	.3010498 .4687869
kc21	.3462895	.0486143	7.12	0.000	.2504495 .4421294
kc22	1.018523	.0594658	17.13	0.000	.9012903 1.135756
kc23	.4522204	.0542734	8.33	0.000	.345224 .5592169
kc24	1.019872	.0434682	23.46	0.000	.9341778 1.105567